

ENEWSLETTER

PKSPARLEMEN

KREATIF, ATRAKTIF, SUBSTANTIF

Edisi Juni | Tahun 2021 No. 15

FRAKSI PARTAI Keadilan Sejahtera
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA



H. Ecky Awal Mucharam

*Rencana Pemerintah
Naikkan PPN*

**Menekan
Rakyat
Kecil**



PPN Sembako dan Pendidikan Jadi Wacana Saja Tak Pantas, Apalagi Jadi UU

KUTIPAN

Riuh ruang publik kala Pemerintah mengusulkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) bagi sembako dan lembaga pendidikan.

Tercantum dalam Rancangan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP) yang diajukan oleh Presiden kepada Pimpinan DPR RI.

Dalam Pasal 4A draf revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 disebutkan barang kebutuhan pokok dan hasil pertambangan dihapus dalam kelompok jenis barang yang tidak dikenai PPN.

Sungguh sebuah wacana yang tidak pantas dilontarkan kala kita sedang berjuang menghadapi Covid 19 yang tidak kunjung usai.

Seperti biasa, otoritas jika ada kebijakan yang tidak tepat dan sudah bocor (leaks) akan menunjuk penanggap sebagai penyebab berita bohong (Hoax). Reaksi seperti ini bukan pertama kali, yang paling kentara tengok saja kala UU Cipta Kerja masih berbentuk

versi yang belum lengkap, buru-buru ditebar tuduhan Hoax bagi yang menolak. Padahal pihak yang menolak dilandasi dengan argumentasi yang memadai dan gagasan utuh. Tanpa revisi berkali-kali, pasal dan halaman.

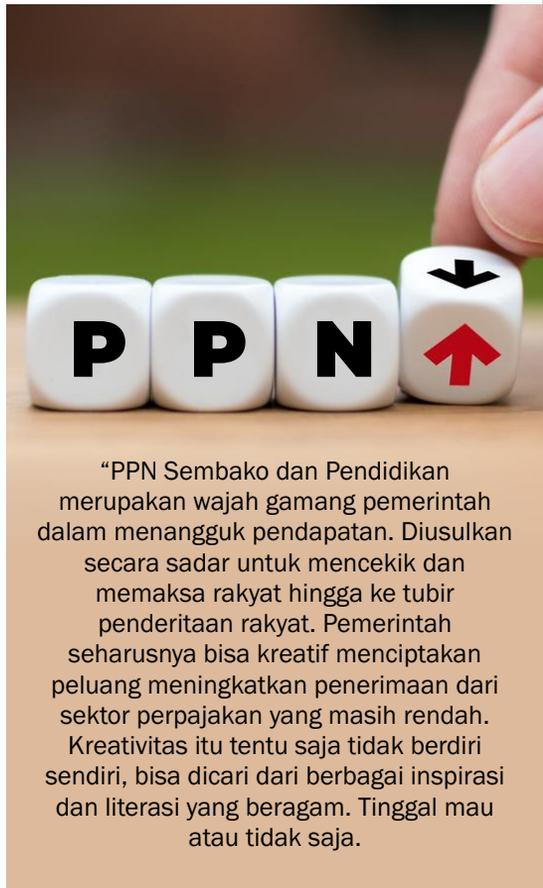
Strategi komunikasi seperti ini bukan tanpa resiko, secara umum telah memberi dampak buruk dalam kehidupan sosial dan kebangsaan. Dalam skala kecil tuduhan seperti ini telah merugikan kehidupan sebagian orang; Ada yang ditangkap oleh penegak hukum hingga saat ini, membuat aparat gamang, hingga stigma buruk dan dihancurkan kepribadian.

Covid 19, menjadi satu alasan "pamungkas" dan "standar ganda" yang berulang kali digunakan oleh otoritas untuk berkilah dari kerja yang tidak paripurna dan kebijakan yang tidak beres. Padahal kala

banyak negara sudah berhasil melewati pandemi, ironisnya kita masih berputar-putar pada urusan yang sama. Anggaran terkuras, jumlah yang terpapar makin banyak dan sistem yang tidak efektif. Tengok saja gelaran Piala Eropa 2021 yang sudah menghadirkan penonton dalam jumlah tertentu.

Setelah bocor informasinya keruang publik kemudian membangun alasan bahwa penerapan PPN sembako dan pendidikan hanya untuk premium, pun pemberlakuan selepas pandemi dan hanya orang yang berpunya. Satu resep mujarab untuk menghalau siapapun pendukung di lini masa, yang cara kerjanya seperti sorak sorai supporter garis keras. Menang kalah dukung membabitua, padahal ada urusan yang lebih penting dari sekedar asal beda.

PPN Sembako dan Pendidikan merupakan wajah gamang pemerintah dalam menanggung pendapatan. Diusulkan secara sadar untuk mencekik dan memaksa rakyat hingga ke tubir penderitaan rakyat. Pemerintah seharusnya bisa kreatif menciptakan peluang meningkatkan penerimaan dari sektor perpajakan yang masih rendah. Kreativitas itu tentu saja tidak berdiri sendiri, bisa dicari dari berbagai inspirasi dan literasi yang beragam. Tinggal mau atau tidak saja.



“PPN Sembako dan Pendidikan merupakan wajah gamang pemerintah dalam menanggung pendapatan. Diusulkan secara sadar untuk mencekik dan memaksa rakyat hingga ke tubir penderitaan rakyat. Pemerintah seharusnya bisa kreatif menciptakan peluang meningkatkan penerimaan dari sektor perpajakan yang masih rendah. Kreativitas itu tentu saja tidak berdiri sendiri, bisa dicari dari berbagai inspirasi dan literasi yang beragam. Tinggal mau atau tidak saja.

Wakil Ketua FPKS: Rencana Pemerintah Naikan PPN Akan **Menekan Rakyat Kecil** dan Kontraproduktif

KUTIPAN

Jakarta (09/06) — Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi PKS, Ecky Awal Mucharam berpendapat bahwa kenaikan PPN sangat merugikan rakyat kecil dan kontraproduktif dengan agenda pemulihan ekonomi nasional.

"Lebih dari 56% perekonomian Indonesia dibentuk oleh konsumsi masyarakat, apabila dikenakan PPN, logikanya daya beli masyarakat akan semakin turun, yang pada akhirnya justru menghambat pertumbuhan ekonomi" kata Ecky di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta (09/06).

Ecky mengatakan Pemerintah tidak konsisten dengan rencananya sendiri, karena dalam KEM-PPKF jelas dikatakan bahwa strategi utama perpajakan ada ekstensifikasi perpajakan, dengan mencari sumber baru, bukan justru intensifikasi dengan kenaikan tarif PPN.

"Tarif PPN itu sangat bergantung dengan model PPN

setiap negara. Negara yang menerapkan PPN secara luas, seperti Indonesia, umumnya tarif PPN nya rendah, antara 5-10%, seperti Thailand, Malaysia, Vietnam, Australia, Jepang dan Korea Selatan," ungkap Ecky.

Kalau penerapan PPN nya secara spesifik, imbuhnya, seperti negara-negara OECD baru wajar tarif nya di atas 10%.

"Pemerintah jadi tidak konsisten, penerapan PPN nya luas, tapi ikut tarif yang tinggi," pungkasnya.

Anggota Dewan dari Fraksi PKS ini menegaskan pajak pertambahan nilai masih jauh di bawah potensi yang ada, rasio PPN terhadap PDB hanya mencapai 3,6%, sangat rendah dari standar negara-negara

secara umum yang mencapai 6 hingga 9%.

"Artinya, peluang untuk mendorong ekstensifikasi PPN masih besar, terutama diperkirakan potensi penerimaan PPN diperkirakan masih mencapai 32% dari potensi yang ada" tegasnya.

Ecky mengingatkan Pemerintah bahwa sumber PPN terbesar berasal dari PPN dalam negeri, berupa konsumsi masyarakat, dan PPN impor, yang merupakan konsumsi bahan modal dan bahan baku bagi industri.

"Artinya, kenaikan tarif PPN tidak hanya melemahkan daya beli masyarakat, tetapi juga akan meningkatkan tekanan bagi industri, oleh sebab itu dari awal saya katakan rencana ini justru kontraproduktif dengan agenda pemulihan ekonomi nasional", ujar Ecky.

Ecky menegaskan keberpihakan Pemerintah terhadap rakyat kecil patut dipertanyakan, dimana ketika PPN yang berdampak ke masyarakat luas mau dinaikkan, sedangkan PPNBM



H. ECKY AWAL MUCHARAM

Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI

"Pemerintah tidak konsisten dengan rencananya sendiri, karena dalam KEM-PPKF jelas dikatakan bahwa strategi utama perpajakan ada ekstensifikasi perpajakan, dengan mencari sumber baru, bukan justru intensifikasi dengan kenaikan tarif PPN. Tarif PPN itu sangat bergantung dengan model PPN setiap negara. Negara yang menerapkan PPN secara luas, seperti Indonesia, umumnya tarif PPN nya rendah, antara 5-10%, seperti Thailand, Malaysia, Vietnam, Australia, Jepang dan Korea Selatan

untuk masyarakat kaya justru diturunkan.

"Logika Pemerintah terbalik, pajak yang besar justru dikenakan kepada si miskin,

bukan si kaya, ini bertentangan dengan fungsi PPN sebagai salah satu instrument untuk mengatasi ketimpangan pendapatan" tutupnya.

HNW Tolak PPN untuk Sekolah Karena **Menambah Beban Rakyat** dan Tidak Sesuai Pancasila

KUTIPAN

Jakarta (11/06) — Anggota DPR yang juga Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid mengkritik dan menolak wacana pengenaan pajak pertambahan nilai (PPN),

sebagaimana tertuang dalam draft RUU Perubahan Kelima Atas Undang-undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), dalam draft tersebut, Pasal 7 Ayat 1 tertulis, tarif PPN adalah 12%.

Menanggapi rencana pemerintah tersebut, Anggota DPR RI Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Rofik Hananto menolak keras terkait rencana PPN naik dari 10 persen menjadi 12 persen.

"PKS menolak keras terkait rencana PPN naik menjadi 12 persen. Pemerintah sebaiknya lebih kreatif dan inovatif mencari sumber-sumber pendapatan negara. Jangan terus menerus membebani rakyat dengan berbagai tarif pajak baru. Jangan naikkan PPN menjadi

12 persen," kata Rofik

Rofik menegaskan, rencana tersebut akan menambah beban berat masyarakat di tengah menurunnya tingkat ekonomi masyarakat di masa pandemi yang tidak berkesudahan ini.

Selain itu menurut pria yang akrab disapa mas rofik ini juga menolak rencana pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12 persen untuk sembako, jasa pendidikan dan jasa kesehatan, tahun depan.

Pria yang merupakan Anggota Badan Anggaran DPR RI juga menambahkan rencana pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12 persen untuk sembako juga menyebabkan petani kecil makin miskin karena makin sulit menjual produknya di saat konsumen makin mengerem belanja imbas

kenaikan PPN tersebut.

"Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12 persen untuk sembako dari produksi pertanian juga akan menyebabkan petani kecil kehilangan kesejahteraan dan akhirnya makin miskin di tengah pandemi," tuturnya.

Dia menilai, logika Pemerintah terbalik. Pajak yang besar justru dikenakan kepada si miskin, bukan si kaya. Ini bertentangan dengan fungsi PPN sebagai salah satu instrument untuk mengatasi ketimpangan pendapatan.

Rofik menyarankan kepada pemerintah agar sebaiknya ide kenaikan PPN dan penganakan pajak untuk sembako, pendidikan dan kesehatan dibatalkan saja, karena manfaatnya lebih kecil dibandingkan dengan mudaratnya.

"Hal tersebut lebih baik daripada kenaikan PPN justru menimbulkan inflasi di saat ekonomi masih lemah," tegas Anggota DPR RI dari Dapil Jawa Tengah itu.



Dr. H.M. HIDAYAT NUR WAHID, M.A

Wakil Ketua MPR RI

"Muhammadiyah, NU dan lainnya sudah sangat lama dan sangat banyak membantu pemerintah melaksanakan kewajiban pendidikan nasional, baik umum maupun keagamaan. Pada saat mereka kesusahan akibat Covid-19 mestinya kalau pun pemerintah tidak bisa membantu, ya jangan menambah kesulitan mereka dengan memberlakukan pajak (PPN) kepada mereka. Selain itu membebani dari sisi keuangan, juga bisa merobah paradigma pendidikan sebagai investasi untuk peningkatan SDM Indonesia, menjadi komoditas material objek pajak"

Rencana PPN Sembako dan Jasa Sekolah, Politisi PKS: Pemerintah Makin Ngawur

KUTIPAN

Jakarta (11/06) — Rencana pemerintah yang tertuang dalam RUU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) untuk menaikkan PPN dari 10 persen menjadi 12 persen, serta perluasan penerapan PPN untuk sembako, jasa sekolah, jasa penyiaran yang tidak bersifat iklan, jasa tenaga kerja dan beberapa bentuk jasa lainnya.

Menurut Anggota Badan Anggaran DPR RI Sukamta mengatakan, rencana pemerintah yang jika dilakukan bisa berdampak berat terhadap rakyat kecil.

"Saat ini masyarakat kecil sangat terdampak oleh pandemi, mestinya pikiran pemerintah itu bagaimana memberikan subsidi sembako supaya harganya stabil dan terjangkau bukan malah akan dipajaki. Sembako itu kebutuhan seluruh masyarakat, bagi rakyat kecil sembako itu barang mewah untuk menyambung hidup. Jika pajak dikenakan pada sembako,

harga-harga akan naik dan memicu inflasi, ini juga bisa memunculkan kelangkaan barang. Rakyat kecil akan makin tak berdaya. Jika ini yang terjadi, maka pemerintah gagal melindungi hajat hidup orang banyak sebagaimana diamanahkan konstitusi," papar Sukamta.

Wakil Ketua Fraksi PKS ini menduga rencana pemerintah memperluas cakupan pajak ini karena ingin mendongkrak pendapatan negara yang saat pandemi mengalami penurunan tajam. Tetapi menurutnya jika cara menaikkan pendapatan

dengan membebani pajak sembako hingga jasa sekolah, ini menunjukkan kreativitas pemerintah tumpul.

"Pemerintah semestinya meningkatkan kinerja ekspor. Pemerintah juga bisa menambah pajak pada barang-barang yang bisa mencemari lingkungan dan mengganggu kesehatan seperti rokok, plastik, makanan berbasis soda dan gula/ manisan. Jadi tolong lebih kreatif, jangan malah bebani rakyat kecil," tegasnya.

Sukamta menyatakan fraksinya jelas akan bersikap menolak adanya rencana penerapan pajak terhadap sembako, jasa sekolah dan semua hal yang berdampak membebani rakyat kecil.

"Selama ini rakyat kecil sudah dapat banyak beban, ada pajak penerangan jalan, pajak kendaraan bermotor, dll. Kebijakan yang selama ini berlaku dengan tidak ada PPN untuk sembako semestinya tidak perlu dirubah," tutup Sukamta.



H. SUKAMTA, Ph.D.
Anggota Badan Anggaran DPR RI

"Pemerintah semestinya meningkatkan kinerja ekspor. Pemerintah juga bisa menambah pajak pada barang-barang yang bisa mencemari lingkungan dan mengganggu kesehatan seperti rokok, plastik, makanan berbasis soda dan gula/ manisan. Jadi tolong lebih kreatif, jangan malah bebani rakyat kecil"

SEKOLAH KENA PAJAK

PPN SEKOLAH, MADRASAH DAN PESANTREN **TIDAK** **SESUAI PANCASILA** **DAN KONSTITUSI**

Fraksi PKS menolak rencana dan wacana sekolah/ madrasah dikenakan PPN. FPKS mendesak Kemenkeu untuk tidak merevisi UU Perpajakan untuk pemberlakuan pajak tersebut. Selain tidak empati juga tidak sesuai dengan Pancasila dan Konstitusi karena jauh dari prinsip keadilan serta kemanusiaan.



Fikri Faqih
Lembaga Pendidikan tak pantas dipajaki

“Pelanggaran atas konstitusi memiliki konsekuensi yang serius, terlebih menyangkut Pendidikan anak bangsa. Wacana ini telah mencederai cita-cita pendiri bangsa kita, yang tertulis jelas dalam preambule UUD 1945, yakni tujuan negara untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Harusnya pendidikan diposisikan sebagai investasi bagi bangsa ini, bukan dihitung sebagai sektor komersial yg pantas dikenakan pajak”



Sukamta:
Jangan Terus
Bebani Rakyat Kecil

PKS jelas akan menolak adanya rencana pengenaan pajak terhadap sembako, jasa sekolah dan semua hal yang berdampak membebani rakyat kecil. Selama ini rakyat kecil sudah dapat banyak beban, ada pajak penerangan jalan, pajak kendaraan bermotor, dll. Kebijakan yang selama ini berlaku dengan tidak ada PPN untuk sembako semestinya tidak perlu dirubah



Hidayat Nurwahid:
Seharusnya
Pemerintah
Berterima Kasih

“Seharusnya pemerintah berterimakasih, dan melindungi atau membantu pihak swasta/non pemerintah yang menjadi penyelenggara jasa pendidikan karena telah membantu pemerintah memenuhi hak setiap warga negara untuk memperoleh pendidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (1) UUD NRI 1945,”

PKS Kritik Wacana PPN Naik 12%: Jangan Tambah Beban Masyarakat

KUTIPAN

Jakarta (09/06) — Pemerintah berencana menaikkan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12 persen. PKS mengaku heran dengan wacana pemerintah terkait kenaikan PPN tersebut.

"Terus terang saya merasa aneh dengan kebijakan pemerintah ini, ketika ekonomi sedang berjuang tertata-tatih untuk bangkit dan pulih, tetapi malah dihantam dengan rencana menaikkan PPN," kata Ketua DPP PKS Bidang Ekonomi dan Keuangan Anis Byarwati saat dihubungi, Selasa (08/06/2021).

Anggota Komisi XI DPR ini heran dengan wacana pemerintah tersebut di tengah daya beli masyarakat yang tengah tertekan karena pandemi. Dia pun mempertanyakan keberpihakan pemerintah.

"Menaikkan tarif PPN dalam kondisi daya beli masyarakat yang tertekan akibat pandemi dan krisis ekonomi bukanlah merupakan kebijakan yang tepat. Kenaikan PPN dampak kontraksinya bisa

ke segala lapisan masyarakat, khususnya masyarakat menengah bawah. Patut dipertanyakan bukti keberpihakan pemerintah terhadap rakyat," ucapnya.

Lebih lanjut, Anis meminta pemerintah tidak mencari jalan pintas dengan menaikkan PPN. Dia kemudian menyinggung penurunan PPh badan, obral insentif pajak, pembebasan PPNBM yang dilakukan pemerintah.

"Pemerintah jangan mencari jalan pintas untuk memenuhi target pajak. Jangan sampai Pemerintah kembali 'mencederai rasa keadilan'. Kita masih ingat bahwa Pemerintah baru saja menurunkan tarif PPh Badan, obral insentif pajak, dan bahkan pembebasan PPNBM yang hanya menyasar kalangan tertentu yang notabene

golongan menengah ke atas," ujarnya.

"Tetapi di saat yang sama Pemerintah berencana menaikkan tarif PPN yang sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari karena menyangkut konsumsi barang dan jasa masyarakat secara keseluruhan. PPN konteksnya pajak yang paling dekat dengan masyarakat. Beli minum, beli baju, belanja di supermarket atau restoran, semua ada PPN-nya, dan itu semua dibebankan oleh penjual kepada konsumen akhir," lanjutnya.

Dia mendesak agar pemerintah tidak menambah beban baru bagi masyarakat dengan menaikkan PPN. Anis menyarankan lebih baik pemerintah menurunkan PPN menjadi 5%.

"Jangan sampai kenaikan PPN ini menjadi beban baru bagi konsumen dan dunia usaha secara luas. Jangan menambah beban masyarakat yang sedang susah dengan kenaikan PPN," tuturnya.

Seperti diketahui, pemerintah berencana mengubah tarif PPN dari 10% menjadi 12%. Upaya pemerintah mengerek tarif PPN



Dr. Hj. ANIS BYARWATI, S.Ag.,M.Si
Anggota Komisi XI DPR RI

"Jangan sampai kenaikan PPN ini menjadi beban baru bagi konsumen dan dunia usaha secara luas. Jangan menambah beban masyarakat yang sedang susah dengan kenaikan PPN,"

tersebut tertuang dalam draf RUU Perubahan Kelima atas Undang-Undang No 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).

Dalam draf tersebut, Pasal 7 ayat 1 menyebutkan tarif PPN adalah 12%.

"Tarif pajak pertambahan nilai adalah 12%," demikian bunyi Pasal 7 ayat 1.

Wakil Ketua Komisi X FPKS: Sekolah Kena Pajak, Pemerintah **Langgar** **Konstitusi**

KUTIPAN

Fikri justru meminta pemerintah berpikir dengan jernih dan lurus. “Harusnya pendidikan diposisikan sebagai investasi bagi bangsa ini, bukan dihitung sebagai sektor komersial yang pantas dikenakan pajak,” pungkask dia.

Jakarta (11/06) — Wakil Ketua Komisi X DPR RI dari Fraksi PKS, Abdul Fikri Faqih mendesak pemerintah menjelaskan soal wacana mengenakan pajak pertambahan nilai (PPN) 12% kepada sektor jasa pendidikan, termasuk di antaranya sekolah. “Sedangkan negara wajib mengalokasikan 20 persen anggaran belanja negara untuk Pendidikan menurut konstitusi,” kata dia di Jakarta, Kamis (10/6).

Politisi PKS ini heran wacana tersebut bisa muncul, karena konstitusi menekankan bahwa Pendidikan merupakan tanggung jawab negara, sesuai pasal 31 UUD 1945. Dalam

amandemen ke-4 UUD 1945, pasal 31 Ayat (2) menyebut setiap warga negara wajib mengikuti Pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.

“Jadi tugas negara membiayai Pendidikan rakyat, bukan sebaliknya rakyat membiayai Pendidikan dan dipajaki pula,” kata Fikri.

Selain itu, pasal 31 ayat (4) nya merupakan mandat bagi pemerintah di Republik ini untuk mengalokasikan sebesar 20 persen belanja negara untuk Pendidikan.

“Kalau kemudian dipajakin 12 persen, nilainya menjadi berkurang lagi, ini sama saja akal-akalan,” cetus

Fikri.

Fikri mengingatkan pelanggaran atas konstitusi memiliki konsekuensi yang serius, terlebih menyangkut Pendidikan anak bangsa.

“Wacana ini telah mencederai cita-cita pendiri bangsa kita, yang tertulis jelas dalam preambule UUD 1945, yakni tujuan negara untuk mencerdaskan kehidupan bangsa,” imbuhnya.

Fikri justru meminta pemerintah berpikir dengan jernih dan lurus.

“Harusnya pendidikan diposisikan sebagai investasi bagi bangsa ini, bukan dihitung sebagai sektor komersial yang pantas dikenakan pajak,” pungkask dia.



Dr. H. ABDUL FIKRI FAQIH, MM

Wakil Ketua Komisi X DPR RI

“Pelanggaran atas konstitusi memiliki konsekuensi yang serius, terlebih menyangkut Pendidikan anak bangsa. Wacana ini telah mencederai cita-cita pendiri bangsa kita, yang tertulis jelas dalam preambule UUD 1945, yakni tujuan negara untuk mencerdaskan kehidupan bangsa

Pemerintah Usulkan Kenaikan Tarif PPN Menjadi 12%, Aleg PKS: **Jangan Terus Beban Rakyat**

KUTIPAN

Jakarta (11/06) --- Pemerintah mengusulkan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) akan dinaikkan dari 10% menjadi 12%,

sebagaimana tertuang dalam draft RUU Perubahan Kelima Atas Undang-undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), dalam draft tersebut, Pasal 7 Ayat 1 tertulis, tarif PPN adalah 12%.

Menanggapi rencana pemerintah tersebut, Anggota DPR RI Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Rofik Hananto menolak keras terkait rencana PPN naik dari 10 persen menjadi 12 persen.

"PKS menolak keras terkait rencana PPN naik menjadi 12 persen. Pemerintah sebaiknya lebih kreatif dan inovatif mencari sumber-sumber pendapatan negara. Jangan terus menerus membebani rakyat dengan berbagai tarif pajak baru. Jangan naikkan PPN menjadi 12 persen," kata Rofik

Rofik menegaskan, rencana tersebut akan menambah beban berat masyarakat di tengah menurunnya tingkat ekonomi masyarakat di masa pandemi yang tidak berkesudahan ini.

Selain itu menurut pria yang akrab disapa mas rofik ini juga menolak rencana peneraan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12 persen untuk sembako, jasa pendidikan dan jasa kesehatan, tahun depan.

Pria yang merupakan Anggota Badan Anggaran DPR RI juga menambahkan rencana peneraan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12 persen untuk sembako juga menyebabkan petani kecil makin miskin karena makin sulit menjual produknya di saat konsumen makin mengerem belanja imbas kenaikan PPN tersebut.

"Peneraan Pajak

Pertambahan Nilai (PPN) 12 persen untuk sembako dari produksi pertanian juga akan menyebabkan petani kecil kehilangan kesejahteraan dan akhirnya makin miskin di tengah pandemi," tuturnya.

Dia menilai, logika Pemerintah terbalik. Pajak yang besar justru dikenakan kepada si miskin, bukan si kaya. Ini bertentangan dengan fungsi PPN sebagai salah satu instrument untuk mengatasi ketimpangan pendapatan.

Rofik menyarankan kepada pemerintah agar sebaiknya ide kenaikan PPN dan peneraan pajak untuk sembako, pendidikan dan kesehatan dibatalkan saja, karena manfaatnya lebih kecil dibandingkan dengan mudarnya.

"Hal tersebut lebih baik daripada kenaikan PPN justru menimbulkan inflasi di saat ekonomi masih lemah," tegas Anggota DPR RI dari Dapil Jawa Tengah itu.



H. ROFIK HANANTO, S.E

Anggota Komisi VII DPR RI

"PKS menolak keras terkait rencana PPN naik menjadi 12 persen. Pemerintah sebaiknya lebih kreatif dan inovatif mencari sumber-sumber pendapatan negara. Jangan terus menerus membebani rakyat dengan berbagai tarif pajak baru. Jangan naikkan PPN menjadi 12 persen"

Pajaki Sembako, Aleg PKS: Pemerintah Hambat Pemulihan Ekonomi Rakyat

KUTIPAN

Jakarta (10/06) — Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PKS, Amin Ak mendesak Pemerintah membatalkan rencana untuk mengenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap barang-barang kebutuhan pokok (sembako).

Menurut Amin, kebijakan tersebut justru kontraproduktif dan menghambat pemulihan ekonomi rakyat yang sudah susah akibat pandemi Covid-19.

"Dimana-mana kalau resesi itu, pajak dikurangi jadi sekecil mungkin. PPN atas Sembako maupun kenaikan PPN lainnya akan semakin membebani rakyat," tegasnya.

Menurut Amin, rencana pemberlakuan PPN terhadap sembako sebesar 12% akan memperbesar pengeluaran masyarakat sehingga berdampak terpengkasnya tingkat kesejahteraan masyarakat.

"Naiknya harga karena dikenakan PPN akan menurunkan daya beli masyarakat sehingga berdampak pada kesehatan, terutama anak-anak kalangan

kelompok bawah akan kekurangan gizi," ungkapny.

Selain membebani rakyat dari sisi konsumen, lanjut Amin, kebijakan tersebut memberatkan para pedagang terutama jutaan pedagang kecil karena kesulitan untuk menjual barang dagangannya akibat kenaikan harga jika PPN diberlakukan.

"Bagi perusahaan perdagangan maupun industri juga makin berat karena bisa dipastikan penjualan perusahaan akan turun," pungkasnya.

Merujuk data dari Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (IKAPPI) selama pandemi Covid-19, lebih dari 50% omzet pedagang pasar turun. Belum lagi sejumlah barang kebutuhan yang mengalami fluktuasi harga, dengan dikenakan PPN

maka harga-harga kebutuhan pokok yang dibutuhkan masyarakat otomatis akan makin naik dan mahal untuk dijangkau.

Kenaikan PPN terutama pemberlakuan PPN pada sembako, alih-alih meningkatkan perolehan pajak, justru menyebabkan pemulihan ekonomi akan semakin lambat.

Menurut Amin, pemerintah seharusnya konsisten untuk memulihkan perekonomian, antara lain dengan memberikan lebih banyak insentif agar konsumsi atau belanja masyarakat menengah meningkat.

Amin menilai kunci utama percepatan pemulihan ekonomi terletak pada tingkat konsumsi masyarakat. Selain itu belanja konsumsi ini juga bisa membantu bisnis para pelaku UMKM untuk kembali pulih setelah terdampak pandemi Covid-19.

"Kebijakan pemerintah kok makin membingungkan. Pertumbuhan ekonomi ingin diatas 6%, tapi faktor penting yang mempengaruhi pertumbuhan, yaitu tingkat konsumsi masyarakat, kok malah direcoki dengan pajak," tanya Amin.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id



AMIN AK, M.M.
Anggota Komisi VI DPR RI

"Rencana pemberlakuan PPN terhadap sembako sebesar 12% akan memperbesar pengeluaran masyarakat sehingga berdampak terpengkasnya tingkat kesejahteraan masyarakat. Naiknya harga karena dikenakan PPN akan menurunkan daya beli masyarakat sehingga berdampak pada kesehatan, terutama anak-anak kalangan kelompok bawah akan kekurangan gizi"

Anggota FPKS: Pajak Sembako Mencederai Rasa Keadilan

KUTIPAN

Pemerintah berencana mengenakan tarif PPN untuk kebutuhan pokok atau sembako. Wacana tersebut tertuang dalam Draf Revisi Kelima Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP).

Jakarta (11/06) — Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PKS, Hermanto, menolak tegas rencana Pemerintah mengenakan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk kebutuhan pokok atau sembako. Wacana tersebut mencederai rasa keadilan.

"Sejak Maret lalu Pemerintah memberlakukan kebijakan penghapusan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) untuk mobil baru. Orang kaya pajaknya malah dibebaskan," tutur Hermanto dalam keterangan tertulisnya kepada wartawan.

Pembebasan PPnBm tersebut, lanjut Hermanto, diatur di dalam PMK Nomor 33/PMK.010/2017 tentang Jenis Kendaraan Bermotor yang

Dikenai Pajak Penjualan Atas Barang Mewah dan Tata Cara Pemberian Pembebasan dari Pengenaan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.

"Sementara itu sembako atau pangan yang bukan barang mewah yang dibutuhkan oleh rakyat miskin mau dikenakan PPN," ujar legislator dari FPKS DPR ini.

"Hal tersebut tidak memenuhi rasa keadilan sebagaimana amanat Pancasila sila ke-5 yang menghendaki keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia", tambah legislator dari Dapil Sumbar I ini.

Pemerintah berencana mengenakan tarif PPN untuk kebutuhan pokok atau sembako. Wacana tersebut tertuang dalam Draf Revisi

Kelima Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP).

"Di dalam aturan tersebut, sembako tidak lagi termasuk dalam obyek yang PPN-nya dikecualikan," imbuhnya.

Terkait hal tersebut Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo menjelaskan, meski revisi RUU KUP mulai dirancang tahun ini, bukan berarti pemungutan pajak sembako akan dilakukan di tahun yang sama.

Penerapan pungutan atas PPN Sembako untuk beberapa barang dan jasa yang sebelumnya dikecualikan pun menunggu ekonomi pulih secara bertahap.



Dr. HERMANTO, S.E., M.M
Anggota Komisi IV DPR RI

"Sejak Maret lalu Pemerintah memberlakukan kebijakan penghapusan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) untuk mobil baru. Orang kaya pajaknya malah dibebaskan, Pembebasan PPnBm tersebut, lanjut Hermanto, diatur di dalam PMK Nomor 33/PMK.010/2017 tentang Jenis Kendaraan Bermotor yang Dikenai Pajak Penjualan Atas Barang Mewah dan Tata Cara Pemberian Pembebasan dari Pengenaan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah. Sementara itu sembako atau pangan yang bukan barang mewah yang dibutuhkan oleh rakyat miskin mau dikenakan PPN.



FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

Kreatif, Atraktif, Substantif

Dr. H. JAZULI JUWAINI, MA
Ketua Fraksi PKS DPR RI

Hj. LEDIA HANIFA A, S.Si., M.Psi.T
Sekretaris Fraksi PKS DPR RI

Fraksi PKS DPR RI: **Kokohkan** Pancasila Sebagai Ideologi Pemersatu Bangsa

KUTIPAN

Jakarta (11/06) --- Ketua Fraksi PKS DPR Jazuli Juwaini mengatakan Pancasila harus menjadi ideologi pemersatu bangsa, hanya dengan demikian keutuhan NKRI terjaga

Hal ini disampaikan dalam Program Mimbar Demokrasi Kebangsaan Fraksi PKS DPR RI seri ke-5 'Mengkokohkan Pancasila Sebagai Ideologi Pemersatu dan Penjaga Keutuhan NKRI'. Hadir sebagai narasumber Prof. Salim Haji Said, Ph.D (Ilmuwan Politik, Guru Besar Universitas Pertahanan), Dr. H. Ahmad Heryawan, M.Si (Wakil Ketua Majelis Syuro PKS), Pdt. Jimmy Sormin, MA (Sekretaris Eksekutif KKC Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia/PGI), pada Jum'at (11/06).

"Mimbar demokrasi kebangsaan kali ini mengangkat tema tentang Pancasila. Tema ini diangkat bertepatan dengan momentum bulan Juni sebagai Bulan Pancasila, lebih tepatnya pada 1 Juni yang ditetapkan sebagai

#MIMBAR
DEMOKRASI
KEBANGSAAN
FRAKSI PKS DPR RI

Hari Lahir Pancasila. Pancasila menjadi penting karena Pancasila adalah dasar negara Indonesia merdeka, falsafah dasar yang menjadikan Indonesia bersatu. Diterima sebagai kesepakatan bersama oleh semua kelompok dan golongan," papar Jazuli dalam acara yang dilaksanakan secara virtual melalui zoom meeting itu.

Jazuli menambahkan bahwa dalam penetapan Pancasila sebagai dasar negara, melalui perdebatan konseptual dalam rumusan sila-sila di dalamnya, dimana perdebatan ini menunjukkan tiga hal penting, yaitu: Pertama,

kualitas pemikiran (isi kepala) bangsa kita. Kedua, menunjukkan kualitas peradaban bangsa Indonesia dengan karakter yang unggul. Lalu yang Ketiga, dimana ini yang sangat penting, yaitu menunjukkan kedewasaan dan kebesaran hati tokoh bangsa untuk menjaga persatuan di atas semua kepentingan golongan.

"Dengan seluruh latar filosofis lahirnya Pancasila tersebut, kita harus menunjukkan sikap dan perilaku kebangsaan yang tepat, yaitu: Pertama, Pancasila telah final sebagai dasar negara, falsafah dasar dan ideologi negara. Kedua, menjadikan Pancasila milik bersama sebagai ideologi terbuka. Ketiga, menjadikan Pancasila ideologi pemersatu. Keempat, menghindari sikap bernegara yang polaritatif. Kelima, tidak mempertentangan secara dikotomis nilai yang inheren dalam Pancasila. Keenam, mengedepankan sikap toleransi (tasammuh), silaturahmi, kerjasama, dan gotong royong dalam membangun bangsa," urainya.



Dr. H. JAZULI JUWAINI, MA
Ketua Fraksi PKS DPR RI

"Pancasila menjadi penting karena Pancasila adalah dasar negara Indonesia merdeka, falsafah dasar yang menjadikan Indonesia bersatu. Diterima sebagai kesepakatan bersama oleh semua kelompok dan golongan"

Sebagai penutup, Jazuli menjelaskan alasan penting di balik program silaturahmi kebangsaan PKS, menurutnya kegiatan itu merupakan salah satu bentuk implementasi Pancasila sebagai pemersatu

dan penjaga keutuhan NKRI, yakni dengan cara bersilaturahmi untuk membangun kebersamaan
Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id

Ketua FPKS DPR RI: Silaturahmi Kebangsaan PKS, Bentuk Implementasi Pancasila Sebagai Pemersatu Dan Penjaga Keutuhan NKRI

KUTIPAN

Jakarta (11/06) — Ketua Fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwaini menyebutkan bahwa silaturahmi kebangsaan DPP PKS untuk menyambangi partai politik dan beberapa tokoh di Indonesia merupakan bentuk implementasi Pancasila sebagai pemersatu dan penjaga keutuhan NKRI,

Hal ini disampaikan dalam acara Mimbar Demokrasi Kebangsaan FPKS DPR RI seri ke-5 “Mengokohkan Pancasila Sebagai Ideologi Pemersatu dan Penjaga Keutuhan NKRI” (11/06/2021)

“Mimbar demokrasi kebangsaan kali ini mengangkat tema tentang Pancasila. Tema ini diangkat bertepatan dengan momentum bulan Juni sebagai Bulan Pancasila, lebih tepatnya pada 1 Juni yang ditetapkan sebagai Hari Lahir Pancasila.



Pancasila menjadi penting karena Pancasila adalah dasar negara Indonesia merdeka. Diterima sebagai kesepakatan bersama oleh semua kelompok dan golongan.” Papar Jazuli dalam acara yang dilaksanakan secara virtual melalui zoom meeting itu.

Jazuli menambahkan

bahwa dalam penetapan Pancasila sebagai dasar negara, melalui berbagai macam perdebatan tentang konseptual dalam rumusan sila-sila didalamnya, dimana perdebatan ini menunjukkan bahwa ada tiga hal yang menunjukkan suatu hal di Indonesia, yaitu Pertama, kualitas pemikiran (isi kepala) bangsa kita. Kedua, menunjukkan kualitas peradaban bangsa Indonesia dengan karakter yang unggul. Lalu yang Ketiga, dimana ini yang sangat penting, yaitu menunjukkan kedewasaan dan keberanian hati tokoh bangsa untuk menjaga persatuan di atas semua kepentingan golongan.

“Dengan seluruh latar filosofis lahirnya Pancasila tersebut, kita harus menunjukkan sikap dan perilaku kebangsaan yang tepat, yaitu Pertama, Pancasila telah final sebagai dasar negara, falsafah dasar dan ideologi negara.” ujar Jazuli



Dr. H. JAZULI JUWAINI, MA

Ketua Fraksi PKS DPR RI

“Pancasila menjadi penting karena Pancasila adalah dasar negara Indonesia merdeka. Diterima sebagai kesepakatan bersama oleh semua kelompok dan golongan”

Kedua, menjadikan Pancasila milik bersama sebagai ideologi terbuka. Ketiga, menjadikan Pancasila ideologi pemersatu. Keempat, menghindari sikap bernegara yang polaritatif. Kelima, tidak mempertentangkan secara

dikotomis nilai yang inheren dalam Pancasila. Keenam, mengedepankan sikap toleransi (tasammuh), silaturahmi, kerjasama, dan gotong royong dalam membangun bangsa.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id

Mimbar Demokrasi FPKS

Salim Said: Kita Tidak Bisa Mengerti Indonesia, Ketika Tidak Mengerti Sejarah



KUTIPAN

Jakarta (11/06)—Ilmuwan Politik Salim Haji Said menjadi salah satu pembicara dalam Mimbar Demokrasi Kebangsaan FPKS DPR RI, dengan mengambil tema Mengokohkan Pancasila Sebagai Ideologi Pemersatu dan Penjaga Keutuhan NKRI.

Salim menekankan, bahwa jika ingin menafsirkan Pancasila, harus mempelajari sejarahnya terlebih dahulu.

dengan mengambil tema Mengokohkan Pancasila Sebagai Ideologi Pemersatu dan Penjaga Keutuhan NKRI. Salim menekankan, bahwa jika ingin menafsirkan Pancasila, harus mempelajari sejarahnya terlebih dahulu.

“Persoalannya adalah tafsiran Pancasila. Perbedaan tafsiran ini, karena kita tidak mempelajari sejarah dengan baik.” Ujar Salim.

Selain itu untuk mewujudkan negara yang

#MIMBAR
DEMOKRASI
KEBANGSAAN
FRAKSI PKS DPR RI

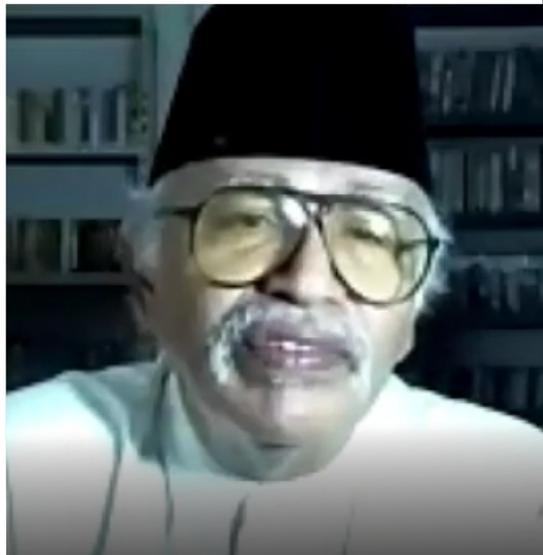
demokratis, Salim juga mengatakan harus adanya peradaban yang tinggi. Hal ini dikarenakan demokrasi merupakan ekspresi politik dari peradaban yang tinggi.

“Kemakmuran berkorelasi tinggi dengan peradaban, dan peradaban berkorelasi tinggi dengan kemungkinan terjadinya demokrasi. Jangan bosan-bosan bicara Pancasila, ini tidak akan selesai-selesai, sebab itu akan selesai ketika kita sudah dekat

dengan beradab.” Tutur Salim.

Pada akhirnya, Salim Haji Said mengatakan, bahwa jika ingin menjadi pemimpin, membicarakan mengenai demokrasi hingga menafsirkan Pancasila, maka harus memperhatikan historisnya. Kesalahan banyak pemimpin Indonesia adalah karena mereka tidak belajar sejarah. Sehingga mereka melakukan sesuatu yang tidak sesuai historis dan akibatnya mengalami kerancuan.

“Sejarah. Belajarlah sejarah, jangan memaksakan kehendak anda. Kehendak anda harus bertolak pada pengalaman historis, sehingga tidak melanggar hukum-hukum. Pelajarilah sejarah sebelum bergerak dalam Masyarakat Indonesia.” Tutupnya.

**Prof. SALIM HAJI SAID, Ph.D.**

Ilmuwan Politik Guru Besar UniversitasPertahanan

“Sejarah. Belajarlah sejarah, jangan memaksakan kehendak anda. Kehendak anda harus bertolak pada pengalaman historis, sehingga tidak melanggar hukum-hukum. Pelajarilah sejarah sebelum bergerak dalam Masyarakat Indonesia”



Ahmad Heryawan: **Jangan Sampai Penafsiran Tunggal Pancasila Kembali Hadir di Era Reformasi**

KUTIPAN

Jakarta (11/06) – Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Ahmad Heryawan yang akrab dipanggil Aher memaparkan bagaimana penafsiran pancasila sebagai sebuah dasar bernegara yang terbuka dan faktual

tanpa benturan dari penafsiran lainnya. Hal tersebut disampaikan dalam program Mimbar Demokrasi Kebangsaan Fraksi PKS DPR RI pada hari Jumat (11/6).

Mantan Gubernur Jawa Barat dua periode ini mengawali pembahasannya dengan menjelaskan sejarah singkat bagaimana terbentuknya pancasila yang sampai saat ini telah menjadi dasar bernegara.

“Sejarah singkat ini saya mulai dengan menceritakan bagaimana pada saat Sidang BPUPKI Radjiman menanyakan, apa yang menjadi sebuah falsafah bernegara Indonesia. Lalu, pada tanggal 29 Mei-1 Juni 1945 diadakan sidang untuk menetapkan dasar negara Indonesia. Hingga,



diakhir sidang terpilih lima poin penting yang menjadi dasar negara Indonesia,” kata Aher.

Politisi PKS ini melanjutkan dengan menyampaikan pancasila banyak ditafsirkan oleh beragam pakar, sehingga membuktikan bahwa dasar negara tersebut memiliki prinsip-prinsip terbuka dan faktual, guna membangun kesejahteraan Indonesia.

Saat ini di era reformasi, kita menyadari bahwa pancasila telah mendapatkan banyak penafsiran dari berbagai kalangan. Penafsiran tersebut

menandakan bahwa kehadirannya sangat terbuka dan nilai-nilai yang terkandung didalamnya banyak mempengaruhi berbagai dinamika kebangsaan sejak awal kemerdekaan,” ujar Aher.

Sambung Mantan Wakil Ketua DPRD DKI ini, untuk penafsiran sendiri sudah seharusnya terbuka dan tidak menghardikan tafsir tunggal yang pernah terjadi di beberapa masa kepemimpinan sebelumnya. Karena dengan adanya tafsir tunggal tersebut, maka akan menegasi penafsiran yang terbuka dan bernilai ilmiah serta mengandung nilai-nilai leluhur bangsa Indonesia.

“Jika kita melihat kebelakang, ketika era orde baru, penafsiran tunggal hadir hanya untuk menyelesaikan masalah stabilitas negara yang saat itu sedang terguncang oleh berbagai hal. Namun, di era reformasi seperti ini, jangan sampai penafsiran tunggal kembali hadir ditengah kita, karena kan merusak penafsiran pancasila yang terbuka dan faktual,” ujar Heryawan.



Dr. H. AHMAD HERAWAN, M.Si

Wakil Ketua Majelis Syuro PKS

“Jika kita melihat kebelakang, ketika era orde baru, penafsiran tunggal hadir hanya untuk menyelesaikan masalah stabilitas negara yang saat itu sedang terguncang oleh berbagai hal. Namun, di era reformasi seperti ini, jangan sampai penafsiran tunggal kembali hadir ditengah kita, karena kan merusak penafsiran pancasila yang terbuka dan faktual”

Diakhir Aher berpesan, bahwa sebagai anak bangsa dan khususnya dari PKS, bersama menyepakati pancasila sebagai titik temu seluruh kalangan di Indonesia,

dan menjadikannya sebagai sebuah pijakan fundamental dalam bernegara, guna membangun Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur.



Hari Lahir Pancasila, PGI Nyatakan Pancasila Mulai Tereodusir

KUTIPAN

Jakarta (11/6) - Sekretaris Eksekutif KKC Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia (PGI) Pdt. Jimmy Sormin mengatakan bahwa pancasila dalam satu dekade ini telah terodusir atau lebih terarah pada diskursus sila pertama ataupun sila ketiga.

"Sila pertama oleh karena persoalan politik identitas, persoalan kebebasan beragama dan berkeyakinan yang tidak selesai-selesai. Dan sila ketiga tentang persoalan separatisme atau terorisme yang kemudian menjadi isu tentang persatuan kita," papar Jimmy dalam Mimbar Demokrasi & Kebangsaan Seri ke-5 memperingati Hari Lahir Pancasila yang digelar Fraksi PKS DPR RI secara daring, Jum'at (11/6/2021).

Jimmy menambahkan bahwa kita juga melupakan esensi nilai-nilai lain yang ada dalam pancasila, seperti kemanusiaan yang adil dan beradab. Ia menggambarkan situasi yang terjadi di Papua dimana ribuan orang



mengungsi.

"Termasuk persoalan masyarakat di poso yang sudah bertahun-tahun mengalami ketakutan akan tekanan-tekanan aksi terorisme," sambung Jimmy.

Pada sila keadilan, Jimmy turut menambahkan bahwa kelompok-kelompok menengah kebawah yang selama ini mengalami ketidakadilan sosial juga akan menyebabkan semangat pancasila kita menjadi terodusir. Oleh sebab itu untuk mengokohkan pancasila itu sendiri menurutnya jangan hanya

sekedar menjadi diskursus akademik dan konsumsi elitis semata, akan tetapi kita juga harus mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari sebagai wujud pengejawantahan nilai-nilai pancasila.

"Pancasila harus menjadi sesuatu yang melahirkan pertemuan diantara kita, karena sifatnya tadi nilai-nilai yang mengikat kita dalam perbedaan, ia juga yang akan memberikan ruang pertemuan di tengah-tengah situasi sosial yg saat ini tersegragasi," pungkasnya.

Terakhir, Jimmy menyimpulkan pancasila tidak semata-mata menjadi simbol atau wacana, namun menjadi satu bagian dari misi ilahi yang dititipkan selama bertahun-tahun. Dan diskusi-diskusi semacam ini sangat dibutuhkan karena mampu menumbuhkan semangat untuk mendorong anak-anak bangsa dalam pengejawantahan pancasila



Pdt. JIMMY SORMIN, MA.

Sekretaris Eksekutif PGI Bidang KKC

"Pancasila harus menjadi sesuatu yang melahirkan pertemuan diantara kita, karena sifatnya tadi nilai-nilai yang mengikat kita dalam perbedaan, ia juga yang akan memberikan ruang pertemuan di tengah-tengah situasi sosial yg saat ini tersegragasi"

14 Juni Hari Donor Darah Sedunia

"Give blood and keep the world beating"



KEBUTUHAN DARAH NASIONAL MASIH KURANG 500 RIBU KANTONG

PKS Ajak Masyarakat Mendonorkan
Darah Untuk Membantu Sesama



● Stok darah PMI saat ini

64.049 kantong

● Standar WHO jumlah kebutuhan minimal darah di Indonesia per tahun

5.100.000 kantong

● Secara data, stok baru terpenuhi

4.600.000 kantong/tahun

● Sehingga masih kurang sekitar

500.000 kantong/tahun

● Kebutuhan kantong darah



Satu
Orang / **8** detik

10.800 orang/hari



Pakar Pengembangan Kota dan Daerah: Pindah Ibukota adalah Mimpi yang Dipaksa jadi Kenyataan

KUTIPAN

Jakarta (09/06) – Pakar Pengembangan Kota dan Daerah, Bambang Susanto Priyo Hadi yang hadir secara virtual dalam Focus Group Discussion diselenggarakan oleh Fraksi PKS DPR RI,

mengkritisi pemerintah terkait isu pemindahan ibukota negara ke Penajam Paser Utara dan menilai hal tersebut sebagai sebuah kesia-siaan dan tidak relevan.

Bambang mengatakan, masih ada beberapa masalah yang belum jelas dalam wacana pemindahan ibukota, termasuk masalah legalitas dan hukum.

“Bahkan sampai hari ini kita belum tau berapa hektar yang sebenarnya akan didelineasi dari kota itu. Ya, memang kita tau intinya kota Penajam Paser Utara hampir seluas enam ribu hektar dengan wilayah sekitar 42 ribu hektar. Tetapi itu hanya deliniasi mimpi. Dan untuk ibukota negara ini berbasis mimpi.” Tukasnya.

Dalam pemaparannya, Bambang menyebutkan beberapa contoh negara yang berhasil dan kurang berhasil dalam pemindahan ibukota negeranya.

“Contoh negara yang pernah melakukan pemindahan ibukota dan dikatakan gagal, yaitu negara bagian di India Utara, kota Chandigarh, kota dengan jalan yang besar tetapi sepi. Lalu juga Brasilia yang jaraknya 400 km menjauhi San Paulo. Betul-betul kota yang berada di hutan dan jauh sekali. Dan dapat kita katakan, gagal.” jelasnya.

Namun, menurut pakar infrastruktur ini, ada beberapa pemindahan ibukota di negara-negara yang berhasil contohnya Putrajaya, yang berjarak tidak

lebih dari 100 km dari Kuala Lumpur dan juga New Delhi. Bambang menambahkan, ada beberapa tolak ukur dalam menentukan faktor keberhasilan pemindahan ibukota negara.

“Pertama yang harus diperhatikan adalah daya dukung lahan. Apakah Penajam Paser Utara sudah cukup bagus? Kita mempunyai seorang doktor yang telah melakukan penelitian disana, dan hasilnya yaitu di Penajam Paser Utara adalah daerah yang sukar dalam air tanah dengan akuifer yang relatif tipis.” imbuhnya.

Selain itu, Bambang juga menilai di kota Penajam Paser Utara memiliki beberapa sesar atau patahan yang bisa berbahaya dan beresiko jika tidak memiliki dana dan teknologi yang mumpuni.

“Daya dukung menjadi sesuatu yang sangat penting. Kita juga perlu melihat bahwa jarak PPU relatif jauh dengan Balikpapan dan Samarinda. Jadi kita punya problem daya angkut dan daya dukung,” tuturnya.



Bambang Susanto Priyohadi , MPA

Pakar Pengembangan Kota dan Daerah

“Masih ada beberapa masalah yang belum jelas dalam wacana pemindahan ibukota, termasuk masalah legalitas dan hukum. Bahkan sampai hari ini kita belum tau berapa hektar yang sebenarnya akan didelineasi dari kota itu.”

Sebagai penutup, Bambang juga kembali mengingatkan untuk memperhatikan proses pemindahan ibukota dengan lebih baik. Lebih lanjut,

Bambang menganjurkan agar jarak pemindahan ibukota lama ke ibukota baru sebaiknya tidak terlalu jauh agar tidak sekedar mimpi yang dipaksakan untuk menjadi sebuah kenyataan.

FGD IKN FPKS DPR RI,

Faisal Basri: Ekonomi Rapuh dan Pandemi Sebabkan Pemindahan Ibukota **Tak Relevan**

KUTIPAN

Jakarta (9/06)—Faisal Basri selaku Pakar Ekonomi menjadi salah satu pembicara dalam FGD Pemindahan Ibukota Negara yang diselenggarakan oleh FPKS.

Faisal berpendapat bahwa untuk memindahkan Ibukota di kala pandemi saat ini, merupakan suatu hal yang tidak relevan.

Faisal mengatakan bahwa dalam masa pandemi ini, ada potensi Indonesia mengalami gelombang kedua, dengan fasilitas kesehatan yang masih kurang dan tingkat vaksinasi Indonesia saja relatif masih rendah, maka angka kematian tentu akan naik pula.

“Vaksinasi prioritas antara keberapa. Lebih penting membeli senjata 1.800 triliun itu ketimbang vaksinasi yang tidak seberapa.” Ujar Faisal.

Struktur ekonomi

Indonesia juga dianggap rapuh, dikarenakan indeks demokrasi

kita yang turun. Padahal menurut Faisal kemajuan demokrasi itu berhubungan positif dengan kemajuan ekonomi. Masyarakat harus mengubah paradigma bahwa politik dan ekonomi itu tidak dapat dipisahkan—demokrasi memengaruhi ekonomi.

“Kegiatan ekonomi di Indonesia makin tidak bermutu, mengandalkan otot bukan otak. Makanya oligarki semakin menguat. Untuk mengatasinya, harus transformasi. The only way untuk kita keluar dari middle-income trap adalah dengan transformasi dan pembangunan berkelanjutan.”

Selain ekonomi yang rapuh, pengeluaran Pemerintah Pusat naik terus, tidak peduli

adanya krisis. Sayangnya, transfer ke daerah relatif stagnan. Faisal mengatakan bahwa pembangunan kita sangat tidak inklusif dan adanya ketimpangan. Semakin parahnya lagi, solusinya malah membangun ibukota.

“Apakah benar pembangunan ekonomi lebih merata gara-gara ibukota diganti? Ya ndak benar. Sesat! Karena apa? Karena kalau kita lihat itu komitmen negara untuk mendorong penguatan daerah itu makin lama makin merosot di era Jokowi lagi-lagi.” Tuturnya.

FAISAL H. BASRI, S.E., MA.

Pakar Ekonomi

“Kegiatan ekonomi di Indonesia makin tidak bermutu, mengandalkan otot bukan otak. Makanya oligarki semakin menguat. Untuk mengatasinya, harus transformasi. The only way untuk kita keluar dari middle-income trap adalah dengan transformasi dan pembangunan berkelanjutan

Wacana Pemindahan Ibu Kota Negara

Sekretaris Fraksi PKS DPR: Lebih Baik Dibatalkan

KUTIPAN

Jakarta (09/06) – Sekretaris Fraksi PKS DPR RI, Ledia Hanifa Amaliah, menjadi salah satu pemateri dalam Focus Group Discussion (FGD) daring dengan tema “Ekonomi Belum Pulih: Masih Relevankah Pemindahan Ibukota Negara?”

yang diselenggarakan oleh Fraksi PKS DPR RI bersama lima pemateri lainnya, Jakarta, Rabu (09/06).

Adanya wacana yang digayangkan oleh pemerintah mengenai pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur tentunya memantik berbagai pandangan dari berbagai pihak. Menanggapi hal tersebut, Ledia menegaskan bahwa sudah saatnya untuk mulai mendiskusikan dan membahas wacana ini dengan lebih mendalam, kritis dan konstruktif sebagai bentuk partisipasi politik aktif dan bagian dari stakeholder negara.

Mengawali pemaparannya, Ledia menjelaskan bahwa wacana ini merupakan suatu isu strategis nasional yang sangat penting untuk dikaji lebih mendalam dari banyak

aspek.

“Sebagai bentuk partisipasi politik aktif dan bagian dari negara, kita harus mulai mendiskusikan dan mengkaji wacana ini secara lebih mendalam, kritis, komperhensif dan konstruktif untuk dapat melihat relevansi pemindahan ibu kota ini dalam keadaan kondisi negara yang sedang terpuruk, terlebih jika melihat implikasi dan kompleksitasnya yang sangat rumit mulai dari sumber dan skema pembiayaan dan juga legalitasnya yang masih belum jelas serta aspek-aspek lainnya seperti ekonomi, lingkungan dan sosial.” ujarnya.

Anggota Komisi X DPR RI ini lantas menyatakan ada beberapa pertanyaan yang harus bisa dijawab oleh pemerintah terkait isu ini yakni

mengenai alasan mendasar, skema pembiayaan, dan transparansi kebijakan.

“Ada beberapa pertanyaan

yang patut kita pertanyakan terkait relevansi wacana ini dalam kondisi negara yang tidak stabil seperti sekarang, pertama adalah mengenai alasan mendasar, rasional dan objektif dari politik kebijakan pemindahan ibu kota negara, jadi kita harapkan ada penjelasan yang bisa kita refleksikan pada tantangan kebangsaan yang sedang berlangsung. Yang kedua adalah mengenai sumber dan skema pembiayaan pemindahan ibu kota negara di tengah pandemi saat ini dengan pertumbuhan ekonomi yang minus, defisit APBN dan hutang yang semakin membengkak.

Ketiga mempertanyakan tentang transparansi dari kebijakan ini dikarenakan kita melihat bahwasannya ini terkesan sangat sentralistik dan miskin diskusi serta partisipasi publik secara luas, padahal ini menyangkut hajat hidup orang banyak” papar Ledia

Terakhir, Ledia mengingatkan bahwa Fraksi PKS tidak menghendaki adanya kebijakan yang akan



Hj. LEDIA HANIFA A, S.Si., M.Psi.T
Sekretaris Fraksi PKS DPR RI

“Fraksi PKS tidak menghendaki adanya kebijakan yang akan memperburuk kondisi negara yang sedang berjuang melawan pandemi dan keterpurukan ekonomi. Fraksi PKS juga tidak menghendaki adanya kebijakan yang sentralistik, tidak transparan, berbiaya tinggi, serta tidak realistis, sehingga dengan mengacu pada pertimbangan itu semua rencana pemindahan ibukota ini menurut Fraksi PKS lebih baik dibatalkan.”

memperburuk kondisi negara yang sedang berjuang melawan pandemi dan keterpurukan ekonomi. Fraksi PKS juga tidak menghendaki adanya kebijakan yang sentralistik, tidak transparan, berbiaya tinggi,

serta tidak realistis, sehingga dengan mengacu pada pertimbangan itu semua rencana pemindahan ibukota ini menurut Fraksi PKS lebih baik dibatalkan.

Kokohkan Kembali Pancasila dan Konstitusi

EVALUASI TWK BAGI SELURUH ASN

99 KUTIPAN

Kami menuntut Presiden untuk menginvestigasi masalah ini dan mengevaluasi Tes Wawasan Kebangsaan bagi seluruh pegawai negeri, tidak hanya di KPK, agar kembali pada upaya mengkokohkan Pancasila dan konstitusi. Bukan sebaliknya, memunculkan pertanyaan yang justru merusak tatanan nilai kebangsaan kita

Dr. H. JAZULI JUWAINI, MA

Ketua Fraksi PKS DPR RI



Kritik Posisi Wamenpan-RB, PKS Sarankan Presiden Lakukan Hal Ini

KUTIPAN

Politikus PKS itu justru mengusulkan kepada Presiden Jokowi hal yang jauh lebih penting dibandingkan harus menambah posisi jabatan Wamenpan-RB. Usulan itu terkait dengan perampingan lembaga.

Jakarta (05/06) — Anggota Komisi II Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Nasir Djamil melayangkan kritik terkait keputusan Presiden Jokowi yang menambah posisi jabatan baru yakni wakil menteri pendahayagunaan aparatur sipil negara dan reformasi birokrasi (Wamenpan-RB).

Menurut dia, saat ini tidak dibutuhkan posisi tersebut. Apalagi, kata dia, Tjahjo Kumolo sebagai Menpan-RB dinilai sudah sangat mumpuni dalam mengelola di kementerian tersebut.

"Justru kalau Kemenpan-RB ada posisi Wamen, saya khawatir Wamennya tidak ada kerja alias hanya menghabisi anggaran negara saja," kata Nasir saat dihubungi, Jumat (4/6/2021).

Politikus PKS itu justru mengusulkan kepada Presiden Jokowi hal yang jauh lebih penting dibandingkan harus menambah posisi jabatan Wamenpan-RB. Usulan itu terkait dengan perampingan lembaga.

"Justru yang harus dilakukan presiden adalah menindakkanjuti perampingan struktur dan melikuidasi lembaga-lembaga negara penunjang yang tak memberikan dampak dalam upaya mewujudkan demokratisasi dan peningkatan taraf hidup rakyat," ujar dia.

Diberitakan sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi menambah jabatan Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Wamenpan-RB). Hal

itu tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 47 Tahun 2021 tentang Kemenpan-RB).

Dalam beleid yang ditandatangani pada 19 Mei 2021 itu ada klausul baru yang ditambahkan yakni posisi Wamenpan-RB.

"Dalam memimpin Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri dapat dibantu oleh Wakil Menteri sesuai dengan penunjukan Presiden," bunyi isi Pasal 2 Perpres 47/2021 sebagaimana dilihat pada Jumat (4/6/2021).



H.M. NASIR DJAMIL, M.Si

Dakil Nangroe Aceh Darussalam II

"Saat ini tidak dibutuhkan posisi tersebut. Apalagi, Tjahjo Kumolo sebagai Menpan-RB dinilai sudah sangat mumpuni dalam mengelola di kementerian tersebut. Justru kalau Kemenpan-RB ada posisi Wamen, saya khawatir Wamennya tidak ada kerja alias hanya menghabisi anggaran negara saja"



PKS soal Analisis TWK KPK: Besar Kemungkinan Terkait 2024

KUTIPAN

Jakarta (09/06) — Mantan Kabiro Humas KPK Febri Diansyah mengaitkan polemik tes wawasan kebangsaan (TWK) yang berujung pada 'penyingkiran' sejumlah pegawai KPK dengan kontestasi politik 2024. PKS menilai analisis Febri ada benarnya.

"Semua analisa punya kemungkinan benar. Besar kemungkinannya, arahnya jelas," ujar Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera, saat ditanya soal analisis Febri tersebut, Senin (7/6/2021).

Dia menilai KPK yang tidak independen bisa menjadi alat untuk menjatuhkan salah satu kandidat pada Pemilu 2024. Menurutnya, hal itu berpotensi membuat Pemilu 2024 berjalan tidak adil.

"KPK yang tidak independen dapat menjadi alat yang efektif untuk menjatuhkan satu atau lebih kandidat," kata Mardani.

"Kontestasi Pemilu

menjadi tidak fair lagi jika itu terjadi," sambungnya.

Dia berpendapat 'penyingkiran' 51 pegawai KPK yang tak lolos TWK perlu dilawan. Mardani khawatir penggunaan TWK untuk 'menyingkirkan' pegawai dicontoh lembaga lain.

"Apa pun, 'penyingkiran' 75 yang pegawai KPK adalah langkah yang harus dilawan karena bisa jadi preseden dilakukan pada lembaga atau proses di tempat lain," tuturnya.



Dr. H. MARDANI, M.Eng

Anggota Komisi II DPR RI

"KPK yang tidak independen bisa menjadi alat untuk menjatuhkan salah satu kandidat pada Pemilu 2024. hal itu berpotensi membuat Pemilu 2024 berjalan tidak adil. KPK yang tidak independen dapat menjadi alat yang efektif untuk menjatuhkan satu atau lebih kandidat, Kontestasi Pemilu menjadi tidak fair lagi jika itu terjadi,"

Pembangunan Gedung Pelayanan BPKB Polda Kalsel, Aleg PKS: Ini Memudahkan Pelayanan Masyarakat

KUTIPAN

Jakarta (04/06) -- Anggota Komisi III Fraksi PKS, Habib Aboe, mengapresiasi ground breaking pembangunan gedung Pelayanan BPKB Polda Kalsel. Penambahan sarana ini dituju untuk menguatkan pelayanan masyarakat.

Tentu, pelayanan tersebut sangat membutuhkan masyarakat. Karena pada unit penerbitan BPKB ada 3 pelatihan utama yang diberikan. Pada penerbitan BPKB baru, layanan ini dikhususkan untuk pemilih kendaraan baru. Penerbitan BPKB memindahtangankan kepemilikan yakni layanan perubahan data BPKB atas dasar mutasi kendaraan bermotor keluar wilayah dan layanan ganti Nopol Rubentina (Rubah Bentuk Ganti Warna).

"Saya juga mengapresiasi fasilitas yang selama ini

tersedia di unit layanan BPKB Polda Kalsel karena sudah mengikuti standar dari Kemenpan RB. Apalagi saya mendengar layanan disini sudah mendapatkan predikat WBK (Wilayah Bebas Korupsi)," ujar Anggota Dapil Kalsel 1, Habib Aboe.

Habib Aboe memberi dukungan penuh atas adanya inovasi yang dilakukan pada unit layanan BPKB Polda Kalsel, yang bertujuan untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat saat mengakses layanan.

"Inovasi lain yang saya

denar, layanan di sini sudah menggunakan mesin antrian fifo agar pengguna layanan bisa mendaftar di rumah menggunakan aplikasi Ditlantas Mobile yang dapat diunduh lewat smartphone, jadi ngantrinya cukup dari rumah," tutur Sekretaris Jenderal DPP PKS.

Inovasi lainnya yang bagus dan memudahkan yakni Delivery BPKB, mendapat apresiasi dari Habib, karena Polda Kalsel sendiri yang akan mengirimkan BPKB sampai ke alamat pengguna layanan jika pengguna layanan tidak sempat mengambil BPKB karena kesibukan lain atau adanya kesalahan pada janji layanan di unit layanan BPKB.



HABIB ABOE BAKAR ALHABSYI

Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Kalimantan Selatan I

"Inovasi lain yang saya dengar, layanan di sini sudah menggunakan mesin antrian fifo agar pengguna layanan bisa mendaftar di rumah menggunakan aplikasi Ditlantas Mobile yang dapat diunduh lewat smartphone, jadi ngantrinya cukup dari rumah"

Aleg PKS Soroti Sejumlah Hal dalam Raker dengan Kemenkumham

KUTIPAN

Jakarta (09/06) — Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PKS, Adang Daradjatun menyoroti sejumlah hal penting dari Kementerian Hukum dan HAM.

Hal demikian disampaikan dalam Rapat Kerja bersama mitra kerja yang dilaksanakan di Komisi III DPR RI, Rabu (9/6). Sekurangnya ada 4 (empat) hal yang diberikan catatan oleh legislator FPKS ini.

Pertama, adalah mengenai pentingnya kesamaan pandangan antara DPR dan pemerintah dalam menyelesaikan PR legislasi yang dihadapi.

“Perlu penyesuaian pandangan untuk menyelesaikan undang-undang. Komisi III akan bekerjasama atau berkoordinasi dengan Kementerian/Lembaga terkait sehingga penyelesaian undang-undang tersebut dapat diselesaikan dengan baik”, pungkasnya.

Hal ini berkaitan dengan akan dibahasnya RUU KUHP yang mendapat perhatian besar dari masyarakat.

Kedua, adalah menyangkut permasalahan keimigrasian. “Kemudian menyangkut masalah keimigrasian, khususnya tentang WNA yang menjadi perhatian masyarakat secara luas, terutama pengamanan pelabuhan udara dan laut, khususnya yang di daerah terpencil atau disebut pelabuhan ‘tikus’, ini harus mendapat perhatian imigrasi”, jelas pria kelahiran Bogor ini.

Catatan ini menyusul merebaknya WNA masuk ke Indonesia ditengah pandemi COVID-19.

Selanjutnya adalah mengenai kondisi di lapas (lembaga pemsarakatan). Mantan Wakapolri ini mewanti-wanti kepada KemenkumHAM dan jajarannya agar melakukan tindakan preemtif dalam pengamanan lapas.

“Adanya beberapa hal yang

diperoleh secara ilegal (di lapas), yaitu sagem dan hp (senjata tajam/handphone) yang jumlahnya banyak. Tolong lebih ditingkatkan dan bekerjasama dengan kepolisian didalam razia-razia yang terus dilakukan. Kegiatan razia yang berlanjut dan secara tiba tiba akan memberikan efek pencegahan atas segala bentuk kegiatan ilegal didalam lembaga pemsarakatan”, terang salah satu tokoh penting reformasi Polri ini.

Sebagai pamungkas, Adang juga tidak lupa mengapresiasi KemenkumHAM karena berhasil meraih predikat WBK (Wilayah Bebas dari Korupsi) dan WBBM (Wilayah Birokrasi Bersih Melayani).

“Jaga terus WBK WBBM yang sudah dilaksanakan dengan baik dalam pembangunan sumber daya manusia (SDM)”, tutupnya.



Drs. H. ADANG DARADJATUN

Anggota Komisi III DPR RI

“Perlu penyesuaian pandangan untuk menyelesaikan undang-undang. Komisi III akan bekerjasama atau berkoordinasi dengan Kementerian/Lembaga terkait sehingga penyelesaian undang-undang tersebut dapat diselesaikan dengan baik”,

- Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menuliskan bahwa luas lautan Indonesia sekitar 3,25 juta km² dan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) seluas 2,55 juta km². Luasnya lautan Indonesia ini melebihi luas daratan yakni 2,01 juta kilometer persegi.



! Minyak dan Gas

Pengeboran dan pencairan MIGAS dapat merusak lingkungan laut. Perusahaan melakukan kelalaian sehingga minyak tumpah ke laut dan merusak.

! Rusaknya Hutan Mangrove

Luas mangrove di Indonesia mencapai 3,49 Juta Ha, namun 52% atau 1,82 juta Ha dalam kondisi rusak

! Pemanasan Global

Sekitar 80 persen CO₂ yang diproduksi manusia diserap lautan dan membuatnya panas. Perairan yang hangat dapat mempengaruhi semua aspek di laut, mulai dari pemutihan karang hingga pola migrasi ikan.

! Masalah Sampah

Indonesia salah satu negara penyumbang sampah terbesar di laut. Sampah yang masuk ke laut umumnya mengandung banyak plastik dan logam yang mengalami proses pelapukan dan penguraian yang cukup lama yaitu 50 – 400 tahun.

! Destructive Fishing

Penangkapan ikan dengan cara merusak. Cara yang sering dipakai yaitu menggunakan bahan yang berbahaya seperti portas dan sianida.

! Perburuan Hiu

Berburu hiu jenis apapun untuk diambil siripnya dan kemudian dijual.

! Ilegal Fishing

Penangkapan atau mencuri ikan secara ilegal (melanggar hukum) marak terjadi di wilayah kelautan Indonesia.

ANCAMAN UNTUK LAUT INDONESIA

8 Juni 2021 Hari Laut Sedunia (World Ocean Day)

PKS: Pemerintah Harus Serius Dalam Melindungi dan Melestarikan Laut Dari Kerusakan

Aleg PKS: Pembangunan Lingkungan Hidup Meningkat, Tapi Sampah Belum Terkendali

KUTIPAN

Jakarta (11/06) — Anggota DPR RI Komisi IV dari Fraksi PKS, Andi Akmal Pasluddin, mengapresiasi kinerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada tahun 2020

berkaitan dengan capaian pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan mengalami peningkatan cukup baik pada Rapat Kerja Komisi IV DPR dengan KLHK.

Data yang diterima menunjukkan, indeks kualitas lingkungan hidup yang meningkat dari 66,55 menjadi 70,27, Indeks kualitas air yang meningkat dari 52,62 menjadi 53,53, rehabilitasi DAS, dan penurunan emisi Emisi Gas Rumah Kaca (GRK).

"Saya berharap, kenaikan peningkatan capaian pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan memang betul-betul karena kinerja, bukan akibat menurunnya aktivitas industri atau pabrik maupun arus transportasi yang berkurang yang merupakan dampak dari

pandemi. Memang perlu pembuktian yang menyeluruh peningkatan capaian pembangunan kualitas lingkungan hidup, agar dikemudian hari kita tidak terjebak prestasi semu, sehingga di tahun mendatang ketika pandemi usai, lingkungan dan kehutanan kembali terpuruk kualitasnya", tutur Akmal.

Politisi PKS ini mengingatkan kepada pemerintah, bersamaan dengan meningkatnya kualitas air dan menurunnya emisi gas, persoalan sampah tahun 2020 menjadi peringatan keras bagi negara betapa seriusnya untuk segera di tangani.

"Fraksi PKS mencatat jumlah timbulan sampah selama tahun 2020 mencapai 67,8 juta ton. Sementara itu jumlah timbulan sampah yang terkelola baru mencapai 35,9

juta ton, artinya masih terdapat sampah yang tidak terkelola mencapai 31,9 juta ton," papar Akmal.

"Dengan tingginya jumlah sampah Nasional yang tidak terkelola, saya meminta dengan keras agar pemerintah harus segera menata ulang perizinan impor sampah. Jangan ada lagi regulasi yang mengeluarkan izin impor sampah dalam beberapa tahun kedepan sampai kita benar-benar yakin negara ini mampu menangani sampah dalam negeri", imbuhnya.

Legislator Asal Sulawesi Selatan II ini mengibaratkan, tahun 2021 ini negara Indonesia sudah dapat dikatakan darurat Sampah. Pemerintah mesti segera merumuskan strategi out of the box untuk mengatasi masalah sampah.

"Strategi dengan pendekatan teknologi atau pemberdayaan masyarakat mesti dapat di rumuskan sehingga memberi hasil terbaik sehingga tidak ada ancaman kerusakan lingkungan akibat sampah di tahun-tahun mendatang." pungkaskannya Akmal mengutarakan,



Dr. H. ANDI AKMAL PASLUDDIN, S.P.,M.M
Anggota Komisi IV DPR RI

"Saya berharap, pemerintah sangat serius mengendalikan sampah yang terus berdatangan setiap hari dari berbagai aktivitas manusia. Saya sangat mendukung KLHK untuk melakukan apapun kegiatan yang berguna dalam mengendalikan sampah baik secara teknis, Cara, SDM hingga teknologi"

bahwa catatan yang ia kumpulkan terkait sampah ini menunjukkan, bahwa setiap tahun lebih dari 30 juta ton sampah tidak terkelola, artinya lebih dari 150 juta ton timbulan sampah tidak terkelola dalam

kurun waktu 5 tahun dan hal tersebut akan menciptakan bencana lingkungan bagi air, udara, tanah, serta bencana sosial dan ekonomi.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id

Anggota FPKS: Kenaikan Anggaran KKP untuk Dongkrak Nilai Tukar dan Kesejahteraan Nelayan

KUTIPAN

Jakarta (10/06) — Anggota Komisi IV DPR dari Fraksi PKS, Hermanto mengungkapkan, Fraksi PKS mendorong kenaikan pagu indikatif Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tahun 2022 yang awalnya hanya sebesar Rp 6,122 triliun menjadi Rp 14 triliun.

Dengan kenaikan anggaran tersebut, kata Hermanto, diharapkan bisa mendongkrak nilai tukar dan kesejahteraan nelayan.

"Dengan kenaikan anggaran tersebut, Fraksi PKS berharap KKP dapat mengeluarkan kebijakan yang secara komprehensif mampu mendorong peningkatan kesejahteraan nelayan, pembudidaya ikan dan petambak garam," papar Hermanto dalam keterangan tertulis kepada wartawan, Rabu (09/06/2021).

Dengan peningkatan anggaran tersebut, Hermanto juga meminta (KKP) mematok

target nilai ekspor perikanan dalam waktu dekat bisa mengalahkan Vietnam dan Thailand.

"Apresiasi untuk KKP atas kenaikan ekspor perikanan di kuartal pertama tahun 2021 sebesar 4,5% atau senilai 1,75 miliar dollar AS, setara 25 triliun rupiah," ujarnya.

Lebih jauh Hermanto menyebutkan, Data BPS tahun 2020 mengungkapkan bahwa sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan telah menyumbang 14,2 persen terhadap struktur produk domestik bruto (PDB) nasional dengan nilai Rp 2.115 triliun atau berada di urutan kedua setelah industri pengolahan

(20,6 persen senilai Rp 3.086 triliun).

"Pada tahun 2021 sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan juga tercatat menjadi satu-satunya lapangan usaha yang tumbuh positif saat PDB nasional berkontraksi 2,07 persen," papar legislator dari FPKS DPR ini.

Namun jika data tersebut dikerucutkan lagi, tambahnya, kontribusi perikanan masih berkisar antara 1-3% dari PDB nasional.

"Fraksi PKS mendorong peningkatan anggaran di atas agar KKP mampu meningkatkan kontribusi terhadap PDB tersebut," tandas Hermanto.

"Fraksi PKS mengharapkan kenaikan pagu anggaran tersebut dapat menjadi booster bagi KKP untuk terus meningkatkan kuantitas, kualitas dan nilai ekspor," pungkas legislator dari Dapil Sumbar I ini.



Dr. HERMANTO, S.E., M.M.
Anggota Komisi IV DPR RI

"Dengan kenaikan anggaran tersebut, Fraksi PKS berharap KKP dapat mengeluarkan kebijakan yang secara komprehensif mampu mendorong peningkatan kesejahteraan nelayan, pembudidaya ikan dan petambak garam"

Legislator PKS Apresiasi Kenaikan Anggaran KKP Tahun 2022

KUTIPAN

Jakarta (09/06) — Legislator PKS, Slamet menyambut baik usulan kenaikan pagu anggaran KKP tahun 2022 yang awalnya hanya 6,1 T menjadi 14,1 T atau ada penambahan sebesar 8 T.

Menurut Anggota Komisi IV DPR RI asal Fraksi PKS tersebut sektor perikanan dapat menjadi tulang punggung perekonomian nasional jika dikelola secara maksimal.

Menurutnya, berdasarkan data BPS tahun 2020 mengungkapkan bahwa sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan telah menyumbang 14,2 persen terhadap struktur PDB nasional dengan nilai Rp2.115 triliun atau berada di urutan kedua setelah industri pengolahan (20,6 persen senilai Rp3.086 triliun).

"Bahkan Pada tahun ini juga sektor pertanian termasuk perikanan tercatat menjadi satu-satunya lapangan usaha yang tumbuh positif saat PDB nasional berkontraksi 2,07

persen. Sektor pertanian perikanan dan kehutanan tumbuh 1,75 persen dibandingkan sektor pertambangan minus 1,95 persen, industri pengolahan minus 2,93 persen, konstruksi minus 3,26 persen, perdagangan dan reparasi minus 3,72 persen, serta sektor lainnya minus 1,97 persen," urai Slamet.

Namun, imbuhnya, data tersebut jika kita kerucutkan lagi kontribusi sektor perikanan masih berkisar antara 1-3% dari PDB nasional artinya KKP masih memiliki tugas berat untuk mendorong peningkatan kontribusi tersebut.

Oleh karena itu, kata politisi PKS ini, sudah sepantasnya KKP memperoleh

tambahan anggaran untuk memacu pertumbuhan ekonomi sektor perikanan yang pada akhirnya akan mampu meningkatkan kesejahteraan nelayan pembudidaya ikan dan petambak garam.

Dalam kesempatan Rapat kerja tersebut, Slamet juga mengingatkan KKP agar memaksimalkan penyerapan anggaran dengan banyak membuat program yang langsung menstimulus masyarakat kegiatan nelayan, pembudidaya ikan dan petambak garam.

"Mungkin jenisnya bisa seperti bantuan langsung tunai apalagi ditengah upaya pemulihan ekonomi pasca pandemic Covid-19 seperti saat ini tentu saja dengan model bantuan tersebut mampu mendorong peningkatan aktivitas serta pemulihan ekonomi masyarakat nelayan," tutup Slamet.



dr. H. SLAMET
Anggota Komisi IV DPR RI



Sudah sepantasnya KKP memperoleh tambahan anggaran untuk memacu pertumbuhan ekonomi sektor perikanan yang pada akhirnya akan mampu meningkatkan kesejahteraan nelayan pembudidaya ikan dan petambak garam.

Anggota FPKS Tagih Janji Mentan Soal Komitmen Pengembangan Kedelai Lokal

KUTIPAN

Jakarta (10/06) — Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PKS, Johan Rosihan secara tegas menagih janji Menteri Pertanian (Mentan) mengenai persoalan kedelai lokal yang produksi dan mutunya masih rendah, sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan pengrajin tahu dan tempe.

"Selama ini dipasok dari kedelai impor, yang terkadang fluktuasi harganya sangat merugikan UMKM kita bahkan mereka telah mengancam melakukan mogok sebagai protes terhadap tingginya harga kedelai," ucap Johan.

Mentan pernah berjanji pada awal 2021 lalu akan menuntaskan persoalan kedelai ini dalam dua kali masa tanam namun hingga kini belum ada sesuatu yang mengembirakan bagi kedelai lokal kita.

Hal tersebut diungkapkan Johan pada saat mengikuti

Rapat Kerja Bersama Menteri Pertanian dan jajarannya di Gedung Parlemen, Senayan Jakarta (09/06/2021).

Politisi PKS ini bahkan meminta Mentan bisa membuat simulasi anggaran berdasarkan data yang ril.

"Agar kita tidak lagi bergantung dengan impor kedelai selama ini, berapa kebutuhan anggaran agar kita bisa produksi kedelai sesuai kebutuhan nasional supaya kita tidak merancang untuk impor terus," ucap Johan.

Jika pemerintah membuat

target produksi kedelai berkisar 300.000 ton per tahun, sementara di sisi lain kebutuhan kedelai nasional mencapai sekitar 3 juta ton.

"Ini artinya kita terus membuat rencana untuk melakukan impor dan tidak punya spirit melakukan swasembada kedelai," pungkas Johan.

Legislator dari dapil NTB 1 Pulau Sumbawa ini menyampaikan bahwa dirinya selaku wakil masyarakat Sumbawa telah melakukan tanam perdana Demfarm di Sumbawa, dari sana ia melihat hasil pengembangan beberapa jenis varietas kedelai oleh Balitbangtan BPTP NTB yang produksinya bisa mencapai 3,5 ton per hektar.

"Maka ini adalah potensi menuju swasembada kedelai jika pemerintah serius ingin menjadikan kedelai sebagai komoditi pangan strategis di tanah air," ujar Johan.

Wakil rakyat yang berasal dari Pulau Sumbawa ini juga mengusulkan agar Balitbang segera melakukan riset peningkatan produksi dan pengembangan kedelai lokal yang memiliki standar mutu untuk industri tahu tempe.

"Saya minta pemerintah segera melakukan Pengembangan varietas Unggul tanaman kedelai yang cocok dengan kondisi lahan dan iklim di Indonesia serta melakukan Perakitan teknologi budidaya, panen dan pascapanen dari tanaman kedelai yang meng-

**H. JOHAN ROSIHAN, S.T**

Anggota Komisi IV DPR RI

“Saya minta pemerintah segera melakukan Pengembangan varietas Unggul tanaman kedelai yang cocok dengan kondisi lahan dan iklim di Indonesia serta melakukan Perakitan teknologi budidaya, panen dan pascapanen dari tanaman kedelai yang menguntungkan petani dan pengrajin tahu tempe

untungkan petani dan pengrajin tahu tempe”, papar Johan.

Johan menyesalkan rendahnya serapan anggaran Kementan pada semester 1 dari tahun 2021 ini padahal petani dan peternak sangat membutuhkan support anggaran APBN demi kelancaran usaha taninya. Apa yang menjadi kesulitan Kementan di lapangan untuk realisasi anggaran padahal

realitasnya semua petani saat ini butuh benih dan bibit berkualitas, butuh sarana prasarana mekanisasi Pertanian, perlu pupuk dan sebagainya, tandas Johan. Saya berharap Mentan berkomitmen menunaikan janjinya untuk selalu melindungi petani dan menghentikan impor demi kedaulatan pangan nasional, tutup Johan.

Anggota Komisi IV FPKS: Indonesia Darurat Sampah

KUTIPAN

Saadiah prihatin, karena angka timbunan sampah selama tahun 2020 jumlahnya menggunung sementara yang terkelolah dan tertangani masih separuhnya. “Indonesia darurat sampah. Jumlah timbunan tahun 2020 mencapai 67,8 juta ton. Jumlah timbunan sampah yang terkelolah baru mencapai 35,9 juta ton. artinya masih terdapat sampah yang tidak terkelolah mencapai 31,9 juta ton”, Saadiah memaparkan data.

Jakarta (12/06) — Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PKS, Saadiah Uluputty meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan agar serius menangani masalah sampah di Indonesia.

Permintaan ini disampaikan Saadiah dalam rapat dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Kompleks Senayan Jakarta, Jumat (10/06).

Saadiah prihatin, karena angka timbunan sampah selama tahun 2020 jumlahnya menggunung sementara yang terkelolah dan tertangani masih separuhnya.

“Indonesia darurat sampah. Jumlah timbunan tahun 2020 mencapai 67,8 juta ton. Jumlah timbunan sampah yang terkelolah baru mencapai 35,9 juta ton. artinya masih terdapat sampah yang tidak terkelolah mencapai 31,9 juta ton”, Saadiah memaparkan data.

Angka 53% sampai yang baru terkelolah cukup memprihatinkan. Menurutnya, setiap tahun laju penimbunan sampah berbagai jenisnya terus menggunung.

“Jika setiap tahun hanya 53% yang terkelolah, maka laju tumpukan sampah menjadi

masalah sangat serius bagi lingkungan dan kesehatan masyarakat”, jelas Aleg Perempuan Fraksi PKS asal Dapil Maluku ini.

Perlu dicatat bahwa setiap tahun lebih dari 30 juta ton sampah tidak terkelolah, artinya lebih dari 150 juta ton timbunan sampah tidak terkelolah dalam kurun waktu 5 tahun dan hal tersebut.

“Akan menciptakan bencana lingkungan bagi air, udara, tanah, serta bencana sosial dan ekonomi”, Saadiah mengingatkan.

Ia menandakan, sampah menjadi ancaman utama dan membahayakan karena menjadi sumber pencemaran lingkungan, termasuk pencemaran maupun tanah .

“Pemerintah lewat Kementerian Lingkungan Hidup harus membuat strategi out of the box untuk mengatasi darurat sampah ini”, minta Saadiah.

Strategi ini katanya baik dengan pendekatan teknologi maupun lewat kegiatan pemberdayaan melibatkan masyarakat.

“Kami mendorong KLHK untuk mendukung startup yang bergerak di bidang pengelolaan sampah ataupun Bank Sampah berbasis IT (Informasi Teknologi)”, usulnya.



SAADIAH ULUPUTTY, S.T

Anggota Komisi IV DPR RI

“Perlu dicatat bahwa setiap tahun lebih dari 30 juta ton sampah tidak terkelolah, artinya lebih dari 150 juta ton timbunan sampah tidak terkelolah dalam kurun waktu 5 tahun dan hal tersebut. Akan menciptakan bencana lingkungan bagi air, udara, tanah, serta bencana sosial dan ekonomi”

CATATAN VETERAN INDONESIA

Pejuang kemerdekaan yang belum “sejahtera”



PKS : Pemerintah Harus Memperhatikan Kesejahteraan Veteran Yang Telah Berjasa Besar

Tunjangan Veteran di berbagai negara :



Malaysia

RM 450.00 (1.400.000)

Bahkan bisa lebih apabila veteran tersebut sudah mempunyai anak yang sekolah dan kebutuhan lainnya.



Amerika Serikat

\$407 (5.000.000)

Apabila veteran hidup sendiri dan bisa berkali lipat jika berkeluarga.



Australia

Uang+Fasilitas

Memberikan tunjangan dalam bentuk uang dan juga fasilitas akses gratis pendidikan, kesehatan dan pinjaman di bank untuk para keluarga veteran.



Indonesia

1.4 – 1.6 juta

tanpa ada tambahan akses fasilitas gratis



Anggota FPKS Kritisi Penambahan Hutang Kemenhub

KUTIPAN

Jakarta (09/06) — Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi PKS, Sigit Sosiantomo, mengkritisi peningkatan hutang Kementerian Perhubungan (Kemenhub) di tahun 2022 yang mencapai Rp 8,2 Triliun yang terdiri dari Pinjaman Luar Negeri (PLN) dan Rp7 Triliun untuk Surat Berharga Syariah Negara (SBSN).

Sigit yang juga Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI itu mengatakan peningkatan hutang Kemenhub harus dilakukan secara hati-hati dan hanya untuk belanja produktif.

"Ada peningkatan hutang di Kemenhub di tahun 2022. Jika tahun 2021 jumlah pinjaman luar negeri Kemenhub hanya Rp807 miliar, tahun 2022 meningkat menjadi Rp1, 2 Triliun. Ini akan jadi beban APBN dikemudian hari jika tidak dikelola dengan baik," Kata Sigit.

Selain PLN, hutang melalui SBSN juga mengalami peningkatan cukup signifikan. Jika tahun 2021 SBSN Kemenhub sebesar Rp5, 66

Triliun, tahun 2022 melonjak menjadi Rp7 Triliun.

Meningkatnya jumlah hutang Kemenhub, kata Sigit, harus diwaspadai terlebih melihat realisasi serapan pinjaman Kemenhub selama ini yang cenderung rendah. Jika tidak dikelola dengan baik, hutang tersebut akan menjadi beban dikemudian hari.

"Berkaca dari serapan anggaran tahun-tahun sebelumnya, serapan anggaran pinjaman termasuk yang rendah. Tahun 2020, salah satu penyebab rendahnya serapan anggaran karena sejumlah proyek yang dibiayai SBSN. Tahun 2021 ini, serapan hingga

Juni juga masih rendah kisaran 29% karena ada tambahan PLN yang belum terserap. Kalau tidak dikelola dengan baik dan tidak terserap, hutang ini akan jadi beban. Apalagi kalau untuk membiayai proyek yang tidak produktif. Jadi, Kemenhub harus extra hati-hati dalam mengelola hutangnya." Kata Sigit.

Hutang baik melalui PLN maupun SBSN, kata Sigit, lazim dilakukan pemerintah untuk menutupi defisit anggaran khususnya dalam pembiayaan pembangunan infrastruktur. Namun, kata Sigit, seharusnya pemerintah tidak selalu bertopang pada hutang untuk menutupi defisit. Pemerintah seharusnya mendorong pendanaan kreatif non APBN dan meningkatkan pendapatan PNPB-nya.

"Seharusnya kalau PNPB nya tinggi, baglock anggaran bisa ditutupi sebagian dari PNPB. Tapi, sudah beberapa tahun ini pendapatan PNPB meleset dari target. Sementara pemerintah sangat berambisi membangun infrastruktur tapi uangnya tidak ada. Akhirnya proyek tertunda dan tidak bisa dimanfaatkan karena belum selesai. Hal-hal seperti ini yang harus dibenahi," Kata Sigit.



Ir. H. SIGIT SOSIANTOMO
Anggota Komisi V DPR RI

"Berkaca dari serapan anggaran tahun-tahun sebelumnya, serapan anggaran pinjaman termasuk yang rendah. Tahun 2020, salah satu penyebab rendahnya serapan anggaran karena sejumlah proyek yang dibiayai SBSN. Tahun 2021 ini, serapan hingga Juni juga masih rendah kisaran 29% karena ada tambahan PLN yang belum terserap. Kalau tidak dikelola dengan baik dan tidak terserap, hutang ini akan jadi beban. Apalagi kalau untuk membiayai proyek yang tidak produktif. Jadi, Kemenhub harus extra hati-hati dalam mengelola hutangnya"

Aleg PKS : Pindah Ibu Kota Tak Relevan Sebab APBN Negara terus Menurun

KUTIPAN

Jakarta (09/06) --- Anggota Komisi V Fraksi PKS DPR RI, Suryadi Jaya Purnama menanggapi rencana pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur tidak relevan

sebab saat ini APBN negara menurun serta makro mikro Indonesia melemah.

Hal tersebut disampaikan Suryadi dalam acara Focus Group Discussion yang diselenggarakan oleh Fraksi PKS DPR RI dengan Tema "Ekonomi Belum Pulih, Relevankah Pemindahan Ibu Kota?", pada Rabu, (09/06/2021).

"Membahas dari perspektif DPR dalam merumuskan kebijakan-kebijakan strategis, baik dalam proses legislasi anggaran dan juga kebijakan strategis lainnya kami ingin menyampaikan dua hal, pertama kerangka umum pengambilan kebijakan strategis, begitupun kebijakan publik mengelola negara tidak lepas dari dua hal yaitu prosedur, dan subtansinya, dua

hal ini tidak bisa dipisahkan karena mengelola negara ini harus legal selain itu subtansinya juga harus bisa dipertanggungjawabkan" Ucap Suryadi.

Anggota Komisi V DPR RI ini menambahkan karena menyangkut ibu kota suatu yang strategis dalam kehidupan kita berbangsa bernegara, ini bukan saha agenda pemerintah tetapi agenda negara karena judulnya adalah ibu kota negara, maka seharusnya tidak hanya bicara legalitas tetapi juga legitimasi, Ibu Kita kita mempunyai historis dengan berbagai kenangan masa-masa perjuangan, Jakarta ini menjadi simbol Ibu kota, kita harus bicarakan kepada tokoh-tokoh nusantara seperti sultan dan keraton.

"Subtansi pemilihan ibu kota dilihat dari aspek Mikro Ibu

Kota kita saat ini, muncul pertanyaan apa masalah DKI saat ini sehingga kita harus pindah, dengan harapan begitu sampai pemerintah membuat kebijakan Pemindahan Ibu Kota ini menjadi solusi masalah ekonomi secara keseluruhan"

Suryadi melanjutkan Aspek nasional punya masalah kesenjangan, apakah masalah memindahkan ibu kota bisa menjadi beban baru, ini yang harus kita dalam. Jakarta sudah dirancang dengan pertahanan, jika pindah harus dikaji, belum lagi daya dukung lingkungan Aspek Geologi di Ibu Kota seharusnya ini hal yang perlu kita lihat, oleh karena itu saya sangat mendukung dan apresiasi kalau diskusi ini kita bahas dari berbagai Aspek problem Ekonomi yang sedang dihadapi baik dari pemerintah, DPR, pengamat ekonomi sepakat kalau kita ambil tema dari ekonomi kita ini belum pulih.

"Sebelum pandemi pun ekonomi masih melambat misal dari hutang kita 6400T lebih bahkan BUMN mencapai 52.8M US, dan beban apbn penurunan dari 2021 menuju 2022. tentunya masalah-masalah



H. SURYADI JAYA PURNAMA, S.T

Anggota Komisi V DPR RI

"Subtansi pemilihan ibu kota dilihat dari aspek Mikro Ibu Kota kita saat ini, muncul pertanyaan apa masalah DKI saat ini sehingga kita harus pindah, dengan harapan begitu sampai pemerintah membuat kebijakan Pemindahan Ibu Kota ini menjadi solusi masalah ekonomi secara keseluruhan"

ekonomi ini kita harap bisa terselesaikan, asumsi dengan berbagai kajian yang dilakukan pemindahan ibu kota ini bukan solusi, melainkan menjadi beban, beban untuk apbn karna

dibutuhkan anggaran 480T, belum lagi implikasinya, begitu beban untuk pemerintah dan pihak terkait" Tutur Suryadi
Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id

Aleg PKS Dorong Target Output BPSDM Kementerian PUPR Harus Utamakan Kualitas

KUTIPAN

Jakarta (08/06) — Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi PKS, Toriq Hidayat menyatakan kepada Kepala Badan Pembangunan Sumber daya Manusia (BPSDM) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat bahwa ia tidak ingin Target Output BPSDM tahun 2022 hanya bersifat kuantitas.

“Kedepannya target Output BPSDM harus mengutamakan kualitas, bukan hanya kuantitas. Ini agar sesuai dengan Tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2022, yaitu: Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural dengan 7 Prioritas Nasional (PN),” kata politisi PKS ini.

Pernyataan tersebut disampaikan Toriq saat menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi V DPR RI dengan Sekjen, Irjen, Kepala BPSDM dan Kepala BPIW Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI di

Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (07/06/2021) dengan agenda Evaluasi Pelaksanaan APBN TA 2021 dan membahas alokasi Pagu Indikatif TA 2022.

“Kita ketahui bahwa PN 3 adalah Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing dan PN 4 adalah Revolusi Mental Dan Pembangunan Kebudayaan, kedua prioritas nasional tersebut secara umum terkait dengan terciptanya Sumber Daya Manusia tidak hanya memiliki kecerdasan dan keterampilan namun yang lebih

utama adalah integritas,” ungkapnya.

Toriq kembali mengingatkan bahwa sebagian besar pelaku korupsi, kolusi, dan nepotisme yang terkena operasi tangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan atau aparat penegak hukum lainnya adalah orang-orang yang memiliki latar belakang pendidikan tinggi, bahkan dengan jabatan tinggi pula.

“Oleh karenanya, saya sangat mendorong kepala BPSDM Kementerian PUPR agar target output kedepannya mengutamakan SDM yang berkualitas, sebagaimana Visium Kementerian PUPR 2030 mewujudkan jati diri insan PUPR yang Ber-Integritas, Profesional, Ber-Orientasi Misi, Visioner, dan Ber-Etika/Akhlakul Karimah,” tutupnya.



KH. TORIQ HIDAYAT, Lc

Anggota Komisi V DPR RI

“Sebagian besar pelaku korupsi, kolusi, dan nepotisme yang terkena operasi tangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan atau aparat penegak hukum lainnya adalah orang-orang yang memiliki latar belakang pendidikan tinggi, bahkan dengan jabatan tinggi pula. Oleh karenanya, saya sangat mendorong kepala BPSDM Kementerian PUPR agar target output kedepannya mengutamakan SDM yang berkualitas”

Aleg PKS Nilai Peran BUMN **Sangat Strategis** Pulihkan Ekonomi Prioritas pada UMKM

KUTIPAN

Jakarta (08/06) — Anggota DPR RI Komisi VI dari Fraksi PKS, Nevi Zuairina pada Rapat Kerja (Raker) antara DPR RI Komisi VI dan Kementerian BUMN mengatakan, Peran BUMN dalam melakukan strategi pemulihan ekonomi dengan memprioritaskan UMKM sangat penting.

Nevi mencontohkan dengan menciptakan rantai pasok domestik yang terintegrasi dan mendorong produktivitas hingga ke rantai pasok global akan mengurai berbagai persoalan mulai dari pelaku usaha besar hingga kecil di daerah-daerah.

"Saya meminta kementerian BUMN dapat melibatkan UMKM dalam pengadaan barang dan jasa di BUMN sehingga serapannya maksimal. Salah satu bentuk nyata dalam peran kementerian adalah dengan memiliki program insentif dan kemudahan birokrasi membantu UMKM agar lebih berdaya di masa pandemi ini", tutur Nevi.

Politisi PKS ini menyoroti pembicaraan pendahuluan Rancangan APBN tahun 2022 dan Rencana kerja program kementerian tahun 2022 di lingkungan kementerian BUMN Untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi penggunaan sumber daya nasional. Penganggaran di Kementerian BUMN menjadi salah satu kategori sumber daya pembangunan yang perlu ditingkatkan efektifitasnya.

Legislator Sumatera Barat II ini mengatakan, Anggaran Kementerian BUMN selama 2 tahun terakhir ini menyusut. Pada APBN 2021, pagu anggaran kementerian BUMN

hanya Rp228,59 miliar. turun Rp31,54 miliar atau 12,12 persen dari realisasi anggaran pada 2020 yang mencapai Rp260,13 miliar.

"Sebuah pertanyaan besar yang perlu menjadi perhatian pemerintah adalah Bagaimana BUMN dapat semakin maju dan berkembang terutama dalam menghadapi persaingan global dengan adanya penyusutan APBN. Terlebih lagi, pernah ada janji atau statement dari bapak menteri BUMN yang tidak akan menerima dana APBN. Saya berharap untuk mengurus negara ini mesti serius dan terukur", ucap Nevi.

Nevi menekankan, bahwa Dalam masa pandemi covid-19 ini yang belum berakhir, Kementerian BUMN perlu berperan secara pro-aktif untuk mendukung pemulihan sektor industri pengolahan Nasional. Salah satu strateginya adalah dengan meningkatkan belanja BUMN untuk produk dalam negeri.

la menguraikan, Dalam RKP 2022, arah kebijakan fiskal 2022 adalah penguatan PNBPN. Ini dalam rangka



Hj. NEVI ZUAIRINA
Anggota Komisi VI DPR RI

Saya berharap, strategi Kementerian BUMN di tahun pandemi ini, dapat mewujudkan kontribusi investasi, sehingga dampak multiplier effectnya juga akan sangat besar untuk rakyat dan negara.

meningkatkan penerimaan pendapatan Negara dan hibah. Salah satu strategi penguatan PNBPN adalah optimalisasi penerimaan dividen dari BUMN dengan mempertimbangkan aspek kesinambungan dan mitigasi risiko,

penataan/penyehatan serta efisiensi kinerja BUMN. Di sisi lain masih banyak BUMN yang sakit, merugi dan bermasalah secara keuangan.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id

Legislator PKS Terus Ingatkan Ancaman Bom Waktu Hutang BUMN

KUTIPAN

Jakarta (10/06) — Lonjakan utang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang sebagian berdenominasi valuta asing menjadi bom waktu yang setiap saat bisa meledak.

Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PKS, Amin Ak mengkhawatirkan 'ledakan' krisis keuangan BUMN akan berdampak buruk bagi perekonomian nasional.

Menurut Amin, utang BUMN akan menimbulkan tanggung jawab kontingensi pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara karena bila BUMN gagal bayar, pemerintah akan ikut menanggungnya.

Amin mengingatkan krisis moneter pada tahun 1998 yang dipicu oleh akumulasi utang yang tidak berhasil dikendalikan dan diselesaikan secara tuntas.

Pandemi memang meningkatkan risiko neraca keuangan BUMN maupun perekonomian nasional, namun kata Wakil Rakyat dari Jatim IV (Kabupaten Jember dan Lumajang) itu, tren kenaikan utang BUMN sudah berlangsung dalam lima tahun

terakhir. Bukan semata terjadi akibat pandemi Covid-19.

"Pemerintah tidak bisa menjadikan pandemi Covid-19 sebagai alasan dibalik kegagalan mengelola utang BUMN," tegas Amin.

Berdasarkan data Bank Indonesia, hingga akhir 2020 lalu, dari Rp12.181 triliun utang sektor publik, total utang BUMN mencapai Rp6.091 triliun. Rasio utang BUMN terhadap aset mencapai 67% yang berarti kemampuan perusahaan mencentak keuntungan tidak sebanding dengan laju kenaikan utangnya.

Utang BUMN didominasi oleh perbankan. Amin pun mengingatkan risiko sistemik pada bank-bank BUMN jika sampai mengalami kesulitan finansial yang pada ujungnya akan berpengaruh pada perekonomian secara luas.

"Risiko gagal bayar juga membayangi BUMN nonkeuang-

an terutama BUMN energi dan infrastruktur," pungkasnya.

Amin menyontohkan PT PLN (Persero) yang saat ini memiliki utang mencapai Rp500 triliun, karena membengkaknya kewajiban (liabilitas) pada 2020.

"Padahal lima tahun lalu, utang PLN masih dibawah Rp50 triliun. Hal itu menunjukkan adanya mismanajemen utang.

Secara keseluruhan, posisi utang BUMN yang bukan Lembaga Keuangan, pada akhir tahun 2020 mencapai Rp1.053 triliun. Dua kali lipat dari posisi akhir tahun 2014 yang sebesar Rp504 triliun," terang Amin.

Untuk mencegah memburuknya kondisi keuangan BUMN, Amin meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk mengaudit kondisi keuangan BUMN terkini. DPR berhak untuk mengetahui posisi terakhir atau kondisi keuangan BUMN agar bisa ikut mengawasi proses pembenahan terutama penyembuhan BUMN yang sakit yang saat ini dilakukan pemerintah.

"Utang seharusnya memiliki dampak yang positif terhadap kinerja. Tapi kita bisa lihat di return on equity (tingkat



AMIN AK, M.M.
Anggota Komisi VI DPR RI

“Utang seharusnya memiliki dampak yang positif terhadap kinerja. Tapi kita bisa lihat di return on equity (tingkat pengembalian terhadap modal), sebagian besar masih sangat kecil bahkan tidak sedikit yang negatif”

pengembalian terhadap modal), sebagian besar masih sangat kecil bahkan tidak sedikit yang negatif,” katanya.

Amin pun mendesak pemerintah mengendalikan pengeluaran besar infrastruktur yang saat ini menghambat pengeluaran utang.

Penumpukan utang bisa berdampak negatif terhadap generasi produktif di masa

depan. Amin pun berharap banyak pada Lembaga Pengelola Investasi (LPI) untuk bergerak aktif menurunkan utang BUMN terutama utang jangka pendek.

“Jangan biarkan bom waktu itu meledak dan merembet pada sendi-sendai perekonomian nasional lainnya,” pungkasnya.

Pandemi Belum Berakhir

PKS TOLAK RENCANA HAPUS BBM JENIS PREMIUM

99 KUTIPAN

Kalau premium dihapus maka yang tersisa hanya BBM berharga lebih mahal. Biaya transportasi naik. Ujung-ujungnya semua barang yang diangkut menggunakan transportasi juga naik

Dr. H. MULYANTO, M.Eng

Anggota Komisi VII DPR RI



Politisi PKS Tolak Rencana Pemerintah Hapus BBM Jenis Premium Tahun 2022

KUTIPAN

Jakarta (03/06) — Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PKS, Mulyanto, menolak rencana Pemerintah menghapus BBM jenis premium di seluruh Pulau Jawa, Madura dan Bali, mulai Januari 2022.

Menurut Mulyanto, keputusan tersebut akan menambah beban hidup masyarakat di saat pandemi belum berakhir seperti sekarang.

"Kalau premium dihapus maka yang tersisa hanya BBM berharga lebih mahal. Biaya transportasi naik. Ujung-ujungnya semua barang yang diangkut menggunakan transportasi juga naik," jelas Mulyanto.

Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI ini minta Pemerintah mencari solusi alternatif yang lebih elegan agar tujuan menjaga kelestarian lingkungan hidup tercapai namun beban hidup masyarakat tidak bertambah.

"Saat ini daya beli masyarakat sedang lemah karena terdampak pandemi Covid-19. Tahun 2022 belum tentu terjadi pemulihan daya beli

masyarakat tersebut," ujar Mulyanto usai mengikuti rapat kerja Komisi VII DPR RI dengan Menteri ESDM, Dirut Pertamina, Kepala BPH Migas, Kepala SKK Migas secara virtual, Rabu (02/06/2021).

Mulyanto menegaskan dirinya bukan anti BBM ramah lingkungan. Ia hanya minta Pemerintah memikirkan solusi alternatif bagi masyarakat bila ingin menghapus premium.

"Pemerintah harus memiliki rencana buffering dan mitigasinya. Kalau Premium dihapus apa alternatif BBM murah untuk masyarakat?" tanyanya.

Mulyanto mempertanyakan apakah kompensasi atas penugasan Pertamina untuk Premium ini dialihkan ke BBM yang tersisa,

sehingga harganya bisa sama dengan harga premium? Kalau itu dapat dilakukan mungkin tidak akan ada penentangan dari masyarakat.

Kendati demikian, Mulyanto menyarankan Pemerintah mengkaji ulang rencana penghapusan tersebut.

"Jadi, betul-betul harus dikaji terkait kondisi ekonomi masyarakat di tengah pandemi ini. Apakah sudah tepat waktunya menghapus Premium tersebut?" tandas Mulyanto.

Sebelumnya Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif mengungkapkan, kuota bahan bakar minyak (BBM) jenis premium di wilayah Jawa, Madura, dan Bali (Jamali) bakal dipangkas. Pengurangan kuota tersebut baru akan dilakukan pada tahun 2022 di tengah wacana penghapusan BBM Premium.

Hal ini menjawab pertanyaan Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mulyanto yang menanyakan apakah BBM premium akan resmi dihapus.



Dr. H. MULYANTO, M.Eng
Anggota Komisi VII DPR RI

"Pemerintah harus memiliki rencana buffering dan mitigasinya. Kalau Premium dihapus apa alternatif BBM murah untuk masyarakat?"

"Terkait premium, kalau tidak ada di daftar subsidi, apakah berarti premium di tahun 2022 ini resmi dihapus?" tanya Mulyanto dalam rapat kerja dengan Menteri ESDM.

Menjawab hal tersebut, Menteri Arifin menuturkan, untuk premium akan dikurangi

karena menghasilkan emisi yang merusak lingkungan. Sebagai gantinya, pemerintah akan mengganti dengan pertalite yang lebih ramah lingkungan di wilayah Jamali. Sementara untuk di luar Jamali masih akan tetap dilakukan suplai premium.

Bahas Asumsi Dasar Makro Sektor ESDM RAPBN 2022

Aleg PKS Tekankan Subsidi BBM & LPG Tepat Sasaran

KUTIPAN

Jakarta (09/06) — Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PKS, Rofik Hananto menekankan anggaran ESDM lebih fokus agar belanja subsidi BBM dan LPG semakin efektif dan tepat sasaran.

Anggota DPR RI Fraksi PKS ini meminta agar belanja subsidi mampu membantu pemulihan ekonomi nasional, serta membantu warga yang benar-benar membutuhkan.

"Kami Fraksi PKS meminta agar belanja subsidi mampu membantu pemulihan ekonomi nasional, serta membantu warga yang benar-benar membutuhkan. Oleh karena itu perlu dilakukan secara hati-hati dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian, serta kesiapan data dan infrastruktur." Kata Rofik menanggapi asumsi dasar sektor ESDM pada RAPBN Tahun 2022

Dalam rapat kerja dengan Menteri ESDM RI pada Rabu (02/06), Menteri ESDM Arifin

Tasrif memaparkan asumsi Dasar makro sektor ESDM RAPBN TA. 2022, di antaranya yakni ICP, lifting migas, volume BBM dan LPG bersubsidi, subsidi tetap minyak solar (Gasoil 48), dan subsidi listrik.

Besaran asumsi sektor Energi dalam RAPBN 2022 yang dipaparkan diantaranya:

Indonesia Crude Price (ICP) sebesar US\$ 55 per barel - US\$ 65 per barel.

Lifting migas sebesar 1.717 ribu BOEPD - 1.829 BOEPD dengan rincian lifting minyak bumi 686 ribu BOPD - 726 ribu BOPD dan lifting gas bumi 1.031 ribu BOEPD - 1.103 BOEPD, besarnya Cost recovery US\$ 8,65 miliar.

Volume BBM dan LPG

bersubsidi: Volume bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi 14,80 juta - 15,58 juta kilo liter dengan rincian volume minyak tanah 0,46 juta kilo liter - 0,48 juta kilo liter dan volume solar 14,34 juta kilo liter - 15,11 juta kilo liter.

Sedangkan untuk volume subsidi LPG 3 kg antara 7,4 juta metrik ton - 7,5 juta metrik ton. Subsidi tetap minyak solar adalah sebesar Rp 500 per liter dan subsidi listrik Rp 39,50 / Rp 61,83 triliun.

Fraksi PKS secara serius mendorong dan mengawal target optimis dalam isu ICP tahun 2022

"Dengan argumen trend naiknya harga minyak dunia serta prediksi banyak lembaga internasional akan naiknya harga minyak mentah dunia. FPKS bahkan optimis realisasi ICP 2022 akan menyentuh angka \$ 58 sd 68/barel. Pandangan optimis FPKS ini didasarkan realisasi hingga me 2021. Juga atas ekspektasi permintaan minyak mentah dunia yang sudah pulih kembali karena ekonomi global mulai bergerak dan adanya pembukaan pembatasan wilayah di berbagai negara." Kata Rofik

Terkait target Lifting Minyak 2022, PKS mengusulkan Lifting Migas diangka 1.785 - 1.850 RibU BOEPD. Dengan rincian lifting minyak bumi 705 ribu BOPD - 730 ribu BOPD dan lifting gas bumi 1.080 ribu BOEPD - 1.150 BOEPD, besarnya Cost



H. ROFIK HANANTO, S.E

Anggota Komisi VII DPR RI

"Subsidi Listrik yang diberikan pemerintah diharapkan untuk mengurangi beban masyarakat terutama di sektor Rumah Tangga. Data penurunan konsumsi listrik justru banyak terjadi di sektor industri, akan tetapi berbeda di sektor rumah tangga justru meningkat"

recovery US\$ 9-10 miliar.

Rofik yang juga anggota Banggar juga mempertanyakan penurunan target Lifting Minyak 2022, karena pertama berbeda dengan target ICP yang optimis naik karena trend harga minyak mentah dunia yg naik. Kedua Naiknya permintaan pasar yang

semakin bagus karena ekonomi global membaik dan adanya pembukaan wilayah, dan ketiga Rilis penambahan cadangan serta rencana strategis para kontraktor minyak, misal di Rokan, Blok Cepu serta Blok lain yang potensial menaikkan lifting.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id

SOAL PEMBATALAN HAJI

KEPUTUSAN PEMERINTAH TERGESA-GESA

Komisi VIII DPR Fraksi PKS menyesalkan pengumuman pemerintah yang kembali membatalkan keberangkatan haji tahun 2021. PKS menilai pengumuman tersebut sebagai keputusan yang tergesa-gesa.



Bukhori Yusuf:
Mestinya masih tetap bisa berangkat

“Keputusan pemerintah yang tergesa-gesa membatalkan haji patut disayangkan. Sebenarnya tidak masalah jika yang terpaksa harus diberangkatkan hanya sepersekian persen dari total calon jemaah haji kita



Iskan Qolba Lubis :
Pemerintah harus bertanggung jawab

“Kami menganggap masih ada hal yang belum optimal yang dilakukan Pemerintah. Terkait syarat Vaksin dan belum adanya kepastian kuota sampai saat ini, hal itu membuktikan lemahnya diplomasi yang dilakukan pemerintah.”



Surahman
Pemerintah harus Transparan

“Pemerintah harus menjelaskan kepada

masyarakat secara menyeluruh agar tidak memberi ruang dugaan-dugaan yang liar, seperti adanya dugaan bahwa dana haji digunakan untuk mendanai infrastruktur.



Hidayat Nurwahid
Pentingnya Lobi Kelas Tinggi dengan Raja Salman

“Kami sudah ingatkan sejak awal raker dengan Menag soal pentingnya lobi diplomasi kelas tinggi untuk buka peluang pemberangkatan calon haji Indonesia, agar Presiden Jokowi komunikasi langsung dengan Raja Salman, sebagaimana dilakukan PM Malaysia, Muhyidin.

Anggota FPKS Desak Menag Perjuangkan Anggaran Pendidikan Agama yang Adil dan Memihak

KUTIPAN

Jakarta (03/06) — Anggota Komisi Agama DPR RI dari Fraksi PKS, Bukhori Yusuf, menyoroti fungsi pendidikan di Kementerian Agama.

Bukhori mengatakan, Kementerian Agama mengemban amanat konstitusi dalam mengusahaan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan bangsa.

Akan tetapi, politisi PKS ini mengaku heran karena sejauh ini tidak mendapati fakta bahwa sistem pendidikan yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama memperoleh anggaran yang berkeadilan dari negara.

"Saya minta Menteri Agama, khususnya dirjen pendidikan Islam, supaya melakukan lobi yang kuat terhadap Kementerian Keuangan supaya memperoleh anggaran yang adil dan

memihak. Sebab saya prihatin melihat pendidikan agama dari tingkat PAUD hingga Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta (PTAIS) yang nyaris tidak mendapat sentuhan pemerintah," ungkapnya saat Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI dengan Menteri Agama di Gedung DPR Senayan, Rabu (02/06/2021).

Ketua DPP PKS ini menuturkan, dari total jumlah madrasah di Indonesia, 93 persennya didominasi oleh madrasah berstatus swasta sementara sisanya berstatus negeri. Artinya, mayoritas masyarakat memiliki hak atas pendidikan yang harus dipenuhi di sana. Sehingga pemerintah, dalam hal ini Kementerian Agama, wajib memunculkan perhatian pada wilayah itu

dengan menghadirkan keadilan anggaran bagi siapapun yang berhak mengenyam pendidikan, bahkan di madrasah swasta sekalipun.

"Saatnya Menteri Agama menunjukkan keberpihakan yang riil bagi masyarakat dengan menuntut keadilan anggaran dalam pendidikan. Orientasinya adalah mewujudkan anggaran pendidikan, yang sebesar 20% dari APBN tersebut, dimana alokasinya bisa benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Dengan demikian, pagu anggaran Kemenag untuk memperoleh ruang yang lebih besar menjadi sangat mungkin untuk kami setuju" tegasnya.

Dalam kesempatan yang sama, anggota Badan Legislasi ini juga menyoroti fungsi keagamaan Kementerian Agama. Bukhori meminta Kantor Urusan Agama (KUA) tidak hanya direvitalisasi secara infrastruktur, tetapi juga secara suprastruktur melalui penguatan sumberdaya manusia.

KUA, demikian Bukhori, harus menjadi ikon tempat berjumpanya dialog dari



KH. BUKHORI, Lc., M.A.
Anggota Komisi VIII DPR RI

“Saatnya Menteri Agama menunjukkan keberpihakan yang riil bagi masyarakat dengan menuntut keadilan anggaran dalam pendidikan. Orientasinya adalah mewujudkan anggaran pendidikan, yang sebesar 20% dari APBN tersebut, dimana alokasinya bisa benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat

pelbagai kelompok masyarakat yang beragam. KUA harus diberdayakan dalam definisi yang lebih luas, salah satunya yakni sebagai medium untuk selesaikan masalah sosial dengan cara yang rukun dan bermartabat.

“Jangan sampai kita

selesaikan problem kesalahpahaman di masyarakat justru dengan cara berbahaya. Misalnya, melalui tes kebangsaan. Model ini berbahaya karena bisa membelah masyarakat,” tukasnya.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id

Tolak Sertifikasi Dai, Aleg PKS **Kecewa** Dengan Kemenag RI

KUTIPAN

“ini bertentangan dengan konstitusi negara kita, yang menjunjung tinggi hak kebebasan berbicara dan berpendapat. Semua orang berhak menyuarakan pendapatnya begitu pula Dai, ia berhak dan bebas untuk menebarkan ilmu yang ia miliki tanpa harus melalui proses sertifikasi,” pungkask anggota komisi VIII tersebut.

Jakarta (06/06). Anggota DPR RI FPKS, Iskan Qolba Lubis menanggapi kebijakan Kementerian Agama (Kemenag) RI untuk melakukan Sertifikasi Dai di Indonesia.

Iskan sendiri kecewa dengan adanya kebijakan sertifikasi tersebut.

Menurutnya, hal tersebut menyerupai Penelitian Khusus (Litsus) yang terjadi di zaman orde baru (Orba)

“Alasan pertama mengapa PKS menolak sertifikasi tersebut ialah hal ini menyerupai Litsus yang dilakukan di era Soeharto untuk mengontrol dan membatasi siapa yang disukai dan tidak disukai oleh

pemerintah,” tukas Iskan.

Selain itu, menurutnya hal ini juga bertentangan dengan hak kebebasan berbicara dan berpendapat selayaknya berakwah tanpa harus memiliki sertifikasi.

“ini bertentangan dengan konstitusi negara kita, yang menjunjung tinggi hak kebebasan berbicara dan berpendapat. Semua orang berhak menyuarakan pendapatnya begitu pula Dai, ia berhak dan bebas untuk menebarkan ilmu yang ia miliki tanpa harus melalui proses sertifikasi,” pungkask anggota komisi VIII tersebut.

Tambahnya, ia

menyampaikan bahwa Indonesia mempunyai tugas besar didalam konstitusi Indonesia yakni untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan besar yang tertuang di dalam konstitusi negara kita.

“Tugas negara dalam konstitusi adalah melindungi segenap tumpah darah, mencerdaskan kehidupan bangsa, kesejahteraan umum, dan ikut dalam perdamaian dunia. Dalam hal ini negara tidak boleh masuk terlalu dalam terminologi agama. Terlebih, dengan adanya sertifikasi ini pemerintah seakan mengatur pikiran dan keyakinan masyarakat,” jelas Aleg PKS dari Dapil Sumut tersebut.

Diakhir, Iskan menyampaikan sikap PKS terkait hal ini dan jalan yang harus ditempuh ke depannya oleh masyarakat

“Dengan ini saya mewakili PKS menolak sertifikasi Dai tersebut dan ke depan masyarakat berhak untuk melakukan perlawanan hukum dengan jalur jalur yang legal dengan membawanya ke Mahkamah Agung (MA) semisal,” tutup Iskan.



H. ISKAN QOLBA LUBIS, M.A.

Dapil Sumatera Utara II

“Tugas negara dalam konstitusi adalah melindungi segenap tumpah darah, mencerdaskan kehidupan bangsa, kesejahteraan umum, dan ikut dalam perdamaian dunia. Dalam hal ini negara tidak boleh masuk terlalu dalam terminologi agama. Terlebih, dengan adanya sertifikasi ini pemerintah seakan mengatur pikiran dan keyakinan masyarakat”

Raker Dengan Mensos, Nur Azizah: Bansos Harus Tepat Sasaran, **Tuntaskan Segera** Pemutakhiran DTKS!

KUTIPAN

Jakarta – Anggota Komisi VIII DPR RI Hj. Nur Azizah Tamhid, B.A., M.A., menyebutkan carut-marut pendistribusian bansos tidak boleh lagi terjadi. Menurutnya, bansos harus tepat sasaran dan segera disalurkan kepada yang berhak,

oleh karena itu Mensos harus segera menuntaskan proses pemutakhiran DTKS. Hal itu disampaikan Nur Azizah dalam raker bersama Menteri Sosial Tri Rismaharini pada Senin (24/5) di Gedung Nusantara II DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat.

Selain itu Nur Azizah turut mengingatkan bahwa di tahun 2020 lalu telah diadakan rapat gabungan antara Kementerian Sosial, Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan yang telah melahirkan SKB 3 Menteri pada bulan Juli 2020 tentang Dukungan Percepatan Pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial oleh Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota.

“Apakah masih diinget

terkait SKB 3 Menteri antara Kemensos, Kemendagri dan Kemenkeu ini bahwa pemutakhiran data itu adalah kewajiban seluruh kepala daerah dalam hal ini bupati atau walikota dan setiap tahun itu diadakan pemutakhiran data dua kali yakni di bulan April dan Oktober sebagaimana tertulis dalam SKB 3 Menteri. Apakah seluruh kepala daerah sudah mengetahuinya dan sudah dapat menjalankannya?”, tanya Nur Azizah.

Menurut Nur Azizah dengan terbitnya SKB 3 menteri dan permensos itu secara teknis dapat mempercepat proses pemutakhiran data ini karena secara strukturnya sudah menjadi tanggung jawab setiap kepala daerah. Namun

faktanya, justru di beberapa daerah, seperti di Dapilnya di Kota Bekasi, saat ia menanyakan langsung kepada Walikota, justru belum mengetahui telah adanya SKB 3 menteri ini, padahal sudah terbit sejak tahun lalu.

“Tentu sangat disayangkan. Dengan terbitnya aturan ini harusnya bisa menjadi solusi, dan mempercepat proses pemutakhiran. Namun faktanya sepertinya belum ada sosialisasi yang jelas strukturnya yang bersifat menyerukan kepada setiap bupati dan walikota di seluruh Indonesia agar segera melakukan proses pemutakhiran ini. Jika semua kepala daerah sudah kompak dan paham akan aturan ini, tentu akan memudahkan semua pihak. Dan yang terpenting updating data dapat secara kontinyu dilakukan dua kali dalam setahun”, papar Nur Azizah.

Nur Azizah menuturkan bahwa memang banyak permasalahan terjadi. Yang pertama yaitu, belum memadainya anggaran yang dialokasikan untuk menjalankan kegiatan verifikasi dan validasi data,

**Hj. NUR AZIZAH TAMHID, B.A., M.A.**

Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Jawa Barat VI

“Perlu adanya pengalokasian anggaran yang memadai dan realistis untuk menjalankan kegiatan verifikasi. Kemudian perlu peningkatan kualitas dan honor petugas pendata dan petugas verifikasi data yang lebih layak. Kemudian sistem yang terintegrasi antara DTKS yang dikelola oleh kemensos dan data kependudukan yang dikelola oleh kemendagri.

anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan verifikasi DTKS seringkali tidak memasukkan perhitungan medan dan jarak tempat tinggal penerima manfaat serta keterbatasan angkutan umum menuju tempat

tinggal penerima manfaat. Kekurangan anggaran ini menjadi beban berat bagi petugas pendata dan verifikasi DTKS.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id

Era Digitalisasi, Data Pribadi Harus Dilindungi



PKS mengkritisi mengapa pemerintah tidak segera mengesahkan RUU Perlindungan Data Pribadi.

- Maraknya digitalisasi dan globalisasi, masyarakat dengan mudah memberikan data pribadinya kepada platform daring maupun luring. Hal ini menimbulkan banyaknya kasus kebocoran data pribadi. Di satu sisi, masyarakat harus lebih berhati-hati mengenai pemberian data pribadi. Di sisi lain, negara juga harus segera melegalkan regulasi perlindungan data pribadi.

Perjalanan RUU PDP

- Persidangan II Tahun 2020-2021: DPR menargetkan menyelesaikan pembahasan RUU PDP.
- Persidangan III Tahun 2020-2021: DPR memperpanjang pembahasan RUU PDP.
- RUU PDP memasuki prolegnas prioritas 2021.

Kasus kebocoran data pribadi 2020-2021



- BPJS Kesehatan : **279 juta** (data dijual ke forum online 'RapidForums')
- Tokopedia : **91 juta** (data dijual disitus gelap)
- RedDoorz : **5,8 juta** (data dijual)
- Cermati : **2,9 juta** (data dijual bebas)
- Bhinneka.com : **1,2 juta** (data dijual)
- Kreditplus : **890ribu** (data bocor)
- ShopBack : sempat menemukan akses ilegal ke sistem yang memuat data pengguna



Legislator PKS: Kesiapan Pemda Terima Kepulangan PMI dari Malaysia Perlu Dipastikan

KUTIPAN

Jakarta (04/06) — Malaysia akan mendeportasi Pekerja Migran Indonesia (PMI) kembali ke Indonesia karena beberapa sebab. Jumlah pasti PMI yang akan dideportasi masih menunggu kepastian dari pihak Malaysia. Diprediksi jumlahnya mencapai ribuan.

Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PKS Kurniasih Mufidayati meminta agar kesiapan Pemda dalam menerima PMI dari Malaysia perlu dipastikan.

Kesiapan ini meliputi tempat untuk melakukan karantina, peralatan medis termasuk APD bagi petugas, administrasi hingga mengawal kepulangan teman-teman PMI ke rumahnya masing-masing.

"Pemda perlu bersiap diri dan mendapat dukungan, dari siapa? Jelas dari Pemerintah Pusat. Jangan sampai ada Pemda yang beralasan belum

siap menerima teman-teman PMI karena back up dari pusat tidak memadai. Jadi ini catatan bagi Pusat maupun Pemda yang menjadi tujuan kedatangan teman-teman PMI dari Malaysia," ujar Mufida dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (4/6/2021).

Mufida meminta Menko PMK yang ditunjuk menjadi komando dalam proses pemulangan PMI menjalankan fungsi orkestrasi kebijakan lintas sektoral ini.

"Proses pemulangan ini pasti lintas bidang, lintas

kementerian apalagi ada saat pandemi. Tapi kami minta Menko PMK yang menjadi leading sektor termasuk ke Pemerintah Daerah dan Satgas Covid-19 nasional maupun di daerah bisa menjalankan fungsi orkestrasi dengan baik, tidak ada ego lembaga dalam hal ini, satu komando," ujar dia.

Mufida meminta agar proses kepulangan PMI dari Malaysia bisa berjalan dengan tetap memperhatikan kondisi mental dan kesehatan dari teman-teman PMI.

"Kunciya prosesnya harus sederhana, tidak membingungkan atau justru menjadi beban teman-teman PMI. Sebab banyak diantara mereka yang lama di rumah tahanan imigrasi dan pasti ada perasaan traumatik. Ini misi kemanusiaan sehingga jangan memberatkan apalagi muncul oknum-oknum yang menjanjikan percepatan kepulangan," sebut Mufida.

Mufida mengingatkan setelah kembali ke kampung halaman perlu ada program dari Kementerian Ketenagakerjaan agar langsung mendapatkan program bagi purna PMI.

"Kepulangan teman-teman PMI harus diikuti solusi setelahnya dengan berbagai program bagi Purna PMI seperti optimalisasi BLK, penyerapan tenaga kerja di proyek padat karya dan program jaminan soal ketenagakerjaan sejenis," tutup Mufida.



Dr. Hj. KURNIASIH MUFIDAYATI, M.Si.

Anggota Komisi IX DPR RI

"Pemda perlu bersiap diri dan mendapat dukungan, dari siapa? Jelas dari Pemerintah Pusat. Jangan sampai ada Pemda yang beralasan belum siap menerima teman-teman PMI karena back up dari pusat tidak memadai. Jadi ini catatan bagi Pusat maupun Pemda yang menjadi tujuan kedatangan teman-teman PMI dari Malaysia"

Pulangkan Ribuan PMI di Tengah
Lockdown Malaysia,

Aleg PKS: Jangan Jadi Importasi Kasus!

KUTIPAN

Jakarta (08/06) — Pemerintah akan memulangkan 7.300 Pekerja Migran Indonesia (PMI) dari Malaysia pada periode Juni-Juli 2021.

Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetyani Aher meminta pemerintah agar mengawal pemulangan PMI secara ketat, mengingat Malaysia tengah alami lonjakan kasus Covid-19.

"Saat ini Malaysia sedang lockdown total karena lonjakan kasus Covid-19. Pemulangan 7300 pekerja migran harus dikawal ketat untuk memastikan mereka sudah bebas Covid-19 sehingga tidak menimbulkan masalah baru di tanah air. Pemerintah harus memberikan perlindungan maksimal pada semua pekerja kita melalui koordinasi dengan lembaga maupun institusi terkait. Screening harus dilakukan sesuai SOP, terutama di pintu-pintu masuk kedatangan PMI," kata Netty dalam keterangan medianya, Selasa (08/06).

Netty berharap

pemulangan PMI ini tidak menjadi importasi kasus COVID-19 di tanah air.

"Kita juga sedang mengalami kondisi COVID-19 yang mengkhawatirkan karena beberapa wilayah sudah terjadi lonjakan kasus, seperti di Kudus, Bangkalan, Garut dan Bandung. Jika sampai terjadi importasi kasus dari Malaysia lagi, maka ini akan memperparah kondisi di tanah air. Pemerintah harus mengawal secara ketat pemulangan PMI tersebut," tambahnya.

Netty mengingatkan pemerintah agar memastikan kesiapan SDM dan infrastruktur kesehatan dalam proses pemulangan PMI tersebut.

"Pastikan kesiapan SDM dan infrastruktur dalam proses pengetesan, karantina dan administrasi imigrasi lainnya. Bukan hanya aspek teknis, tapi

yang lebih penting adalah aspek moral dan mental para petugas di lapangan. Jangan sampai terulang kasus penggunaan alat test bekas atau mafia karantina yang mencoreng nama baik Indonesia," kata Netty.

Tokoh Jawa Barat ini tidak ingin kepulangan PMI menjadi pemicu melonjaknya COVID-19 dari kluster keluarga, seperti yang terjadi di Bangkalan.

Pihak RSUD Syarifah Ambami Rato Ebu sebagai salah satu RS yang menangani pasien COVID-19 di Bangkalan menyebut kluster keluarga ini diakibatkan karena adanya PMI yang pulang dari luar negeri, utamanya di dominasi dari Malaysia.



Dr. Hj. NETTY PRASETIYANI, M.Si

Anggota Komisi IX DPR RI

"Pastikan kesiapan SDM dan infrastruktur dalam proses pengetesan, karantina dan administrasi imigrasi lainnya. Bukan hanya aspek teknis, tapi yang lebih penting adalah aspek moral dan mental para petugas di lapangan. Jangan sampai terulang kasus penggunaan alat test bekas atau mafia karantina yang mencoreng nama baik Indonesia,"

Anggota Komisi IX FPKS Harap Imunisasi Tetap Berjalan Optimal

KUTIPAN

Alifudin, Anggota komisi IX DPR RI yang hadir dalam acara sosialisasi tersebut mengatakan program imunisasi yang dilaksanakan oleh Kementerian kesehatan harus tetap dilaksanakan dengan tetap memperhatikan prokes.

Pontianak (12/06) — Komisi IX DPR RI bekerjasama dengan Kementerian Kesehatan RI melaksanakan kegiatan Sosialisasi penguatan imunisasi rutin, di Hotel G, Jalan Jenderal Urip, Pontianak, pada Jumat (11/06/2021).

Alifudin, Anggota komisi IX DPR RI yang hadir dalam acara sosialisasi tersebut mengatakan program imunisasi yang dilaksanakan oleh Kementerian kesehatan harus tetap dilaksanakan dengan tetap memperhatikan prokes.

"Sebagai mitra kerja di komisi IX DPR RI, kami mendukung program sosialisasi terkait imunisasi, karena kita juga tahu, dengan adanya imunisasi ini bisa mencegah anak anak kita dari penyakit

yang rentan menyerang usia balita," ujarnya.

Alifudin, Juga mengatakan masyarakat harus saling membantu dalam menyebarkan informasi positif dan hindari berita hoax yang banyak beredar terkait imunisasi juga yang saat ini vaksinasi covid 19.

"Sumber berita harus jelas, dari mana kita dapatkan, dan bantu masyarakat agar semakin paham tentang imunisasi serta vaksinasi covid, karena saat ini pandemi di kota kita masih besar," tambahnya.

Subkoordinator Imunisasi Lanjutan dan Khusus dari Kementerian Kesehatan RI,

Soitawati mengatakan, tujuan dari kegiatan sosialisasi ini dalam rangka penguatan imunisasi rutin, yang sampai

saat ini harus tetap dilakukan, guna mencegah penyakit yang menyerang usia balita.

"Di tengah kondisi pandemi, program imunisasi harus tetap berjalan dengan tetap menjaga prokes, karena imunisasi ini perlindungan kita terhadap anak anak kita," jelas Soitawati.

Acara yang diikuti perwakilan puskesmas se Kota Pontianak juga diikuti oleh tokoh masyarakat dan warga undangan.

Soitawati berharap dengan adanya kegiatan ini masyarakat dapat membantu menyebarkan informasi terkait pentingnya imunisasi.

"Saya ucapkan terimakasih kepada anggota Komisi IX DPR RI, pak Alifudin yang turut hadir dalam acara ini, ini bentuk dukungan moral bagi kami," pungkasnya.



H. ALIFUDIN, S.E.,M.M

Anggota Komisi IX DPR RI

“Masyarakat harus saling membantu dalam menyebarkan informasi positif dan hindari berita hoax yang banyak beredar terkait imunisasi juga yang saat ini vaksinasi covid 19. Sumber berita harus jelas, dari mana kita dapatkan, dan bantu masyarakat agar semakin paham tentang imunisasi serta vaksinasi covid, karena saat ini pandemi di kota kita masih besar”

KUALITAS PENDIDIKAN INDONESIA MASIH RENDAH



PKS Minta Pemerintah Serius Tingkatkan Pemerataan Pendidikan

- Pada pembukaan UUD 1945 **negara mempunyai amanat** untuk “**mencerdaskan kehidupan bangsa**”. Pasal 31 UUD 1945 ayat 4 disebutkan **Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen** dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.

- Namun, **kualitas pendidikan** di Indonesia masih **rendah**.



- Dalam survei kualitas pendidikan yang dikeluarkan oleh PISA, Indonesia menempati peringkat



72 dari 77 negara di dunia



- Anggaran pendidikan cukup tinggi



Rp549,5 Triliun
(20% dari APBN Indonesia)

- 20% anggaran pendidikan sesuai amanat UUD dan UU Sisdiknas **belum sepenuhnya** difokuskan untuk meningkatkan kualitas dan daya saing pendidikan kita.

- Hal ini membuktikan bahwa **banyaknya anggaran belum dimaksimalkan oleh pemerintah** dengan meningkatkan daya saing para siswa di Indonesia.

Wakil Ketua Komisi X FPKS: Pemerintah **Dinilai Setengah Hati** Benahi Ekonomi Kreatif

KUTIPAN

Jakarta (10/06) — Wakil Ketua Komisi X DPR RI dari Fraksi PKS, Abdul Fikri Faqih, menyayangkan pemerintah masih setengah hati dalam membenahi ekonomi kreatif di Indonesia.

“Apalagi menjadikan sektor ekonomi kreatif sebagai tulang punggung perekonomian, jauh panggang dari api,” kata dia di sela rapat kerja anggaran tahun 2022 dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif di Jakarta, Kamis (10/06).

Fikri menyatakan, problematika ekonomi kreatif (ekraf) menyangkut nomenklatur kementerian negara yang menempatkan urusan ekonomi kreatif bersama dengan pariwisata dalam satu Lembaga (Kemenparekraf). Politik PKS ini menguraikan, menurut UU nomor 39 tahun 2008 tentang Kementerian Negara, kementerian yang menaungi pariwisata termasuk ke dalam klaster tiga, yakni bukan urusan pemerintah yang disebutkan dalam UUD 1945.

“Nah, terlebih ekraf digabung ke dalam pariwisata, yang membuatnya semakin tenggelam,” imbuh Fikri.

Fikri menyinggung janji pemerintah melalui Presiden Jokowi yang pernah menyatakan ekonomi kreatif sebagai tulang punggung perekonomian nasional.

“Namun faktanya, pemerintah malah dinilai tidak menjalankan amanat UU 24 tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif, yakni menciptakan dan mengembangkan ekosistem ekonomi kreatif hingga ke daerah,” ungkapnya.

Menurut Fikri, urusan ekraf di daerah masih menjadi urusan pilihan, bukan urusan wajib, sehingga tidak ada kaki di daerah yang menaungi sektor ekraf secara jelas.

“Ekraf ditempatkan di

bawah dinas perindustrian atau perdagangan, tanpa ada nomenklatur yang jelas tertulis, misalnya suku dinas ekonomi kreatif,” tegas Fikri.

Selain itu, dalam perencanaan anggaran Kemenparekraf tahun anggaran 2022, pagu untuk kementerian ini hanyalah Rp. 3,8 T. Bandingkan dengan total APBN tahun 2022 yang mencapai Rp. 2700 T.

“Maka hanya 0.14% rasionya, nilai yang sangat tidak sesuai dengan jargon pemerintah untuk membenahi sektor ini yang tengah terpuruk akibat pandemi,” ujar Fikri.

Dalam hal proposi anggaran antara sektor pariwisata dan sektor ekonomi kreatif, juga dinilai tidak berimbang dan berkeadilan.

“Proporsi ekonomi kreatif dengan pariwisata jauh lebih kecil; 15,4 persen untuk ekraf berbanding 84,6 persen untuk pariwisata,” jelas Fikri.

Padaحال dalam analisis sektor-sektor ekonomi yang terpuruk akibat hantaman pandemi Covid-19, diantaranya yang paling terjatuh paling dalam adalah sektor pariwisata, sedangkan sektor yang



Dr. H. ABDUL FIKRI FAQIH, MM

Wakil Ketua Komisi X DPR RI

“Keberpihakan anggaran harusnya bagaimana kita lebih memperhatikan ekraf sebagai kekuatan baru ekonomi untuk bangkit dari krisis pandemi ini

di prediksi bertahan bahkan terus naik, adalah sektor ekonomi digital (sub sektor dalam ekraf).

“Keberpihakan anggaran

harusnya bagaimana kita lebih memperhatikan ekraf sebagai kekuatan baru ekonomi untuk bangkit dari krisis pandemi ini,” pungkas Fikri.

Hadapi Pembelajaran Tatap Muka, Aleg PKS Pesankan Protokol Kesehatan Ketat di Setiap Sekolah

KUTIPAN

Bandung (06/06) — Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi PKS, Ledia Hanifa Amaliah mengatakan meski pembelajaran tatap muka akan dilakukan oleh pemerintah, maka tidak bisa seperti pada masa sebelum pandemi, mengingat covid-19 masih di sekitar kita.

"Kita mempunyai PR yang besar untuk pembelajaran tatap muka, karena pandemi yang belum selesai sehingga banyak perubahan yang terjadi. Perubahan ini perlu dipahami seluruh stakeholder Pendidikan," ungkap Ledia dalam Workshop Pendidikan yang diselenggarakan Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbud-Ristek) RI.

Sekarang, lanjut Ledia, kita akan menghadapi tatap muka terbatas, sehingga kita harus melakukan mixed model atau yang luring ada yang daring. Agar nantinya kita dapat

memaksimalkan model pembelajaran seperti ini.

"Mengapa kita harus mulai menjalankan tatap muka terbatas, karena berdasarkan apa yang disampaikan Pemerintah, pembelajaran jarak jauh atau daring ini membuat negara mengalami learning lost. nah ini masalah yang kita hadapi semoga dengan adanya workshop ini kita mampu mengembalikan sense of learn tersebut kepada para siswa kita di Indonesia," terang Sekretaris Fraksi PKS DPR RI.

Ledia menambahkan ada beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk setiap sekolah sebelum pelaksanaan tatap

muka nantinya. Syarat dari pelaksanaan tatap muka di setiap sekolah yang ada di seluruh Indonesia dikenal dengan 5 M.

"Pertama, pihak sekolah harus menyiapkan dan mengedukasi anak sekolah untuk terbiasa mencuci tangan. Mencuci tangan sangat perlu ditekankan terutama sebelum makan atau minum. Kedua, pihak sekolah dan pengajar juga perlu terus mengingatkan penggunaan masker bagi para peserta didik," urai Anggota Badan Legislasi DPR RI ini.

Ketiga, imbuhnya, pihak sekolah harus bisa melakukan jaga jarak antar siswa, guru dan civitas sekolah terutama dalam pembelajaran di kelas. Keempat, Menjauhi kerumunan atau memantau siswa yang berkerumun karena berpotensi menularnya covid-19.

"Yang kelima atau terakhir yang perlu diperhatikan sekolah adalah mengurangi mobilitas siswa-siswi di kelas. Kalau di luar pandemi banyak siswa atau siswi yang lari-larian di kelas, mulai pembelajaran tatap muka di masa pandemi nanti sudah



Hj. LEDIA HANIFA A, S.Si., M.Psi.T
Anggota Komisi X DPR RI

"Mengapa kita harus mulai menjalankan tatap muka terbatas, karena berdasarkan apa yang disampaikan Pemerintah, pembelajaran jarak jauh atau daring ini membuat negara mengalami learning lost. nah ini masalah yang kita hadapi semoga dengan adanya workshop ini kita mampu mengembalikan sense of learn tersebut kepada para siswa kita di Indonesia"

harus dikurangi mobilitas mereka. Dengan protokol kesehatan yang dilakukan secara ketat, kita berharap pembelajaran tatap muka

berjalan lancar dan sesuai dengan harapan kita bersama," tutup Anggota DPR Dapil Kota Bandung dan Cimahi ini.

Aleg PKS: Pajak Barang Mewah Dikurangi, Bahan Pokok Mau Dipajaki?

KUTIPAN

Jakarta (09/06) — Pemerintah berencana akan menjadikan bahan pokok untuk dikenakan sebagai objek Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Menanggapi hal itu, Anggota Komisi XI DPR RI Junaidi Auly mengatakan bahwa rencana kebijakan ini sangat kontraproduktif dengan program pemerintah dalam melakukan pemulihan ekonomi di masa pandemi.

"Rencana ini tentu sangat bertentangan dari semangat pemulihan ekonomi, kemarin Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas pembelian mobil baru (PPnBM) dikurangi bahkan sampai 0%, sekarang kenapa bahan pokok mau dipajaki?" ujar Junaidi dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Rabu, (09/06)

Legislator Fraksi PKS ini meminta kepada pemerintah sesegera mungkin membatalkan penganan PPN

bahan pokok, dampak dari penerapan PPN ini bukan saja membebani masyarakat kelas menengah ke bawah, namun berpotensi dapat meningkatkan angka kemiskinan yang tahun kemarin mengalami lonjakan 0,97 poin menjadi 10,19%.

Doktor Ilmu Pemerintahan ini mengingatkan kepada pemerintah jangan terus menambah beban kepada masyarakat, bahan pokok merupakan komoditas yang sangat penting untuk masyarakat.

"Seharusnya pemerintah aktif hadir pada kebutuhan publik terkait akses dan keterjangkauan harga bahan pokok, bukan hadir pada penambahan pajak bahan pokok" tutup Aleg asal Lampung ini.



Dr. Ir. H. A. JUNAIDI AULY, M.M.
Anggota Komisi XI DPR RI

"Rencana ini tentu sangat bertentangan dari semangat pemulihan ekonomi, kemarin Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas pembelian mobil baru (PPnBM) dikurangi bahkan sampai 0%, sekarang kenapa bahan pokok mau dipajaki?"

Rapat Dengan BPK dan BPKP, Aleg PKS Beri Catatan Penting

KUTIPAN

Jakarta (09/06) — Komisi XI DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat dengan Sekjen BPK dan Kepala BPKP pada Senin (07/06/2021) di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta.

Rapat ini bertajuk Pembahasan Pagu Indikatif BPK dan BPKP dalam RAPBN 2022. Pagu indikatif merupakan perkiraan pagu anggaran yang diberikan kepada Kementerian/Lembaga (K/L) sebagai pedoman dalam penyusunan rencana kerja K/L terkait.

Dalam rapat yang berlangsung dinamis ini, Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi PKS, Anis Byarwati, menyampaikan sejumlah catatan dan harapannya.

Hal pertama yang menjadi catatan Anis, terkait dengan kekuatan BPK dalam memastikan berjalannya rekomendasi yang dikeluarkannya. Anis mengatakan, sejauh pengamatan dan informasi yang didapatkannya dari BPK-BPK

Provinsi, rekomendasi yang diberikan oleh BPK seringkali hanya disikapi oleh pihak terkait dengan berkirim surat saja.

Sementara, pelaksanaan rekomendasi BPK secara riil, jarang dilakukan. Anis menyangkan follow up dari temuan BPK yang hanya cukup disikapi dengan berkirim surat oleh pihak terkait dan BPK seperti berhenti sampai disitu. "Itu sebabnya, sangat bisa difahami mengapa kebocoran masih banyak terjadi," ujarnya.

Anis yang menjabat sebagai wakil ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI ini juga menyoroti data yang disampaikan oleh BPK mengenai capaian kinerja pemeriksaan.

Data itu menyebutkan bahwa sepanjang tahun 2018-2020, BPK menemukan 70.499 dari 106.842 permasalahan dengan nilai kerugian sebesar 166,23 triliun. Dari temuan tersebut, sebanyak 48.111 (45%) merupakan permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan sebesar Rp 130,66 triliun.

Sebanyak 43.038 (40%) merupakan permasalahan kelemahan system pengendalian internal dan 15.693 (15%) merupakan permasalahan ketidakhematan, ketidak efisienan dan ketidak efektifan yaitu sebesar Rp 35,57 triliun.

Terkait dengan data ini, Anis mempertanyakan kinerja BPKP yang memiliki fungsi salah satunya melakukan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara, meliputi kegiatan lintas sektoral, kegiatan kebendaharaan umum negara, dan kegiatan lain berdasarkan penugasan dari Presiden.

"Dengan fungsi pengawasan yang dimilikinya, semestinya BPKP bisa turut andil meminimalisir ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan dan kelemahan system pengendalian internal," tutur Anis.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id



Dr. Hj. ANIS BYARWATI, S.Ag., M.Si

Anggota Komisi XI DPR RI

Terkait dengan pagu indikatif yang diajukan BPK dimana BPK mengajukan anggaran sebesar Rp 4,591 triliun sementara Menteri Keuangan menganggarkan Rp 3,729 triliun untuk tahun 2022. Karenanya BPK mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp861,99 miliar untuk disetujui Komisi XI DPR RI. Anis menilai angka tersebut sangat wajar mengingat beratnya tugas yang harus ditunaikan oleh BPK. Namun, ia menyoroti serapan anggaran BPK pada tahun 2020 yang belum mampu menyerap 100% anggaran (95,55%) dan mengalami penurunan dari tahun sebelumnya (98,21%).

RUANG ALEG

BY HUMAS FRAKSI PKS

Program terbaru dari Fraksi PKS DPR RI yang memperlihatkan kepada publik kehidupan Anggota Legislatif PKS dibalik kegiatan politik dan mengajak masyarakat untuk merasakan kehangatan obrolan santai bersama para Wakil Rakyat.

Hadir setiap pekan
Sabtu, pukul 10.00 WIB
hanya di:

 youtube **PKSTV DPR RI**



Catatan Kritis terhadap PP No. 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal

image: istimewa



OLEH

KH. BUKHORI, Lc., M.A.

Anggota Badan Legislasi DPR RI

Pada tanggal 2 Februari 2021, Presiden menetapkan Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal.

Peraturan Pemerintah (PP) ini merupakan aturan turunan dari Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) sehingga secara otomatis mengganti PP sebelumnya, yakni PP No. 31 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH).

Tulisan ini adalah untuk menyorot apakah perubahan mengenai regulasi jaminan produk halal dalam PP terbaru ini terjabarkan dengan tepat selaras dengan aturan induknya, yakni UU Cipta Kerja, dimana UU kontroversial ini turut berdampak pada UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH).

Di samping itu, penulis juga mencermati sejumlah isu krusial pada PP ini yang perlu dikritisi sebagai bahan masukan demi peningkatan penyelenggaraan jaminan produk halal.

Pertama, aspek struktur. Bila disandingkan antara PP No. 39/2021 dengan PP No 33/2014, maka akan kita dapati perbedaan mencolok pada PP PP No. 39/2021, dimana PP ini mencantumkan penjabaran

peraturan pelaksanaan terkait Pelaku Usaha, Pengajuan Permohonan dan Perpanjangan Sertifikat Halal, Label Halal dan Keterangan Tidak Halal, Peran Serta Masyarakat, Layanan Berbasis Elektronik, serta Penjabaran Sanksi Administratif. Muatan PP ini lebih kompleks ketimbang PP sebelumnya.

Kedua, aspek substansi. Semua perubahan dalam UU Cipta Kerja telah tertuang dalam PP No. 39/2021. Misalnya, pasal 42 UU Cipta Kerja ihwal perpanjangan sertifikat halal diatur penyelenggaraannya dalam Pasal 82-83 PP No. 39/2021.

Kemudian, Pasal 44 UU Cipta Kerja terkait biaya sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil diatur penyelenggaraannya dalam PP Pasal 81 dan Pasal 86. Selain itu, aturan mengenai jangka waktu permohonan sertifikat halal yang diatur dalam Pasal 29 UU Cipta Kerja, penyelenggaraannya diatur dalam PP Pasal 50 sampai dengan Pasal 58.

Masih terkait aspek substansi, penulis juga mencermati bahwa terdapat

Catatan Kritis terhadap PP No. 39 / 2021 ... (2)

sejumlah isu krusial yang perlu dikoreksi sehingga dalam implementasinya, PP ini bisa bekerja memadai dalam mendukung penyelenggaraan jaminan produk halal.

Pertama, perihal LPH dan Auditor Halal. Dalam PP terbaru, turut ditambahkan pengaturan mengenai pembentukan Tim Akreditasi Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), tugas, dan unsur-unsur Tim Akreditasi LPH.

Namun sayangnya, PP terbaru ini membatasi Auditor Halal sehingga hanya dapat terdaftar pada satu LPH (Pasal 39 ayat (2)). Padahal, Auditor

Halal adalah profesi khusus dan semestinya tidak membatasi mereka hanya pada 1 LPH semata.

Artinya, regulasi ini membatasi ruang aplikasi profesi bagi para Auditor Halal. Sebagai perbandingan, profesi pengacara, dokter, bidan, arsitek, psikolog dan lain-lain tidak mengenal pengaturan pembatasan hanya pada satu institusi pemberi kerja.

Sehingga, bila hendak membatasi, sebenarnya bisa dilakukan cukup dengan menetapkan jumlah maksimal di atas 1 (satu).

Dengan demikian, dalam Paragraf 4 terkait Registrasi Auditor Halal semestinya langsung dilakukan oleh Auditor Halal kepada BPJPH dengan mencantumkan nama-nama LPH tempat bekerja, bukan oleh LPH kepada BPJH.

Adapun pencabutan registrasi Auditor Halal tetap dilakukan oleh BPJPH dengan mengirimkan salinan berita pencabutan registrasi kepada LPH-LPH tempat Auditor Halal bekerja. Sebagai tambahan, penambahan jumlah izin/registrasi bagi Auditor Halal pada lebih dari 1 (satu) LPH akan memungkinkan penambahan jumlah yang dapat beroperasi.

Hal ini penting untuk mengakselerasi penyelenggaraan JPH mengingat jumlah Auditor Halal yang masih terbatas, khususnya mereka yang memiliki sertifikat kompetensi.

Kedua, terkait pengajuan permohonan dan perpanjangan sertifikat halal. Pasal 83 PP menetapkan persyaratan dokumen untuk perpanjangan sertifikat halal tidak menyertakan persyaratan dokumen laporan Penyelenggara Halal yang menguatkan bahwa tidak ada perubahan PPH dan komposisi insani dalam suatu produk. Padahal, dokumen ini



image Istimewa

seungguhnya perlu dipersyaratkan sebagai bukti dari surat pernyataan Pelaku Usaha bahwa benar tidak ada perubahan PPH dan komposisi.

Kemudian, substansi UU Cipta Kerja Pasal 44 dimaknai bahwa pemerintah dalam ini Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) menanggung biaya sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil.

Akan tetapi, Pasal 81 dan 86 PP No. 39/2021 memiliki tafsir yang bias sehingga potensi penundaan sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil selalu terbuka.

Pasal 81 ayat (1) berbunyi: "Dalam hal permohonan Sertifikat Halal diajukan oleh Pelaku Usaha mikro dan kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79, tidak dikenai biaya dengan mempertimbangkan

KUTIPAN

Bila dibandingkan antara PP No. 39/2021 dengan PP No 33/2014, maka akan kita dapati perbedaan mencolok pada PP PP No. 39/2021, dimana PP ini mencantumkan penjabaran peraturan pelaksanaan terkait Pelaku Usaha, Pengajuan Permohonan dan Perpanjangan Sertifikat Halal, Label Halal dan Keterangan Tidak Halal, Peran Serta Masyarakat, Layanan Berbasis Elektronik, serta Penjabaran Sanksi Administratif. Muatan PP ini lebih kompleks ketimbang PP sebelumnya.

Catatan Kritis terhadap PP No. 39 / 2021 ... (3)



image Istimewa

kemampuan keuangan negara.”

Pasal 81 ayat (1) mensyaratkan adanya kemampuan keuangan negara, sehingga bila terjadi kesulitan fiskal, maka pelaku usaha mikro dan kecil kemungkinan tidak bisa mendapatkan pembiayaan sertifikasi halal.

Kemudian dalam Pasal 86 berbunyi sebagai berikut: “Dalam hal permohonan Sertifikat Halal diajukan oleh Pelaku Usaha mikro dan kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1), pembiayaan dapat dilakukan juga dengan: a. anggaran pendapatan dan

belanja daerah;
b. pembiayaan alternatif untuk usaha mikro dan kecil;
c. pembiayaan dari dana kemitraan;
d. bantuan hibah pemerintah atau lembaga lain;
e. dana bergulir; atau
f. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.”

Sebagaimana dipaparkan, Pasal 86 menjabarkan sumber lain untuk pembiayaan sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil.

Walaupun demikian, ada yang luput dari PP No. 39/2021 ini. PP ini tidak mencantumkan

dengan jelas aturan mengenai tata cara pembiayaan sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro ataupun memandatkan pengaturannya melalui Peraturan BJPH, sebagaimana ditetapkan untuk pembayaran biaya sertifikasi halal bagi Pelaku Usaha (non-Mikro dan Kecil), seperti yang tercantum pada Pasal 85 ayat (6).

Supaya tidak bias, selayaknya Pasal 86 ditambahkan ayat yang mengatur tata cara pembiayaan sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil melalui Peraturan BJPH. Hal ini diperlukan agar tidak terjadi kebingungan di kalangan pelaku usaha mikro dan kecil mengenai sumber pembiayaan.

Ketiga, perihal label halal dan keterangan tidak halal.

Kewajiban mencantumkan keterangan tidak halal pada produk yang berasal dari bahan yang diharamkan adalah penting (Pasal 93 dan 94). Sayangnya, hal ini tidak diikuti dengan pemberian kewenangan yang kuat bagi BJPH untuk menjatuhkan sanksi administratif yang tegas terhadap pelaku usaha (Pasal 150).

Sebaliknya, BJPH hanya berwenang menjatuhkan sanksi administratif berupa peringatan tertulis bagi Pelaku Usaha yang

tidak mencantumkan keterangan tidak halal pada produk. Sementara, BJPH tidak berwenang menjatuhkan sanksi penarikan barang maupun denda administratif atas pelanggaran Pasal 93.

Dalam Pasal 93 PP PP No. 39/2021 disebutkan: “Produk yang berasal dari Bahan yang diharamkan wajib mencantumkan keterangan tidak halal berupa gambar, tulisan, dan/atau nama Bahan dengan warna yang berbeda pada komposisi bahan,”

Kemapat, ihwal peran serta masyarakat dan sanksi administratif. Dalam UU Cipta Kerja bidang Jaminan Produk Halal (perubahan pada Pasal 55) dinyatakan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara peran serta masyarakat diatur dalam Peraturan Pemerintah. Namun demikian, tidak ditemukan penjabaran dari Pasal 55 UU Cipta Kerja melalui PP No. 39/2021 ihwal pengaturan penyelenggaraan tata cara peran serta masyarakat.

KUTIPAN

Pencabutan registrasi Auditor Halal tetap dilakukan oleh BJPH dengan mengirimkan salinan berita pencabutan registrasi kepada LPH-LPH tempat Auditor Halal bekerja. Sebagai tambahan, penambahan jumlah izin/registrasi bagi Auditor Halal pada lebih dari 1 (satu) LPH akan memungkinkan penambahan jumlah yang dapat beroperasi. Hal ini penting untuk mengakselerasi penyelenggaraan JPH mengingat jumlah Auditor Halal yang masih terbatas, khususnya mereka yang memiliki sertifikat kompetensi.

Catatan Kritis terhadap PP No. 39 / 2021 ... (Tamat)

KUTIPAN

ihwal peran serta masyarakat dan sanksi administratif. Dalam UU Cipta Kerja bidang Jaminan Produk Halal (perubahan pada Pasal 55) dinyatakan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara peran serta masyarakat diatur dalam Peraturan Pemerintah. Namun demikian, tidak ditemukan penjabaran dari Pasal 55 UU Cipta Kerja melalui PP No. 39/2021 ihwal pengaturan penyelenggaraan tata cara peran serta masyarakat. Anehnya, beleid dalam PP hanya memuat pengurangan isi UU Cipta Kerja Pasal 55.

Anehnya, beleid dalam PP hanya memuat pengurangan isi UU Cipta Kerja Pasal 55. Sementara, perihal sanksi administratif pada Pasal 149 dinyatakan bahwa pelanggaran terhadap penyelenggaraan jaminan produk halal dikenakan sanksi administratif.

Kemudian dalam Pasal 56 UU Cipta Kerja juga dinyatakan bahwa pelaku usaha yang tidak menjaga kehalalan produknya setelah memperoleh sertifikat halal, terancam dipidana dengan pidana penjara paling

lima (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2 miliar. Sementara, dalam PP No. 39/2021 Pasal 149 ayat (6) tercantum bahwa denda administratif paling banyak Rp. 2 miliar.

Artinya, antara pidana denda dan sanksi administrasi dalam bentuk denda bisa dikatakan tidak ada perbedaan.

Penutup dan Rekomendasi PP No. 39/2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal sudah cukup jelas menjabarkan

mandat dari UU Jaminan Produk Halal dan UU Cipta Kerja.

Meskipun demikian, masih ada sedikit yang perlu dipertimbangkan untuk peningkatan penyelenggaraan JPH ke depan, antara lain:

- Pembatasan jumlah registrasi Auditor Halal perlu dinaikkan untuk memberi kesempatan Auditor Halal menjalankan profesinya secara maksimal, tidak hanya pada 1 (satu) LPH saja.

- Menambah jumlah LPH yang dapat beroperasi untuk memungkinkan akselerasi penyelenggaraan JPH. Hal ini penting mengingat jumlah Auditor Halal masih terbatas, apalagi Auditor Halal yang memiliki sertifikat kompetensi
- Pada Pasal 86 perlu ditambahkan ayat yang mengatur tata cara pembiayaan sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil melalui Peraturan BPJPH.

Hal ini diperlukan agar tidak terjadi kebingungan di kalangan pelaku usaha mikro dan kecil mengenai prosedur yang harus dilalui untuk bisa memenuhi persyaratan "pernyataan halal" tersebut.

- BPJPH perlu menjembatani Lembaga LPH negara non-muslim yang menggunakan jalur B-to-B.



image Istimewa



PKS



**Akun Facebook Official
Fraksi PKS DPR RI**

BERPINDAH

dari **Fraksi PKS DPR RI**
menjadi

FPKS DPR RI



fraksi.pks.id



FPKS DPR RI



fraksipksdprri



@fpksdprri



PKS TV DPR RI

Kunjungi Dapil, Aleg PKS Usulkan Desa Guranteng Masuk Daftar Strategi Pengembangan Wilayah Pariwisata

KUTIPAN

Jakarta (10/06) — Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi PKS, Toriq Hidayat meminta agar Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) memperhatikan potensi kawasan wisata di dapilnya.

Menurut Toriq, Desa Guranteng yang terletak di Kabupaten Tasikmalaya dapat dimasukkan ke dalam Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah Tahun Anggaran 2022.

"Desa Guranteng mempunyai potensi yang sangat bagus. Baik potensi Sumber Daya Manusia (SDM) yang kreatif maupun Sumber Daya Alam (SDA) yang Indah. Kombinasi keduanya menghasilkan 12 buah destinasi wisata yang sangat berpotensi menjadi Kawasan strategis," ungkap Politisi PKS ini.

Hal ini ini disampaikan oleh Toriq saat menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP)

Komisi V DPR RI dengan Kepala BPIW Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI di Gedung DPR RI dengan agenda Evaluasi Pelaksanaan APBN TA 2021 dan membahas alokasi Pagu Indikatif TA 2022 (07/06/2021).

"Ada 12 potensi wisata di desa ini yakni Wisata Kampung Sapi, Wisata Pasir Kirisik, Wisata Wahana Alam Parung, Agrowisata Bukit Jangihe, Wisata Paralayang Pasir Gowong, Wisata Bumi Perkemahan Pasir Jeungjing, Wisata Budaya Pencak Silat dan Wayang Golek," ungkapnya.

Kemudian Toriq menambahkan, berikutnya

Wisata Agrowisata Gunung Jugul, Wisata Embung Desa (Bendungan Desa), Wisata Titik 0 KM Citanduy, Wisata Kebun Pinus dan Kebun Kopi, Wisata Budaya Situs Batu Bokor. Apalagi, baru saja Desa Guranteng masuk sebagai finalis Desa Wisata Award Tahun 2021 kategori Desa Wisata Berbasis Kreatif.

"Di masa Pandemi saat ini banyak desa wisata yang turun pendapatannya bahkan terpaksa ditutup. Berbeda dengan destinasi wisata di Desa Guranteng, didukung SDM kreatif mereka bertahan di masa normal baru dengan menangkap peluang-peluang industri wisata dengan mengoptimalkan sumber daya alam yang ada," ungkap Toriq.

"Saya kira, tambahnya lagi, Desa Guranteng memiliki persyaratan untuk untuk dikembangkan sebagai kawasan strategis destinasi wisata tingkat nasional," ungkapnya. Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id



KH. TORIQ HIDAYAT, Lc

Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Jawa Barat XI

"Di masa Pandemi saat ini banyak desa wisata yang turun pendapatannya bahkan terpaksa ditutup. Berbeda dengan destinasi wisata di Desa Guranteng, didukung SDM kreatif mereka bertahan di masa normal baru dengan menangkap peluang-peluang industri wisata dengan mengoptimalkan sumber daya alam yang ada"

Hadiri Acara Milad Ke 4 Sekolah di Dapil Nevi **Berpesan** Tingkatkan Kualitas Pendidikan

KUTIPAN

Pasaman (02/06) -- Anggota DPR RI dari Fraksi PKS Komisi VI Dapil Sumbar II SD IT Darul Azzam peringati Milad ke empat seiring peresmian Ruang Kelas Baru (RKB) yang dihadiri Hj. Nevi Zuairina sembari mendengarkan kajian atau tausiyah dari Muhammad Ustman Ansori, yang biasa dipanggil Koko Liem.

Kegiatan Milad dilaksanakan oleh Yayasan Darul Azzam dengan melibatkan wali siswa dan undangan lainnya dari Tokoh Masyarakat Rao, Guru Pendidik dan Majelis Taklim dengan tetap mematuhi protokol kesehatan Covid 19, mulai dari Pengecekan suhu peserta dan Memakai masker serta menjaga jarak.

Seiring waktu SD IT Darul Azzam terus berkembang dalam memberikan pendidikan kepada anak, kegiatan-kegiatan yang dirasa perlu merangsang minat siswa dilakukan mulai dari menyediakan fasilitas hingga guru yang berkompeten dibidangnya, dimilad ke empat ini SD IT Darul Azzam dapat

melaksanakan peresmian ruang kelas baru, tentunya tidak terlepas dari animo masyarakat terhadap pendidikan yang diberikan oleh SD IT Darul Azzam.

Pada kesempatan ini, Nevi Zuairina berkesempatan memberikan sambutan pada acara peringatan milad Lembaga pendidikan ini.

"Ramadhan yang baru saja berlalu memberikan pelajaran amat berarti kepada kita. Satu di antaranya adalah mendidik kita untuk menjadi pribadi yang mulia, keluarga yang mulia, bangsa yang mulia dan umat yang mulia. Allah swt telah menciptakan kita sebagai manusia yang mulia. Lahir dalam keadaan bersih tanpa

dosa dan memiliki warna dasar bertauhid atau beriman kepada Allah swt. Namun, berbagai kepentingan duniawi membuat manusia berambisi pada sesuatu hingga menghalalkan segala cara, lalu tercorenglah kemuliaan dirinya, keluarga, masyarakat, bangsa hingga sebagai umat Islam", urai Nevi dalam sambutannya.

Legislator asal Sumbar ini sangat bangga atas keberadaan SD IT Darul Azzam yang memulai proses belajar mengajar sekitar tahun 2017 dengan 7 orang siswa, tercatat hingga sekarang siswa mencapai 68 orang ditambah 25 siswa baru. Selain ruang kelas baru, SDIT Darul Azzam terus berbenah demi kenyamanan siswa dalam mengikuti proses belajar dengan membangun fasilitas umum seperti tempat berwudhu, toilet, dan pagar demi kenyamanan dan keamanan para siswa.

"Apresiasi sebesar-besarnya atas capaian SD IT Darul Azzam yang telah dicapai selama ini, semoga dimasa yang akan datang, kita terus menjalin silaturahmi dengan konstituenya walau tidak dalam masa kampanye. Selain



Hj. NEVI ZUAIRINA

Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Sumatera Barat II

"Apresiasi sebesar-besarnya atas capaian SD IT Darul Azzam yang telah dicapai selama ini, semoga dimasa yang akan datang, kita terus menjalin silaturahmi dengan konstituenya walau tidak dalam masa kampanye."

dari itu, setiap kontribusi dari pihak manapun dalam pembangunan SD IT Darul Azzam, mudah-mudahan semakin berkah dan menambah kualitas pendidikan seiring dengan perkembangan zaman", ucap Nevi.

Politisi PKS ini terus menekankan untuk semua yang hadir agar memperkuat komitmen memperbaiki hubungan diantara sesama muslim karena amat penting dalam kehidupan sehari-hari.

Kundapil di Depok

Nur Azizah Lakukan Silaturahmi Kebangsaan Bersama Para Tokoh agama Kristiani

KUTIPAN

Depok – Anggota Komisi VIII DPR RI Hj. Nur Azizah Tamhid, B.A.,M.A. mengunjungi Para Tokoh Agama Kristiani di Kota Depok. Kegiatan ini dilakukan dalam rangkaian agenda Kunjungan Daerah Pemilihan (Kundapil) di Gereja BNKP Depok pada Sabtu (15/5).

Kegiatan ini bertemakan sosialisasi dan silaturahmi kebangsaan sekaligus memperkenalkan Visi, Misi, Mars serta Hymne baru Partai Keadilan Sejahtera (PKS) kepada masyarakat.

Pada agenda silaturahmi dengan Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia Setempat (PGIS) Kota Depok yang turut dihadiri oleh perwakilan pendeta dari beberapa kecamatan di Depok serta perwakilan dari Forum Kerukunan antar Umat Beragama (FKUB), Nur Azizah menyebutkan bahwa PKS merupakan Partai Islam yang memiliki visi sebagai partai Islam rahmatan lil alamin,

artinya berjuang membangun kebaikan bagi seluruh rakyat Indonesia, tidak memandang suku, agama dan golongan tertentu.

“Sebagaimana dalam Visi PKS sebagai Partai Islam Rahmatan Lil Alamin. Kita membawa misi kebaikan bagi seluruh rakyat Indonesia, khususnya bagi seluruh umat beragama. Fraksi PKS di DPR RI sangat peduli akan keamanan dan kenyamanan seluruh umat beragama di Indonesia. Karenanya PKS konsisten mendorong RUU Perlindungan Tokoh Agama dan Simbol Agama, yang alhamdulillah RUU

tersebut saat ini sudah masuk kedalam satu dari 33 program legislasi nasional tahun 2021”, papar Nur Azizah.

Nur Azizah turut menambahkan, bahwa Fraksi PKS tidak bisa berjuang sendiri untuk dapat meloloskan RUU tersebut, perlu dukungan serius dari partai lain juga dari masyarakat sipil yaitu ormas dan berbagai organisasi keagamaan untuk terus menyuarakan agar RUU ini segera disahkan menjadi Undang-undang. Menurut Nur Azizah hal ini sangat penting untuk segera disahkan, agar tidak ada lagi tindakan persekusi baik kepada para tokoh agama maupun berbagai bentuk pelecehan simbol-simbol keagamaan.

Pada kesempatan ini para tokoh sangat menyambut baik kehadiran Nur Azizah. Salah satunya Lupianto, selaku perwakilan dari pengurus FKUB. Ia berharap agar RUU Perlindungan Tokoh Agama dan Simbol Agama segera dapat



Hj. NUR AZIZAH TAMHID, B.A.,M.A.
Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Jawa Barat VI

“Sebagaimana dalam Visi PKS sebagai Partai Islam Rahmatan Lil Alamin. Kita membawa misi kebaikan bagi seluruh rakyat Indonesia, khususnya bagi seluruh umat beragama. Fraksi PKS di DPR RI sangat peduli akan keamanan dan kenyamanan seluruh umat beragama di Indonesia”

disahkan agar seluruh umat beragama di Indonesia dapat beribadah dengan tenang, tanpa ada rasa khawatir. Sementara itu, apresiasi akan kehadiran Nur Azizah turut datang dari Pendeta Bebalazi Zega, Ketua

Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia Setempat Kota Depok. Ia bersyukur dan merasa sangat bahagia atas kunjungan Nur Azizah.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id

Profil

- Nama Lengkap
Drs. H. Adang Daradjatun
- Tempat, Tanggal Lahir
Bogor, 13 Mei 1949
- Dapil
DKI Jakarta III

Pendidikan

- **SMAN 1 Jakarta (Boedi Oetomo)**
- **SMAN 3 Bandung**
- **AKPOL**
- **PTIK**
- **SESPIM**
- **SESKO**

Media Sosial

- **f** : **Adang Daradjatun**
- **@** **adangdaradjatun_**
- **adangdaradjatun.id**

Riwayat Pekerjaan

- **Kabag Sosbud Direktorat Intelljen & Pengamanan Polda Metro Jaya, 1986.**
- **Kabag Sospol Direktorat Intelljen & Pengamanan Polri, 1987.**
- **Kabag Pengawasan Senjata Api & Bahan Peledak Direktorat Intelljen & Pengamanan Polri, 1989.**
- **Kepala Direktorat Intelljen & Pengamanan Polda Maluku, 1990.**
- **Wakil Kepala Subdirektorat Pengawasan Senjata Api & Bahan Peledak Direktorat Intelljen & Pengamanan Polri, 1992.**
- **Instruktur Utama (tenaga pendidik) di PTIK, 1993.**
- **Perwira Pembantu III / Perencanaan Program dan Anggaran Srena POLRI, 1994.**
- **Wakil Asisten Perencanaan dan Anggaran Kapolri (1 April 1997) Asisten Perencanaan dan Anggaran Kapolri (5 Juli 1997) Kapolda Jawa Barat, 2000**
- **Staf Ahli Kapolri, 2001**
- **Kababinkam, 2002**
- **Wakapolri, 2004**
- **Anggota DPR RI, 2009-2014, 2014-2019, 2019-2024**

Keluarga

- Istri : **Nunun Nurbaeti**
- Anak : **3 Laki-Laki**
1 Perempuan

Riwayat Organisasi

- **Dewan Pembina PABSI (Persatuan Angkat Besi Seluruh Indonesia)**
- **Ketua Umum PDDI (Perhimpunan Donor Darah Indonesia)**
- **Ketua Ikatan Remaja Kebayoran**
- **Ketua Badan Musyawarah Masyarakat Sunda**



ADANG DARADJATUN

Hadiri Halal Bi Halal Di Dapil, Anis Ingatkan Tiga Aspek Kunci Kemenangan

KUTIPAN

Jakarta (07/06) --- Anggota DPR RI Fraksi PKS dari daerah pemilihan Jakarta Timur, Anis Byarwati, menghadiri acara Halal Bi Halal yang diadakan oleh pengurus Dewan Pengurus Cabang (DPC) PKS Pulogadung dan DPC PKS Cipayang pada Sabtu (5/6/2021).

Momen halal bi halal ini dimanfaatkan oleh pengurus dan anggota PKS untuk berbagi pesan dan nasehat dari para tokoh dan senior anggota partai.

Dalam kesempatan ini, Anis menyampaikan apresiasi kepada pengurus DPC yang telah berinisiatif menyelenggarakan halal bi halal sebagai ajang silaturahmi anggota PKS.

Silaturahmi sebagai kegiatan yang positif perlu dijadikan kegiatan rutin anggota PKS, baik dengan sesama anggota maupun dengan masyarakat luas.

“Selain keutamaan-keutamaan yang disampaikan dalam hadits Rasulullah SAW

bahwa silaturahmi dapat memanjangkan umur dan meluaskan rizki, dengan silaturahmi kita juga dapat melihat dan mendengar langsung kondisi masyarakat disekitar kita,” ujar Anis.

Sebagai partai Islam rahmatan lil ‘alamin, PKS sudah seharusnya berada di depan dalam mendengar dan berkhidmat untuk rakyat.

Berbicara secara khusus kepada pengurus PKS, Ketua DPP PKS Bidang Ekonomi dan Keuangan ini mengingatkan bahwa pengurus DPC adalah bagian dari keluarga besar PKS seluruh Indonesia. Demikian juga dengan pengurus DPD dan DPW.

“Karena kita berada

dalam satu keluarga besar PKS, maka kita memiliki satu tujuan yang jelas yaitu meraih ridho Allah dan bekerja untuk kesejahteraan masyarakat,” kata Anis.

Anis juga mengingatkan bahwa kepercayaan sebagai pengurus yang diberikan oleh struktur partai, sesungguhnya merupakan Amanah yang diberikan oleh Allah SWT yang harus dijaga dan tidak boleh dikhianati.

“Cara kita bersyukur terhadap Amanah Allah adalah dengan melakukan pekerjaan-pekerjaan kita dengan sebaik mungkin. Pantang bagi anggota PKS untuk bekerja ala kadarnya,” papar Anis.

Lebih lanjut, politisi senior PKS ini menjelaskan bahwa setiap partai politik memiliki cita-cita untuk meraih kemenangan. Kemenangan hakiki bukan hanya diukur dari perolehan suara, akan tetapi kemenangan yang mampu dipertanggungjawabkan di hadapan Allah SWT. Anis pun mengurai 3 aspek kemenangan yaitu pertama kekuatan iman dan keyakinan kepada Allah SWT. Aspek ini menuntut anggota PKS untuk terus



Dr. Hj. ANIS BYARWATI, S.Ag., M.Si
Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil DKI Jakarta I

“Selain keutamaan-keutamaan yang disampaikan dalam hadits Rasulullah SAW bahwa silaturahmi dapat memanjangkan umur dan meluaskan rizki, dengan silaturahmi kita juga dapat melihat dan mendengar langsung kondisi masyarakat disekitar kita:”

meningkatkan imannya.

“Sejarah membuktikan bahwa kemenangan tidak hanya diraih oleh kekuatan fisik yang terlihat, akan tetapi bagian besarnya ditentukan oleh kekuatan spiritual para pelakunya,” ungkap Anis.

Kedua, kekuatan

persaudaraan/ikatan hati baik dengan sesama anggota partai maupun dengan masyarakat luas. Kekuatan iman yang dimiliki sendiri-sendiri, menjadi tidak berimplikasi besar jika tidak dipersatukan.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id

Kunjungan Kerja di Dapil, Syaikhul Berikan Bantuan Beras kepada Tokoh Masyarakat

KUTIPAN

Purwakarta (09/06) — Anggota DPR RI Ahmad Syaikhul memberikan bantuan beras kepada tokoh masyarakat dari berbagai desa di Purwakarta.

Kegiatan itu dilaksanakan Syaikhul dalam agenda Kunjungan Kerja Perorangan di Purwakarta, (04-06/06/2021).

Menurut Syaikhul, bantuan ini diberikan karena kondisi ekonomi masyarakat saat ini yang butuh perhatian. Situasi ini terjadi akibat Pandemi Covid-19 yang berdampak pada sektor ekonomi.

"Dampak Pandemi Covid-19 ini membuat kehidupan ekonomi masyarakat dalam kondisi sulit," ujar Syaikhul.

Dengan bantuan ini, Syaikhul berharap bisa membantu sedikit kesulitan yang sedang masyarakat hadapi.

"Bantuan beras ini tidak seberapa. Mudah-mudahan

dapat meringankan beban ekonomi masyarakat," kata Syaikhul lagi.

Syaikhul mengajak tokoh masyarakat yang hadir untuk melakukan upaya-upaya inovatif dan kreatif untuk mengatasi masalah ekonomi.

"Salah satu cara agar persoalan ekonomi ini bisa kita atasi adalah dengan melakukan upaya-upaya inovatif dan kreatif," ungkap Syaikhul yang merupakan Anggota DPR RI dari Dapil VII Jawa Barat yang meliputi Kabupaten Bekasi, Karawang dan Purwakarta.

Kunker ini dilaksanakan selama tiga hari. Ada 7 desa yang menjadi titik kegiatan. Yakni Desa Cibodas, Desa Pasirangin, Desa Cempaka,



H. AHMAD SYAIKHUL

Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Jawa Barat VII

"Bantuan ini diberikan karena kondisi ekonomi masyarakat saat ini yang butuh perhatian. Situasi ini terjadi akibat Pandemi Covid-19 yang berdampak pada sektor ekonomi. Dampak Pandemi Covid-19 ini membuat kehidupan ekonomi masyarakat dalam kondisi sulit"



FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA



Salurkan
ASPIRASI ANDA
DI HARI ASPIRASI
FRAKSI PKS DPR RI

Kegiatan Aspirasi dilaksanakan
setiap Selasa dan Jum'at.

Ajuan Aspirasi

Isi via website form : <https://fraksi.pks.id/form-aspirasi-2/>

Terima Aspirasi dari TKBM, Aleg PKS Kritis Pemberhentian Paksa Buruh Angkut Pelabuhan

KUTIPAN

Jakarta (05/06) --- Anggota DPR RI dari Fraksi PKS, Hamid Nur Yasin menerima aspirasi dari perwakilan Tenaga Kerja Bongkat Muat (TKBM) Tunas Bangsa Mandiri, Kendari untuk mendengarkan aspirasi dan pengaduan terkait polemik yang baru baru ini terjadi di Pelabuhan New Port, Kendari.

Hamid Nur Yasin, selaku Anggota Komisi 5 yang berfokus pada sektor transportasi dan kementerian perhubungan menyampaikan bahwa permasalahan ini sangatlah miris dan memprihatinkan.

"Polemik pengambilan hak kerja yang dimiliki oleh TKBM Tunas Bangsa Mandiri oleh PT Pelindo merupakan permasalahan yang sangat miris padahal, hak kerja yang berada dibawah kendali TKBM Tunas Mandiri sudah lama berjalan. Sehingga kami selaku

Wakil Rakyat yang diamanahkan di Komisi 5 sangatlah prihatin atas hal yang terjadi di pelabuhan tersebut," tukas Hamid.

Lebih lanjut, Hamid menyampaikan bahwa hal ini menguji empati dan kepedulian kita semua sesama warga Indonesia.

"Tentu hal ini sangat menguji empati dan kepedulian kita semua, karena tadi yang saya dengar bahwa akibat adanya pengambilan otoritas bongkar muat ini menyebabkan

400 anggota TKBM Tunas Mandiri tidak dapat bekerja, ini bukanlah angka yang kecil terlebih pasti dari 400 anggota tersebut ada keluarga yang menggantungkan hidupnya pada mereka," pungkas Aleg FPKS tersebut.

Selanjutnya, Hamid menyampaikan ke depan polemik ini menjadi konsen kita sekaligus untuk empati, simpati dan peduli terhadap masyarakat bungkutoko yang terdampak atas permasalahan ini.

"Kedepan, saya meminta kepada tim untuk membuat risalah rapat dari aspirasi hari ini untuk nantinya akan kita bahas lebih lanjut di komisi 5 kemudian nantinya akan kita angkat dan komunikasikan ke pimpinan komisi 5. Nantinya hal ini akan menjadi konsen kita dalam penyelesaiannya dengan strategis dan taktis mengacu dari risalah rapat hari ini," tutup Hamid.



Drs. HAMID NOOR YASIN, M.M.

Anggota Komisi V DPR RI

"Polemik pengambilan hak kerja yang dimiliki oleh TKBM Tunas Bangsa Mandiri oleh PT Pelindo merupakan permasalahan yang sangat miris padahal, hak kerja yang berada dibawah kendali TKBM Tunas Mandiri sudah lama berjalan. Sehingga kami selaku Wakil Rakyat yang diamanahkan di Komisi 5 sangatlah prihatin atas hal yang terjadi di pelabuhan tersebut,"

Terima Aspirasi Bupati Berau, Aleg PKS : Kabupaten Berau Harus Lebih Diperhatikan

KUTIPAN

Diawal agenda aspirasi tersebut dibuka dengan pemaparan Kabupaten Berau secara garis luas oleh Bupati Berau. Ia menyampaikan bahwa Berau mempunyai banyak aspek Sumber Daya Alam (SDA) yang bisa dimanfaatkan di Kabupaten Berau.

Jakarta (06/08), Anggota DPR RI FPKS, Alifudin menerima kunjungan aspirasi yang disampaikan oleh Bupati Kabupaten Berau, Kalimantan Timur, Sri Jurniasih.

Diawal agenda aspirasi tersebut dibuka dengan pemaparan Kabupaten Berau secara garis luas oleh Bupati Berau. Ia menyampaikan bahwa Berau mempunyai banyak aspek Sumber Daya Alam (SDA) yang bisa dimanfaatkan di Kabupaten Berau.

"Jadi ini pak Alif Berau itu mempunyai banyak SDA mulai dari tambang, terasi juga itu sebenarnya dari Berau pak cuma mereka sudah terlanjur di

kontrak sama tengkulak dari Lombok jadi ya yang terkenal terasi Lombok bukan Berau, nah itu pak sebenarnya kita punya banyak SDA yang dapat dimanfaatkan," tutur Sri.

Namun, lebih lanjut Sri menyampaikan bahwa SDA yang banyak belum dapat dioptimalkan karena Sumber Daya Manusianya yang kurang mumpuni.

"Nah, memang sekarang PR kita itu di SDM pak, kenapa SDA kita belum maksimal karena SDMnya juga yang belum maksimal. Sehingga fokus kami saat ini memang pada bidang pemberdayaan ekonomi dan pembinaan

UMKM. Sehingga, SDA yang ada di Berau dapat diberdayakan untuk kegiatan ekonomi oleh masyarakat Berau itu sendiri," pungkas Bupati Perempuan Pertama Berau tersebut.

Setelah sesi pemaparan oleh Bupati Berau, Alifudin menyampaikan bahwa Berau mempunyai potensi yang besar untuk menjadi Kabupaten yang maju dengan pariwisata dan SDA yang dimilikinya, sehingga menurutnya Berau adalah wilayah yang harus lebih diperhatikan oleh Pemerintah Pusat.

"Ya, saya melihat disini memang banyak sekali potensi yang dimiliki oleh Kabupaten Berau mulai dari sektor pariwisata, sumber daya alam, dll. Sehingga, ini harus benar benar dimaksimalkan dan tentunya membutuhkan support dari banyak pihak. Maka dari itu, seharusnya Kabupaten Berau harus lebih diperhatikan oleh kita semua untuk memaksimalkan potensi yang dimiliki oleh Berau," tutup Anggota komisi IX tersebut.



H. ALIFUDIN, S.E.,M.M

Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Kalimantan Barat I

"Ya, saya melihat disini memang banyak sekali potensi yang dimiliki oleh Kabupaten Berau mulai dari sektor pariwisata, sumber daya alam, dll. Sehingga, ini harus benar benar dimaksimalkan dan tentunya membutuhkan support dari banyak pihak. Maka dari itu, seharusnya Kabupaten Berau harus lebih diperhatikan oleh kita semua untuk memaksimalkan potensi yang dimiliki oleh Berau"

Fraksi PKS Terima Aspirasi Wagub Papua Barat

KUTIPAN

Jakarta (03/06)—Anggota FPKS DPR RI Komisi XI, Junaidi Auly menghadiri hari aspirasi yang diselenggarakan Fraksi PKS untuk mendengarkan aspirasi dari perwakilan Masyarakat Papua Barat, Kamis, (03/06).

Junaidi Auly selaku Koordinator FPKS untuk Panitia Khusus Revisi Kedua UU Otonomi Khusus Papua mengatakan bahwa yang disampaikan oleh masyarakat Papua bisa dijadikan referensi yang sangat berguna dan patut diperjuangkan.

“Poin-poin penting ini juga menjadi bahan kita, apakah kita ingin mengusulkan pada lebih dari 2 pasal yang direvisi. Sekali lagi saya terima kasih karena telah membantu menjadi bahan referensi kami” Ucap Junaidi.

Mohammad Lakotani selaku Wakil Gubernur Papua Barat yang hadir pada saat hari aspirasi, juga merasa bahwa momentum revisi UU Otonomi Khusus ini menjadi momentum yang dimanfaatkan sebaik-baiknya. Beberapa usulan juga

disampaikan sebagai pertimbangan perbaikan UU Otonomi Khusus Papua, seperti permasalahan dana infrastruktur, kewenangan Pemerintahan Provinsi, pemekaran Papua, serta pembentukan Partai Politik lokal.

“Tambahkan dana untuk infraskrutur, yang berlaku sekarang itu infrastruktur itu hanya perhubungan. Kalau boleh ditambah juga dengan energi listrik, air bersih, telekomunikasi, perumahan, dan sanitasi. Permasalahan besar di Papua itu kesehatan, tapi dana kesehatan di Papua dan Papua Barat hanya habis untuk infrastruktur” Ujar Lakotani.



Dr. Ir. H. A. JUNAIDI AULY, M.M.

Koordinator FPKS untuk Panitia Khusus Revisi Kedua
UU Otonomi Khusus Papua

“Yang disampaikan oleh masyarakat Papua bisa dijadikan referensi yang sangat berguna dan patut diperjuangkan. Poin-poin penting ini juga menjadi bahan kita, apakah kita ingin mengusulkan pada lebih dari 2 pasal yang direvisi. Sekali lagi saya terima kasih karena telah membantu menjadi bahan referensi kami”

Terima Aspirasi Masyarakat Papua.

Aleg PKS: UU Otsus Harus Mampu Menyejahterakan Papua

KUTIPAN

Jakarta (11/6) — Anggota DPR RI FPKS, Rofik Haryanto menerima kunjungan aspirasi dari Bupati Jayapura, Mathius Awoitauw dan beberapa tokoh masyarakat Papua

Agenda hari aspirasi ini diawali dengan penyampaian pandangan dan aspirasi dari Bupati Jayapura Mathius Mathius Awoitauw. Ia menyampaikan beberapa hal dengan topik utama terkait dengan Revisi UU Otonomi Khusus (Otsus).

"Kami datang kesini untuk menyampaikan dan mendukung pemerintah pusat dalam merevisi Otsus yang telah berjalan selama 20 tahun, kami menyadari bahwa selama perjalanan panjangnya UU Otsus mempunyai banyak catatan dan evaluasi yang harus dilakukan, sehingga saya meminta kepada Fraksi PKS untuk membantu perjuangan masyarakat Papua dalam merevisi UU Otsus ini," tukas Mathius.

Selain itu, Mathius menggarisbawahi hal yang

menjadi catatan dalam perjalanan Otsus selama ini, ia menyampaikan dua hal penting mengapa mendukung adanya revisi UU Otsus sesuai dengan praktik yang telah terjadi.

"Pertama, UU Otsus ini belum mampu menyejahterakan masyarakat Papua secara maksimal. Kedua, UU Otsus belum mampu memberikan kepastian hukum dan tata kelola anggaran Otsus yang diberikan oleh Pemerintah Pusat," jelas Mathius.

Setelah Bupati Papua menyampaikan Aspirasinya, Rofik memberikan tanggapan selaku Panitia Khusus (Pansus) yang ditugaskan untuk mengurus Otsus Papua. Rofik menyampaikan bahwa ia berharap Otsus Papua harus merepresentatifkan kepentingan masyarakat Papua.

"Kami di Pansus sangat mendukung adanya revisi dari Otsus Papua terutama poin-poin yang merugikan masyarakat Papua. Kami juga terus menggali masukan dari masyarakat Papua agar nantinya kami berharap Otsus ini mampu merepresentatifkan kepentingan masyarakat Papua sebagai masyarakat yang paling berkepentingan dan berdampak dari UU Otsus ini," pungkas Rofik.

Selain itu, Rofik juga menyampaikan beberapa rekomendasi terkait Otsus, ia juga menyampaikan bahwa pentingnya akselerasi dalam penyelesaian revisi Otsus ini.

"Maka dengan ini kami menyampaikan rekomendasi agar masyarakat Papua untuk senantiasa mengawal dan menyampaikan hal hal penting dalam revisi UU Otsus ini, karena penting sekali untuk menyerap saran dan aspirasi dari masyarakat Papua itu sendiri.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id



H. ROFIK HANANTO, S.E.

Anggota Pansus UU Otonomi Khusus Papua DPR RI

"Kami di Pansus sangat mendukung adanya revisi dari Otsus Papua terutama poin-poin yang merugikan masyarakat Papua. Kami juga terus menggali masukan dari masyarakat Papua agar nantinya kami berharap Otsus ini mampu merepresentatifkan kepentingan masyarakat Papua sebagai masyarakat yang paling berkepentingan dan berdampak dari UU Otsus ini"



*You Stay At Home,
We Stay At Parliament*



Tuntut Keadilan Hukum bagi Habib Rizieq dan Adi Hidayat, HNW: Jangan Lagi Ada Diskriminasi Hukum

KUTIPAN

Jakarta (05/06) — Anggota DPR sekaligus Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid mengingatkan penting tegaknya hukum yang berkeadilan karena Indonesia adalah Negara Pancasila dan Negara Hukum

apalagi yang berkaitan dengan tokoh panutan umat, seperti Habib Rizieq Syihab dan Ustadz Adi Hidayat yang saat ini sedang menuntut keadilan.

Dalam kasus Habib Rizieq, HNW sapaan akrabnya mengkritik tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) 6 tahun penjara kepada Habib Rizieq Shihab dalam kasus Swab Rumah Sakit Ummi sebagai bentuk ketidakadilan dan menghadirkan kembali diskriminasi hukum sebagaimana diakui Hakim dalam kasus lain yang sebelumnya disangkakan kepada HRS.

HNW menuturkannya apabila keadilan hukum yang ditegakkan maka alasan Jaksa bahwa Habib Rizieq menyembunyikan hasil tes Swab atas

nama dirinya sebagai perbuatan bohong dan menimbulkan keonaran, seharusnya juga diterapkan kepada kasus sejenis yang dilakukan banyak pihak, termasuk oleh para menteri yang dinilai menyembunyikan fakta bahwa dirinya sebenarnya positif Covid-19.

Para menteri tersebut, seperti Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo sebelum ditangkap KPK, dan Menteri Koordinator Ekonomi dan Industri Airlangga Hartarto yang diberitakan juga terpapar Covid-19, dan tidak mengumumkannya ke publik, tapi tidak dikenai delik hukum apa pun.

“Jadi, jangan salahkan apabila rakyat menilai telah terjadi diskriminasi hukum yang

tidak menghadirkan keadilan hukum, dimana perbuatan yang sama dilakukan oleh orang lain, tapi tidak dijerat pidana, sedangkan Habib Rizieq yang bukan pejabat negara, dituntut dengan ancaman hukuman yang sangat tinggi, yakni 6 tahun penjara,” ujarnya melalui siaran pers di Jakarta, Sabtu (05/06).

HNW menyebutkan bahwa ada beberapa menteri di Kabinet Presiden Jokowi dan pejabat negara yang sejak awal menciptakan keonaran dan membuat berita yang tidak benar terkait Covid-19, seperti pada awal penyebaran covid-19 ada pejabat negara yang meremehkan bahaya Covid-19 dan menafikan kemungkinan masuknya covid-19 ke Indonesia. Malah ada menteri yang nyatakan agar tidak perlu mengenakan masker, atau mempromosikan kalung yang bisa menangkal Covid 19 dan lain sebagainya.

“Ada banyak yang sebakn info bohong dan membuat gaduh soal covid dan penanganan covid, termasuk



Dr. H.M. HIDAYAT NUR WAHID, M.A

Anggota Komisi VIII DPR RI

“Jangan salahkan apabila rakyat menilai telah terjadi diskriminasi hukum yang tidak menghadirkan keadilan hukum, dimana perbuatan yang sama dilakukan oleh orang lain, tapi tidak dijerat pidana, sedangkan Habib Rizieq yang bukan pejabat negara, dituntut dengan ancaman hukuman yang sangat tinggi, yakni 6 tahun penjara,”

oleh beberapa menteri, tetapi mereka tidak dikenai sanksi hukum apapun,” ujarnya.

“Padahal, ujaran seorang Menteri selaku pemegang kebijakan sangat signifikan pengaruhnya kepada masyarakat. Dan pandangan tersebut tentu berpengaruh kepada kebijakan pemerintah

sehingga tidak siap sejak awal, yang merugikan banyak pihak, dengan menyebarkan Covid-19 hingga disebut sebagai Bencana Nasional non alam, dengan kerugian yang sangat besar untuk Negara dan bangsa para korban Covid-19,” tambahnya.
Selengkapnya di fraksi.pks.id

Kutuk Teror yang Tewaskan Keluarga Muslim, HNW

Dukung PM Kanada Perangi Terorisme dan Islamophobia

KUTIPAN

Jakarta (11/06) — Anggota DPR yang juga Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid mengutuk serangan teroris dengan menabrakan mobil yang menewaskan satu keluarga muslim di Kanada,

serta mendukung sikap dan janji Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau yang akan memerangi segala bentuk terorisme dan ideologi kebencian seperti Islamophobia.

HNW sapaan akrabnya menilai bahwa tindakan tersangka Nathaniel Veltma yang sengaja menabrakan mobil ke keluarga Muslim, yang menunggu penyeberangan di trotoar terhadap satu keluarga dari tiga generasi yang mengakibatkan empat korban tewas dan satu anak berusia 9 tahun terluka berat dan dirawat di rumah sakit, di London, Ontario, Kanada merupakan bentuk tindakan kejahatan terorisme brutal yang berbasiskan islamophobia yang harusnya dihukum berat.

"Saya setuju dan mendukung

sikap PM Trudeau yang secara tegas menyatakan bahwa tindakan tersebut adalah serangan teroris dan bentuk dari Islamophobia yang harus dihentikan," ujarnya melalui siaran pers di Jakarta, Rabu (9/6).

HNW menyayangkan rentetan tindakan teror dan Islamophobia yang terus berlangsung di berbagai belahan dunia, termasuk di Kanada.

"Apalagi, Dewan Muslim Nasional Kanada juga mencatat pada periode 2015-2019 lalu, ada lebih dari 300 insiden teror kepada muslim, termasuk lebih dari 30 tindak kekerasan fisik," ungkapnya.

Lebih lanjut, Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menambahkan sikap PM Trudeau yang ingin memerangi terorisme

Islamophobia agar efektif mestinya diiringi dengan sanksi yang berat kepada pelaku, sehingga menimbulkan efek jera, dan tak terulangnya teror serupa.

HNW mencontohkan kasus serangan terorisme penembakan membabitnya terhadap jemaah sholat di Masjid Quebec Kanada, tahun 2017 oleh Alexandre Bissonette yang telah dihukum seumur hidup.

"Awalnya, Bissonette dihukum oleh pengadilan tingkat pertama dengan hukuman penjara seumur hidup dengan tanpa bisa mengajukan bebas bersyarat selama 40 tahun. Namun, pengadilan banding, pada 2020, mengkorting hukuman menjadi pidana seumur hidup dengan tanpa bisa mengajukan bebas bersyarat selama 25 tahun. Artinya, setelah 25 tahun, dia bisa mengajukan bebas bersyarat. Hukuman ringan semacam ini yang antara lain membuat terorisme Islamophobia terus berlanjut di Kanada, karena tidak memberi efek jera," tuturnya.

HNW membandingkan



Dr. H.M. HIDAYAT NUR WAHID, M.A
Anggota Komisi VIII DPR RI

"Saya setuju dan mendukung sikap PM Trudeau yang secara tegas menyatakan bahwa tindakan tersebut adalah serangan teroris dan bentuk dari Islamophobia yang harus dihentikan"

hukuman tersebut dengan yang diterima oleh teroris Brenton Harrison Tarrant di Masjid di Christchurch, Selandia Baru, yang dipidana seumur hidup tanpa peluang untuk mengajukan bebas bersyarat.

"Memang jumlah korban di Christchurch sangat banyak, bukan soal banyak atau

tidaknya korban, karena nyawa manusia itu sangat berharga dan dilindungi hukum, tetapi juga karena serangan terorisme brutal itu dilandaskan kepada kebencian terhadap kelompok tertentu," tukasnya.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id



***Mari Tetap
Patuhi Protokol
Kesehatan***

Ketua FPKS DPR RI: Sri Sultan HB X Tekankan Pesan Soal Persatuan

KUTIPAN

Yogyakarta (08/06) -- Sri Sultan Hamengkubuwono X berpesan kepada jajaran pengurus DPP PKS agar menjaga persatuan nasional.

Setiap elemen bangsa ini harus menghilangkan ego sektor masing-masing dan mulai bicara tentang kepentingan bangsa.

Hal ini disampaikan ulang Ketua Fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwaini yang mendampingi Presiden PKS Ahmad Syaikhul usai pertemuan dengan Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X di kompleks Kepatihan, Yogyakarta, Senin (7/6/2021).

"Beliau mengatakan sekarang ini banyak orang yang bicara 'Aku' dan 'Kamu' tidak pernah bicara dalam kerangka 'Kita'. Seharusnya kita mulai bicara tentang bagaimana bersama-sama membangun bangsa ini sebagai Kita," papar Jazuli.

Ia menambahkan, pesan persatuan ini amat relevan

untuk dijalankan oleh PKS sebagai salah satu entitas bangsa. Sebab itu PKS berkeliling ke berbagai elemen lewat Silaturahmi Kebangsaan.

Sekretaris Jenderal PKS Habib Aboe Bakar Al Habsy menambahkan, sosok Sri Sultan Hamengkubuwono X sebagai seseorang politik nasional yang sangat cair dalam memberikan nasihat dan masukan, termasuk kepada PKS.

"MasyaAllah Ngarso Dalem ini sosok yang memiliki jam terbang tinggi dalam politik nasional tapi sangat cair, sangat rileks dalam memberikan masukan. Nasihat-nasihatnya realistis dengan bahasa yang ringan disampaikan kepada PKS. Alhamdulillah ini masukan yang amat berharga," imbuhnya.



Dr. H. JAZULI JUWAINI, MA

Ketua Fraksi PKS DPR RI



"MasyaAllah Ngarso Dalem ini sosok yang memiliki jam terbang tinggi dalam politik nasional tapi sangat cair, sangat rileks dalam memberikan masukan. Nasihat-nasihatnya realistis dengan bahasa yang ringan disampaikan kepada PKS. Alhamdulillah ini masukan yang amat berharga"

Silaturahmi Kebangsaan ke Keraton
Yogyakarta

Presiden PKS Sebut Sri Sultan HB X Simbol Persatuan

KUTIPAN

Yogyakarta (08/06) --- Presiden PKS Ahmad Syaikhul memiliki kesan tersendiri saat hampir dua jam bertemu dengan Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X di kompleks Kepatihan, Yogyakarta, Senin (7/6/2021) malam.

Syaikhul menyebut sosok Sri Sultan Hamengkubuwono X sebagai sosok pemimpin pemersatu. Kepemimpinan Ngarso Dalem Sri Sultan Hamengkubuwono X adalah perekat kekuatan sosial, politik dan budaya sekaligus.

"Kami sangat berbahagia sekali dapat bertemu Ngarso Dalem Sri Sultan HB X, sebab beliau seorang tokoh nasional yang terus menyuarakan persatuan bangsa, menjadi perekat dan simbol kekuatan sosial politik dan budaya bangsa, serta konsisten dalam menyuarakan amanat penderitaan rakyat. Semoga

Ngarso Dalem senantiasa diberi kesehatan sehingga terus bisa menjadi panutan dalam kebaikan," sebut Syaikhul usai pertemuan.

PKS, papar Syaikhul, menyadari Kesultanan Yogyakarta sangat berperan dalam mengokohkan NKRI. Kesultanan Yogyakarta langsung mengakui Republik Indonesia yang baru berdiri dan secara resmi bergabung dalam Republik. Selain itu, sumbangsih kekayaan yang tidak dinilai diserahkan Sri Sultan HB IX kepada Presiden Soekarno.

Dalam pertemuan yang

sangat mengalir tersebut, Syaikhul menangkap kesan Sri Sultan Hamengkubuwono X sebagai pemimpin yang kuat dari intelektual sekaligus spiritual.

"Dalam tulisan Parni Hadi, beliau disebut Inspiring Prophetic Leader, memimpin dengan Kecerdasan Intelektual dan Spiritual. Teman-teman PKS yang tadi bertemu merasakan dari sentuhan kuat beliau bukan hanya kecerdasan semata tapi juga spiritual menjiwai betul. Kami bersyukur bisa mendapat nasihat dari beliau," kata dia.

Dalam pertemuan ini Presiden PKS Ahmad Syaikhul didampingi Sekjen PKS Habib Aboe Bakar Al Habsy, Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini, Ketua BPW PKS Jatiyaya Fikri Faqih dan Anggota DPR RI dari DIY Sukamta dan Ketua DPW PKS DIY Agus Mas'udi.



H. AHMAD SYAIKHU

Presiden PKS

"Kami sangat berbahagia sekali dapat bertemu Ngarso Dalem Sri Sultan HB X, sebab beliau seorang tokoh nasional yang terus menyuarakan persatuan bangsa, menjadi perekat dan simbol kekuatan sosial politik dan budaya bangsa, serta konsisten dalam menyuarakan amanat penderitaan rakyat. Semoga Ngarso Dalem senantiasa diberi kesehatan sehingga terus bisa menjadi panutan dalam kebaikan"



Temui Sri Sultan HB X, Presiden PKS Dapat Pesan Jaga NKRI

KUTIPAN

Yogyakarta (08/06) --- Presiden PKS Ahmad Syaikhul bersama jajaran DPP PKS melanjutkan Silaturahmi Kebangsaan dengan mengunjungi Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X di kantor Gubernur DIY, Yogyakarta, Senin (7/6/2021) malam.

Presiden PKS Ahmad Syaikhul didampingi Sekjen PKS Habib Aboe Bakar Al Habsy, Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini, Ketua BPW PKS Jatijaya Fikri Faqih dan Anggota DPR RI dari DIY Sukamta.

Syaikhul bersyukur jajaran DPP PKS diterima oleh Sri Sultan Hamengku Buwono X. Ini sebagai rangkaian Silaturahmi Kebangsaan PKS yang telah dilakukan sejak awal Ramadhan.

"Dalam pertemuan ini, kami mengapresiasi kebijakan Ngarso Dalem Sri Sultan HB X yang mewajibkan semua ruang publik di wilayah Yogyakarta memutar lagu kebangsaan Indonesia Raya, setiap hari pukul 10.00 WIB. Ini menjadi

sebuah terobosan untuk mengukuhkan semangat kebangsaan dan memperkokoh jiwa nasionalisme serta persatuan. PKS siap mendukung kebijakan ini, bahkan siap mengumandangkan di kantor-kantor PKS di seluruh Indonesia," ujar Syaikhul dalam keterangannya usai pertemuan.

Syaikhul mengatakan, suasana pertemuan jajaran DPP PKS dengan Sri Sultan Hamengku Buwono X berlangsung dengan keakraban dan suasana yang mengalir.

"Kami mendapat nasihat dan arahan dari Ngarso Dalem bagaimana kita menjaga komitmen menjaga keutuhan NKRI sehingga benar-benar dapat arahan sangat jelas,"

jelas Syaikhul.

Syaikhul mengungkapkan dalam pertemuan tersebut, Sri Sultan Hamengku Buwono X berpesan sebagaimana pesannya dalam Rakerwil PKS DIY beberapa waktu lalu.

"Lewat perubahan lambang, mars dan hymne beliau berharap bisa menjadikan PKS yang inklusif untuk berbagai lapisan masyarakat. Kaitan kerja bukan hanya sekedar tebar pesona tapi tebar kinerja," ucap Syaikhul.

Ngarso Dalem Sri Sultan Hamengku Buwono X, papar Syaikhul, juga berpesan agar pejabat publik harus memberikan kesan kinerja lebih banyak dibandingkan kesan yang lain.

"Kuncinya banyak membangun komunikasi dengan itu banyak hal yang bisa terselesaikan kebijakannya lebih realistis sesuai apa yang dibutuhkan rakyat," kata dia.

Dalam kesempatan ini, PKS memperkenalkan kepengurusan baru masa bakti 2020-2025, lambang, Mars dan Hymne PKS yang baru. Berbagai perubahan ini sebagai semangat baru untuk semakin fresh, friendly, dan inklusif, serta siap berkolaborasi dengan



H. AHMAD SYAIKHU

Presiden PKS

"Dalam pertemuan ini, kami mengapresiasi kebijakan Ngarso Dalem Sri Sultan HB X yang mewajibkan semua ruang publik di wilayah Yogyakarta memutar lagu kebangsaan Indonesia Raya, setiap hari pukul 10.00 WIB. Ini menjadi sebuah terobosan untuk mengukuhkan semangat kebangsaan dan memperkokoh jiwa nasionalisme serta persatuan"

bagbagai elemen dalam membangun bangsa.

"Kami sangat bersyukur dapat menerima nasihat, wejangan, dan dukungan secara langsung dari Ngarso

Dalem Sri Sultan Hamengku Buwono X. Semoga semakin mengukuhkan semangat PKS dalam berkhidmat melayani dan membela NKRI," kata dia.



**Kunjungi
Kanal Resmi
Fraksi PKS DPR RI**

-  Website
fraksi.pks.id
-  Instagram
[fraksipksdpri](https://www.instagram.com/fraksipksdpri)
-  Twitter
[@fraksipksdpri](https://twitter.com/fraksipksdpri)
-  Facebook
[Fraksi PKS DPR RI](https://www.facebook.com/Fraksi_PKS_DPR_RI)
-  Youtube
[PKSTV DPR RI](https://www.youtube.com/CKSTV_DPR_RI)

***Nantikan
Setiap Pekan***